

Anak Tidak Sekolah

Studi Kasus di Kota Pasuruan,
Kabupaten Bondowoso & Kabupaten Situbondo
Provinsi Jawa Timur



Bagong Suyanto, Septi Ariadi,
Rahma Sugihartati & Zainuddin Mailiki

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Timur & UNICEF
2012

ANAK TIDAK SEKOLAH

Studi Kasus di Kota Pasuruan,
Kabupaten Bondowoso & Kabupaten Situbondo
Provinsi Jawa Timur

Bagong Suyanto, Septi Ariadi,
Rahma Sugihartati & Zainuddin Mailiki

Kerjasama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur
dan UNICEF
2012

ANAK TIDAK SEKOLAH
Studi Kasus di Kota Pasuruan,
Kabupaten Bondowoso & Kabupaten Situbondo
Provinsi Jawa Timur

Penulis:
Bagong Suyanto, Septi Ariadi,
Rahma Sugihartati & Zainuddin Mailiki

Kerjasama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Timur & UNICEF
Tahun 2011

ISBN: 708-602-8625-35-7

KATA PENGANTAR

Anak-anak dari keluarga miskin, siswa yang tinggal kelas, dan terlebih anak yang sudah terlanjur putus sekolah sesungguhnya adalah bagian dari kelompok anak-anak yang bernasib malang dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Kekeliruan kita di masa lalu adalah menganggap masalah anak-anak malang ini akan dapat terselesaikan dengan sendirinya setelah persoalan kemiskinan dapat diatasi dan stabilitas politik berhasil diciptakan. Pengalaman di masa lalu – diakui atau tidak – telah mengajarkan kepada kita bahwa masalah anak rawan adalah sebuah isu spesifik yang perlu ditangani secara khusus, berkesinambungan dan membutuhkan kesabaran yang benar-benar ekstra, karena ada banyak faktor dan jenjang masalah yang mesti diurai satu per satu sebelum kita dapat memahami akar masalah yang sebenarnya dari masalah krusial yang satu ini.

Studi yang tengah dilaporkan ini bermaksud memetakan situasi problematik yang dihadapi anak-anak di luar sekolah, mulai dari anak-anak yang belum dan mungkin tidak sekolah, anak rawan putus sekolah, hingga siswa yang putus sekolah di tengah jalan karena mereka dalam usia belia terpaksa bekerja, sehingga mereka harus menanggung beban ganda yang berat di luar kapasitasnya sebagai anak-anak. Studi ini mendesak untuk dilakukan karena permasalahan anak-anak di luar sekolah ini sesungguhnya tidak bisa dianggap telah teratasi hanya melalui Program BOS/BOPDA, selain juga karena persoalan ini bukan tidak mungkin menjadi semacam gunung es yang suatu saat menjadi bom waktu yang mengejutkan jika tidak diantisipasi secara preventif sejak awal.

Secara garis besar, tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk: (1) Mengidentifikasi profil sosial-ekonomi dan memetakan situasi problematik yang tengah dihadapi anak-anak yang ada di luar sekolah dan siswa rawan putus sekolah di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, (2) Mengidentifikasi masalah prioritas dan merumuskan strategi serta program intervensi yang berbasis permasalahan yang ditemukan di lapangan dalam rangka penanganan permasalahan anak di luar sekolah di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, dan (3) Memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo dalam rangka merumuskan sejumlah rekomendasi untuk mengeliminasi kecenderungan terjadinya anak di luar sekolah, siswa putus sekolah dan mengurangi jumlah siswa rawan DO di Jawa Timur.



Penelitian ini dapat terselesaikan, sudah barang tentu berkat dukungan dari berbagai pihak. Kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya kajian ini kami ucapkan terimakasih sebesar-besarnya terutama kepada: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur beserta staf, Pimpinan dan Staf Unicef (Bapak Made Sutarna, Bapak Widodo dan kawan-kawan), serta berbagai pihak yang banyak membantu selama proses pengumpulan data di lapangan. Terimakasih juga disampaikan kepada segenap responden dan informan pelaksana program di 3 daerah, Kabupaten Bondowone, Situbondo dan Kota Pasuruan, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu demi satu.

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan yang Maha Agung yang karena perkenanNya kajian ini dapat terlaksana dan sampai ke tangan pembaca, meski disadari banyak keterbatasan.

Akhirnya, kami berharap studi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepedulian untuk menangani permasalahan anak di luar sekolah, khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, Januari 2012

Peneliti,

Bagong Suyanto, Septi Ariadi,
Rahma Sugihartati, & Zainuddin Maliki

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Executive Summary	ix
BAB 1 PROBLEMA ANAK DI LUAR SEKOLAH DI JAWA TIMUR: URAIAN PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan	4
3. Tujuan	5
4. Hasil yang Diharapkan	5
5. Metode Penelitian	5
BAB 2 ANAK DI LUAR SEKOLAH DAN KELANGSUNGAN PENDIDIKANNYA: KERANGKA ANALISIS	9
1. Kelangsungan Pendidikan Anak	9
2. Bekerja dan Sekolah	10
3. Akar Masalah	11
4. Menakar Ulang	13
BAB 3 GAMBARAN UMUM PENDUDUK DAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	15
1. Kondisi Geografis	16
2. Pemerintahan	17
3. Penduduk dan Kepadatan Penduduk	20
4. Pendidikan di Jawa Timur	25
5. Fasilitas Kesehatan di Jawa Timur	38
BAB 4 PUTUS SEKOLAH, BEBAN KERJA BURUH ANAK DAN MEKANISME <i>SURVIVAL</i> KELUARGA	47
1. Karakteristik Anak Putus Sekolah	47
2. Latar Belakang dan Keterbatasan Orang Tua	50
3. Kelangsungan Pendidikan Anak	58
4. Riwayat dan Beban Kerja Anak	69
5. Tekanan Kemiskinan dan Mekanisme <i>Survival</i> Keluarga	76



BAB 5	POLA DAN KENDALA DALAM AKTIVITAS BELAJAR, PENGALAMAN MENEMPUH PENDIDIKAN DAN KEBUTUHAN ANAK RAWAN PUTUS SEKOLAH	83
1.	Profil Anak Rawan Putus Sekolah dan Orang Tuanya	86
2.	Pola dan Kendala yang Dihadapi Anak Rawan Putus Sekolah	98
3.	Kelangsungan Pendidikan	110
BAB 6	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD): PROBLEMATIKA DAN KENDALA PENGEMBANGANNYA	119
1.	Arti Penting dan Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini	121
2.	PAUD sebagai wadah Pembangunan Sumber Daya Manusia Sejak Usia Dini	123
3.	Pendidikan Anak Usia Dini: Problematika dan Kendala	126
BAB 7	KESIMPULAN DAN SARAN	145
1.	Kesimpulan: Sejumlah Isu Prioritas	147
2.	Kebijakan dan Program Prioritas	150
3.	Prasyarat yang Dibutuhkan	153
	Daftar Pustaka	157

DAFTAR TABEL

Tabel		
I.1	Lokasi dan Jumlah Responden Penelitian	6
III.1	Letak, Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota	17
III.2	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2009	19
III.3	Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun Menurut Kabupaten/Kota	21
III.4	Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun Menurut Kabupaten/Kota 2006-2009	24
III.5	Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar Negeri dan Swasta 2009/2010	27
III.6	Sekolah, Murid, Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Swasta 2009/2010	29
III.7	Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Umum Negeri dan Swasta 2009/2010	30
III.8	Persentase Dim 1,2,3, 2010	32
III.9	Distribusi Anak yang Tidak Bersekolah Berdasarkan Per kapita Rumah Tangga 2010	32
III.10	Status bersekolah 6-18 Tahun 2010	33
III.11	Penduduk Usia 6-18 Tahun (Grafik), 2010	34
III.12	Penduduk Anak-Anak Berumur 13-15 Tahun yang Tidak Bersekolah Menurut Kabupaten/Kota, 2010	36
III.13	Alasan Anak 7-15 Tahun/belum Pernah Sekolah Lagi Menurut Kelompok Umur, 2010 di Provinsi Jawa Timur	37
III.14	Banyaknya Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 2006-2009	40
III.15	Banyaknya Puskesmas Keliling, Posyandu dan Pondok Bersalin	42
IV.1	Karakteristik Anak Putus Sekolah (N=150, Dalam %)	49
IV.2	Pendidikan dan Pekerjaan Orang Tua (N=150, Dalam %)	51
IV.3	Kondisi Ekonomi Keluarga Anak Putus Sekolah (N=150, Dalam %)	52
IV.4	Hal-hal yang Dirasa Masih Memberatkan Orang Tua Ketika Harus Membiayai Anak Sekolah (N=150, Dalam%)	54
IV.5	Biaya Lain yang Tetap Harus Dibayar Orang Tua Responden Untuk Keperluan Pendidikan Responden Sebelum Putus Sekolah (N=150, Dalam %)	56
IV.6	Hal-hal yang Dilakukan Keluarga Anak Putus Sekolah Untuk Menambah Penghasilan Keluarga	57

IV.7	Berbagai Bentuk Penghematan yang Dilakukan Keluarga Anak Putus Sekolah Selama Setahun Terakhir	57
IV.8	Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah	59
IV.9	Prestasi Akademis Sebelum Putus Sekolah	68
IV.10	Riwayat Kerja Buruh Anak (N=150, Dalam %)	70
IV.11	Beban Kerja Buruh Anak	73
IV.12	Keuntungan atau Manfaat yang Diperoleh Responden Dengan Bekerja dan Memiliki Penghasilan Sendiri	75
IV.13	Akibat-akibat yang Pernah Menimpa Keluarga Anak Putus Sekolah Akibat Tekanan Kemiskinan yang Dialami Setahun Terakhir (N=150, Dalam %)	78
IV.14	Kebutuhan Anak yang terpaksa dikorbankan ketika kondisi keuangan keluarga orang tua sedang bermasalah	80
IV.5	Kiat yang dilakukan keluarga anak putus sekolah untuk menyalahi tekanan kemiskinan	81
V.1	Identitas Responden dan Latar Belakang Sosial Orang Tua (Dinyatakan dalam persen dengan N=150)	91
V.2	Riwayat Kerja Responden	93
V.3	Latar Belakang Ekonomi Orang Tua Responden	94
V.4	Kondisi Pemenuhan Hidup dan Intensitas Kesulitan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan pokok (Dinyatakan dalam persen dengan N=150)	96
V.5	Langkah yang dilakukan oleh keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarga (Dinyatakan dalam persen dengan N=100)	98
V.6	Persoalan yang dihadapi responden ketika belajar (Dinyatakan dalam persen dengan N=150)	100
V.7	Pola dan Aktivitas Belajar yang dilakukan responden (Dinyatakan dalam persen dengan N=150)	104
V.8	Hal-hal yang dinilai menghambat proses pendidikan yang ditempuh responden (Dinyatakan dalam persen dengan N=150)	106
V.9	Kondisi yang dihadapi responden selama menempuh pendidikan (Dinyatakan dalam persen dengan N=150)	108
V.10	Jenis kegiatan yang dilakukan responden dalam mendukung proses belajar (Dinyatakan dalam persen dengan N=150)	109
V.11	Pengalaman responden ketika menempuh pendidikan (Dinyatakan dalam persen dengan N=150)	114
V.12	Jenis kebutuhan responden untuk menjaga kelangsungan pendidikan dan meningkatkan prestasi belajar (Dinyatakan dalam persen dengan N=150)	117
VII.1	Program untuk mengeliminasi angka putus sekolah dan siswa rawan <i>Drop-Out</i> di Propinsi Jawa Timur	152

EXECUTIVE SUMMARY

ANAK TIDAK SEKOLAH

Studi Kasus di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso
dan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur

1. Latar Belakang

Keinginan dan janji pemerintah untuk segera membebaskan anak-anak usia sekolah (7-15 tahun) dari ancaman buta huruf dan kemungkinan putus sekolah di tengah jalan tampaknya hingga kini belum juga terwujud. Kendati alokasi dana pembangunan bidang pendidikan terus ditambah, dan secara khusus pemerintah juga telah menggulirkan program BOS/BOPDA untuk membantu membiayai kebutuhan sekolah dan menjamin kelangsungan pendidikan siswa, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Tetapi, karena faktor-faktor yang sifatnya struktural dan kultural, maka angka siswa putus sekolah dan rawan putus sekolah diperkirakan akan tetap tinggi, sehingga jumlah anak yang berada di luar sekolah pun sepertinya tak beringsut membaik.

Di berbagai daerah, tak terkecuali di Provinsi Jawa Timur, anak-anak yang ada di luar sekolah ditengarai terus bermunculan didorong karena alasan yang berbeda-beda. Secara statistik dilaporkan di tahun 2009 sekitar 1,8 juta anak SD berusia 7-12 tahun, dan 4,8 juta anak usia 13-15 tahun tidak sekolah. Kalau dicoba digambarkan dalam konteks waktu, setiap menit dilaporkan 4 orang anak Indonesia ternyata harus putus sekolah di tengah jalan karena berbagai sebab (<http://edukasi.kompas.com>, 17 Desember 2009). Prediksi UNESCO, di Indonesia, Indeks Pendidikan untuk semua orang (*Education for all, EFA*) di tahun 2015 diperkirakan tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan, dan bahkan bukan tidak mungkin akan mengalami penurunan (<http://edukasi.kompas.com>, 2 Maret 2011). Data Sensus terakhir menyebutkan untuk tahun 2010 paling-tidak ada 3,5 juta anak usia 7-15 tahun yang tidak sekolah.

Di Provinsi Jawa Timur, sejumlah daerah yang disinyalir merupakan kantong anak rawan dan memiliki angka anak-anak di luar sekolah yang relatif tinggi adalah daerah yang masuk dalam wilayah "tapal kuda", mulai dari Pulau Madura, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso hingga Situbondo. Berbagai daerah ini, kondisi IPM masyarakatnya rata-rata rendah, dan bahkan terendah bila dibandingkan kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur, sehingga bisa diduga di berbagai kabupaten/kota tersebut jumlah anak-anak yang ada di luar sekolah pun relatif tinggi. Tekanan kemiskinan, kondisi alam yang kurang kondusif, dan ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat untuk menikahkan anak dalam usia dini, semua faktor ini pada akhirnya menyebabkan kemungkinan anak meninggalkan sekolah, putus sekolah di tengah jalan menjadi lebih besar.

Studi yang tengah dilaporkan ini bermaksud memetakan situasi problematik yang dihadapi anak-anak di luar sekolah, mulai dari anak-anak yang belum dan mungkin tidak sekolah, anak rawan putus sekolah, hingga siswa yang putus sekolah di tengah jalan karena mereka dalam usia belia terpaksa bekerja, sehingga mereka harus menanggung beban ganda yang berat di luar kapasitasnya sebagai anak-anak. Studi ini mendesak untuk dilakukan karena permasalahan anak-anak di luar sekolah ini sesungguhnya tidak bisa dianggap telah teratasi hanya melalui Program BOS/BOPDA, selain juga karena persoalan ini bukan tidak mungkin menjadi semacam gunung es yang suatu saat menjadi bom waktu yang mengejutkan jika tidak diantisipasi secara preventif sejak awal.

2. Permasalahan

Secara rinci, beberapa permasalahan yang dikaji dalam studi ini adalah:

1. Bagaimanakah gambaran tentang karakteristik sosial dan latar belakang sosial-ekonomi keluarga anak-anak di luar sekolah di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak-anak di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo rawan putus sekolah, belum atau terpaksa tidak sekolah di usia sekolah, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan siswa tidak melanjutkan sekolah?
3. Sejauhmana peran sekolah, guru dan orang tua serta warga masyarakat di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo dalam upaya pencegahan agar anak-anak tidak berada di luar sekolah dan putus sekolah di tengah jalan?
4. Sejauhmana efektivitas kebijakan dan program Pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam upaya penanganan anak di luar sekolah?

3. Tujuan

Secara rinci, tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk:

1. Mengidentifikasi profil sosial-ekonomi dan memetakan situasi problematik yang tengah dihadapi anak-anak yang ada di luar sekolah dan siswa rawan putus sekolah di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo.
2. Mengidentifikasi masalah prioritas dan merumuskan strategi serta program intervensi yang berbasis permasalahan yang ditemukan di lapangan dalam rangka penanganan permasalahan anak di luar sekolah di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo.

3. Memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo dalam rangka merumuskan sejumlah rekomendasi untuk mengeliminasi kecenderungan terjadinya anak di luar sekolah, siswa putus sekolah dan mengurangi jumlah siswa rawan DO di Jawa Timur.

4. Hasil yang Diharapkan

Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. Teridentifikasi isyu-isu prioritas di balik masalah anak-anak di luar sekolah di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo.
2. Terumuskannya rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Pemerintah Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo dalam rangka mengeliminasi kecenderungan terjadinya anak di luar sekolah, siswa putus sekolah dan mengurangi jumlah siswa rawan DO di Jawa Timur.

5. Metode Penelitian

Studi sebagaimana dilaporkan pada dasarnya merupakan gabungan antara kegiatan pengamatan lapangan, *review* hasil studi dan analisis data sekunder tentang permasalahan anak di luar sekolah, siswa putus sekolah dan siswa rawan putus sekolah di wilayah Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo.

Untuk kegiatan penelitian lapangan, studi ini secara *purposive* telah menetapkan 3 daerah sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan daerah tersebut ditengarai merupakan daerah kantong anak rawan, dan rata-rata memiliki kecenderungan siswa tidak naik kelas dan siswa putus sekolah yang relatif tinggi. Ketiga daerah itu adalah Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso, dan Situbondo.

Dalam penelitian ini, beberapa kelompok anak rawan yang dikaji dan menjadi unit analisis, secara garis besar meliputi: (1) kategori anak usia 3-6 tahun yang tidak atau belum sekolah, (2) kategori siswa yang putus sekolah di jenjang pendidikan Dasar 9 Tahun, dan (3) kategori siswa yang belum putus sekolah, tetapi rawan DO, baik di jenjang SD maupun SMP. Yang dimaksud siswa rawan DO, adalah siswa yang sangat potensial untuk putus sekolah, baik karena alasan pernah tidak naik kelas, memiliki prestasi akademik yang pas-pasan, atau karena tekanan kemiskinan yang dialami keluarganya.

Pertama, untuk mengidentifikasi dan memetakan situasi problematik yang menyebabkan anak usia 3-6 tahun tidak atau belum sekolah, data yang dibutuhkan telah digali melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan, antara lain tokoh masyarakat, guru, Ketua RT/RW, dan keluarga miskin yang ada di masing-masing daerah. Di masing-masing daerah, ditetapkan jumlah informan untuk permasalahan ini

sebanyak 15 informan, sehingga secara keseluruhan telah diwawancarai 45 informan.

Kedua, untuk menggali problema siswa yang putus sekolah di jenjang pendidikan dasar 9 tahun, SD maupun SMP dalam studi ini telah dilakukan wawancara berstruktur kepada 150 responden. Wawancara dilakukan langsung kepada anak-anak yang telah putus sekolah, di mana untuk masing-masing daerah diwawancarai 50 anak putus sekolah.

Tabel 1
Lokasi dan Jumlah Responden Penelitian

Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Jumlah Responden Anak Putus Sekolah	Jumlah Responden Siswa Rawan DO
Kepel	Bugul kidul	Kota Pasuruan	25	25
Ngemplak	Purworejo		25	25
Arak-arak	Wringin	Kabupaten Bonowoso	25	25
Sumber tengah	Binakal		25	25
Sekar putih	Mangaran	Kabupaten Situbondo	25	25
Gelung	Panarukan		25	25
Jumlah			150	150

Ketiga, untuk memahami problema yang dihadapi siswa yang belum putus sekolah, tetapi rawan DO, baik di jenjang SD maupun SMP, dalam studi ini juga telah dilakukan kegiatan survei di masing-masing daerah. Jumlah responden kategori ini juga ditetapkan sebanyak 150 responden. Kriteria responden adalah: (1) siswa SD Kelas V dan VI yang pernah tidak naik kelas, yang nilai akademiknya tergolong lima terendah di kelasnya, dan (2) siswa SMP yang pernah tidak naik kelas, yang nilai akademiknya tergolong lima terendah di kelasnya.

Proses pengumpulan data di lapangan, dipandu oleh perangkat kuesioner dan *interview guide* yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kuesioner dibutuhkan ketika melakukan survey dalam rangka mengidentifikasi profil anak-anak di luar sekolah dan keluarganya. Sedangkan *interview guide* dibutuhkan sebagai panduan ketika melakukan wawancara mendalam kepada sejumlah informan, baik dari kalangan masyarakat, institusi pendidikan maupun aparatur pemerintahan.

Dengan tujuan agar dapat diperoleh data secara rinci dan komprehensif, dalam studi ini selain studi lapangan, juga dilakukan analisis terhadap data sekunder, monografi dan data statistik (BPS) – sejauh hal itu mendukung analisis persoalan terhadap kehidupan anak di luar sekolah.

Dalam penelitian ini, telah dilakukan observasi untuk melihat kondisi sekolah dan situasi kehidupan sehari-hari serta aktivitas-hari anak-anak di luar sekolah. Observasi ini perlu dilakukan untuk mengetahui secara lebih mendalam dan nyata kehidupan anak-anak di luar sekolah di daerah penelitian.

Dalam penelitian ini, seluruh data yang dikumpulkan, telah dianalisis secara kualitatif dengan mengedepankan uraian-uraian *naratif* sehingga hasil penelitian ini bisa menggambarkan fenomena yang diteliti secara lebih lengkap dan komprehensif. Sengaja dalam penelitian ini tidak dilakukan uji statistik, karena tujuan awal penelitian memang lebih pada upaya menggali kedalaman data dan memahami secara empatif kondisi anak di luar sekolah. Kutipan-kutipan wawancara, sepanjang relevan dan memperjelas permasalahan yang dikemukakan telah ditampilkan dalam bab temuan dan analisis data.

Di akhir laporan, selain dikemukakan kembali temuan-temuan pokok hasil kajian, juga ditampilkan sejumlah program intervensi yang benar-benar kontekstual bagi upaya penanganan anak di luar sekolah di Provinsi Jawa Timur. Rekomendasi yang disusun adalah rekomendasi yang sifatnya preventif dan rekomendasi berupa langkah-langkah kuratif yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan hak anak.

6. Kesimpulan: Sejumlah Isu Prioritas

Dari hasil studi yang telah dilakukan telah dapat diketahui bahwa masalah anak di luar sekolah, anak putus sekolah dan persoalan siswa rawan DO sesungguhnya adalah masalah yang benar-benar sangat rumit, yang tak mungkin dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan yang sifatnya karitatif dan *top-down*. Pendekatan karitatif berupa pemberian bea-siswa, bantuan sembako, dan sejenisnya walau fungsional, tetapi dalam jangka panjang dikhawatirkan dapat menimbulkan ketergantungan baru yang menghilangkan mekanisme *self-help* masyarakat. Sedangkan, pendekatan *top-down* yang sifatnya seragam dan massal, selain tidak kontekstual, sering terjadi tidak mampu merangsang tumbuhnya apresiasi dan respons masyarakat secara memadai, sehingga dikhawatirkan rawan bias dan penyimpangan akibat tidak adanya kontrol di tingkat lokal. Untuk dapat menyusun kebijakan dan program intervensi yang kontekstual, karena itu sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu masalah-masalah apa sebenarnya yang menjadi akar persoalan dari makin merembaknya jumlah pekerja anak dan peningkatan angka DO di daerah pedesaan.

1. Tekanan kebutuhan hidup dan proses pendalaman kemiskinan, secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan keluarga miskin memilih untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jangka pendek dan pragmatis – khususnya makan dan uang – daripada melakukan investasi jangka panjang menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, yang dinilai tidak fungsional. Dalam situasi normal saja, banyak di antara keluarga miskin yang kehidupan sehari-harinya pas-pasan dan terpaksa melibatkan anak untuk ikut mencari tambahan pendapatan. Ketika tekanan kemiskinan dirasa makin berat, maka bisa dipahami jika keluarga-keluarga miskin tersebut kemudian

collapse dan berusaha bertahan hidup dengan cara apapun, termasuk membiarkan anak-anaknya bekerja dalam sektor-sektor yang mungkin tergolong berbahaya.

2. Penyebab anak putus sekolah atau tinggal kelas adalah karena anak-anak dari keluarga miskin itu umumnya terpaksa bekerja untuk membantu orang tua, baik dalam kegiatan domestik rumah tangga maupun untuk pekerjaan di sektor publik yang menghasilkan pendapatan. Kewajiban untuk menjaga adiknya, kewajiban melakukan berbagai pekerjaan domestik di rumah, kewajiban untuk bekerja di laut, di ladang, mengembalakan ternak, dan lain-lain adalah beban hidup yang terpaksa ditanggung oleh anak-anak dari keluarga miskin, sehingga waktu luang anak itu menjadi sangat terbatas – yang dapat dimanfaatkan untuk belajar. Di kalangan keluarga miskin, sering terjadi anak diperlakukan sebagai tenaga substitusi ibu, sehingga mereka sejak dini biasanya sudah dilatih untuk dapat mengerjakan banyak hal, mulai dari urusan rumah tangga sampai ke urusan mencari penghasilan yang semestinya menjadi tanggungjawab penuh para orang tua. Dengan kata lain, bahwa baik sebagai pekerja keluarga maupun sebagai pekerja di sektor publik di luar keluarga, anak-anak ini umumnya tidak memiliki waktu yang cukup untuk dapat tumbuh-kembang secara wajar, karena sebagian besar waktu mereka tersita untuk terlibat dalam kegiatan produktif dan kegiatan kerumahtanggaan yang panjang.
3. Waktu yang dihabiskan anak untuk menonton televisi umumnya jauh lebih banyak daripada waktu untuk belajar. Di tengah minimnya sarana hiburan dan waktu yang cukup untuk beristirahat serta bermain, bagi anak-anak kehadiran berbagai acara hiburan yang ditayangkan televisi ibaratnya adalah air segar di masa paceklik yang kering dan panas. Di pedesaan, boleh dikata jam yang dimanfaatkan anak untuk menonton televisi hanya bisa dikalahkan dengan lama waktu yang digunakan anak-anak untuk tidur. Sementara itu, yang ironis, jam yang seharusnya dimanfaatkan anak untuk belajar ternyata hampir-hampir tidak ada. Suasana rumah yang tidak kondusif, minimnya buku-buku yang dimiliki, dan tidak adanya orang yang bisa dijadikan tempat bertanya, serta tidak adanya kontrol dari orang tua adalah faktor gabungan yang menyebabkan anak lebih terdorong (dan lebih senang) memanfaatkan waktu luang untuk bermain daripada belajar. Di pihak orang tua sendiri, mereka semestinya dapat membatasi dan bahkan melarang jika anak-anaknya menghabiskan waktu yang berlebihan untuk menonton televisi. Namun, karena mempertimbangkan bahwa menonton televisi adalah semacam bonus atau selingan bagi anak-anak setelah mereka lelah bekerja membantu orang tua, dan orang tua sendiri pada dasarnya juga sama-sama haus hiburan, maka kebutuhan



- anak dan sikap orang tua ini akhirnya menjadi saling membenarkan.
4. Kecenderungan anak tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah sebagian besar disebabkan oleh pandangan orang tua dan anak tentang *value added* atau arti penting pendidikan, khususnya untuk jenjang SMP. Sebagian besar masyarakat umumnya berpandangan bahwa sekolah tidak menjamin masa depan mereka, karena dalam kenyataan tidak ada bukti yang signifikan memperlihatkan bahwa masa depan (kesejahteraan) anak yang putus sekolah dengan anak yang lulus hingga SMA berbeda. Bahkan, tidak jarang terjadi anak-anak yang putus sekolah ternyata dalam kehidupan nyata memiliki taraf kehidupan yang lebih sejahtera daripada anak yang lulus SMA.
 5. Salah satu faktor pendorong anak putus sekolah adalah adanya kebiasaan masyarakat untuk melakukan pernikahan dini bagi anak-anaknya. Dibandingkan anak laki-laki kemungkinan anak perempuan untuk putus sekolah relatif lebih besar karena tekanan sosial dan belum berkembangnya kesadaran gender secara memadai di kalangan orang tua. Banyak orang tua di pedesaan masih beranggapan bahwa anak perempuan sebaiknya sejak dini diajari terlibat dalam pekerjaan domestik, belajar bertanggungjawab pada pekerjaan "dapur", dan tidak perlu sekolah terlalu tinggi karena pada saat usia mereka mencapai 12-13 tahun, biasanya para orang tua sudah bermaksud untuk menjodoh-jodohkan dan menikahkan anak perempuannya, baik karena faktor tradisi maupun karena faktor ekonomi. Bagi masyarakat desa, dengan menikahkan cepat-cepat anak perempuannya, selain sebagai salah satu cara untuk mengurangi tanggungjawab menghidupi anak-anak sehari-hari, terkadang juga merupakan jalan pintas untuk memperoleh uang dalam waktu cepat dan sebagai sarana melakukan mobilitas vertikal. Di mata orang tua, menginvestasikan dana untuk membiayai anak perempuan bersekolah, disadari sebagai tindakan yang tidak terlalu bermanfaat karena *toh* nantinya yang akan memetik hasil akhir adalah pihak suami atau kerabat pasangannya.
 6. Menurut ketentuan yang berlaku sebetulnya anak-anak yang terlibat dalam kegiatan produktif masih dapat ditoleransi, asalkan tidak lebih dari 4 jam sehari. Namun, dalam praktek kerap kali ditemukan anak-anak terjerumus dalam situasi dan kondisi pekerjaan yang berbahaya, yang dapat mengganggu proses tumbuh-kembang anak secara wajar. Di berbagai sektor industri kecil, sektor pertanian, perdagangan, sektor informal atau yang lain, sering ditemui anak-anak yang bekerja kelewat lama, rata-rata lebih dari 5 jam per hari atau bahkan lebih, atau melakukan jenis pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka, seperti: ikut melaut seharian penuh, bekerja di

- perkebunan tembakau atau perkebunan kopi hingga 12 jam per hari atau bahkan lebih ketika musim panen tiba, memegang alat-alat yang tajam dan menjalankan mesin yang dapat mencelakakan.
7. Upaya penanganan masalah pekerja anak terkesan kuat masih pada taraf penyediaan payung hukum dan menekankan aspek legalitasnya saja, sementara implementasinya di lapangan boleh dikata hampir-hampir tidak ada. Kendati disadari bahwa melibatkan anak dalam kegiatan produktif cenderung menempatkan anak dalam posisi yang rawan diperlakukan salah, tetapi seringkali masalah ini dibiarkan berlarut-larut begitu saja karena dianggap masih sesuai dengan norma dan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia di pedesaan – yang *notabene* sebagian besar masih banyak yang tidak berpendidikan dan miskin. Dalih yang banyak dikedepankan adalah: bagaimana mungkin melarang anak-anak bekerja, jika orang tua anak yang bersangkutan ternyata hidupnya serba pas-pasan dan membutuhkan sumbangan penghasilan dari anak sebagai salah satu tiang penyangga ekonomi keluarga yang penting. Bagi masyarakat miskin, kenapa banyak yang terkesan enggan menyekolahkan anaknya – bahkan hanya di jenjang SMP sekali pun – bukan semata karena tidak memiliki biaya yang cukup untuk itu, melainkan yang lebih dikhawatirkan sebetulnya adalah kemungkinan hilangnya salah satu sumber pendapatan yang penting bagi keluarga itu jika si anak yang bersangkutan semata hanya bersekolah.
 8. Di pedesaan, posisi sekolah dan guru seringkali menghadapi dilema. Di satu sisi jika sekolah bersikeras untuk menerapkan standart proses pengajaran dan melakukan evaluasi yang ketat akan beresiko sebagian besar siswa mungkin tidak bisa memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Tetapi, jika proses pembelajaran dan evaluasi yang dikembangkan berjalan longgar, maka kemungkinan kualitas pembelajaran dan mutu siswa yang dihasilkan menjadi berkurang. Bukan tidak mungkin, siswa yang di kelas prestasi belajarnya kurang, akhirnya lebih memilih putus sekolah karena malu diolok teman atau malu diperlakukan diskriminatif oleh guru. Dalam banyak kasus, guru umumnya lebih memilih bersikap agak longgar dalam penilaian prestasi belajar siswa, terutama untuk mencegah agar siswa tetap bisa naik kelas dan tidak putus di tengah jalan.
 9. Animo dan kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak di jenjang pra-sekolah, khususnya di jenjang TK dan *Play Group* umumnya rendah, karena keterbatasan kondisi ekonomi, akses geografis yang menghambat, dan kesulitan yang dihadapi para orang tua untuk mengatur waktu antara bekerja dan mengantar anak ke sekolah.

7. Kebijakan dan Program Prioritas

Untuk mencegah dan menangani kasus anak yang sudah terlanjur putus sekolah, harus diakui bukanlah hal yang mudah. Berbagai kajian telah membuktikan bahwa untuk menarik kembali anak-anak yang sudah terlanjur keluar atau *Drop-Out* dari sekolah umumnya bukan hal yang mudah. Untuk itu, kebijakan dan langkah yang paling strategis untuk menangani isu anak-anak di luar sekolah, paling-tidak harus mencakup tiga strategi pokok. Pertama, adalah kebijakan yang sifatnya preventif, yakni bagaimana mencegah agar anak-anak tidak sampai putus sekolah di tengah jalan. Kedua, kebijakan mengurangi resiko atau kemungkinan anak yang sudah masuk sekolah berhenti atau keluar di tengah jalan karena proses pembelajaran yang tidak *joyfull learning* atau karena sebab-sebab struktural lain. Ketiga, kebijakan yang sifatnya kuratif, yakni mengajak anak yang sudah putus sekolah kembali ke sekolah atau paling-tidak memfasilitasi agar mereka tetap dapat mengakses program *life skills* sebagai bekal bagi mereka untuk menempuh masa depan.

Kebijakan mencegah agar anak-anak tidak terlanjur putus sekolah adalah melakukan upaya preventif sedini mungkin, khususnya sejak anak mulai hendak mengenal bangku sekolah dan setelah diketahui ada indikasi bahwa seorang siswa akan putus sekolah. Selain dibutuhkan komitmen pimpinan daerah agar senantiasa pro kepentingan anak, dan memastikan agar anak-anak tetap dapat bersekolah hingga jenjang 12 tahun –bukan sekadar 9 tahun–, upaya untuk mencegah siswa putus sekolah juga perlu didukung proses pembelajaran yang benar-benar *joyfull learning*.

Studi ini menemukan bahwa kecenderungan anak putus sekolah umumnya dapat dilacak jauh-jauh hari, yakni bermula dari sikap dan dukungan orang tua terhadap Program PAUD dan dukungan orang tua plus sekolah terhadap anak-anak yang ditengarai rawan putus sekolah. Seperti telah dipaparkan dalam bab-bab terdahulu bahwa awal-mula atau indikasi yang diperlihatkan siswa yang berpotensi putus sekolah adalah: (1) siswa yang bersangkutan pernah tidak naik kelas, (2) nilai ulangan dan dinilai rapor siswa yang bersangkutan kurang memenuhi standar, di mana biasanya makin banyak nilai yang di bawah standar berarti makin besar peluang siswa yang bersangkutan untuk putus sekolah, dan (3) siswa yang bersangkutan sering membolos.

Tabel 2
Program Untuk Mengeliminasi Anak di Luar Sekolah di Provinsi Jawa Timur

Isu Prioritas	Program	Tujuan
Di kalangan keluarga miskin anak umumnya memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber penghasilan penting keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin - Pengembangan alternatif sumber-sumber penghasilan keluarga - Pemberdayaan potensi lansia 	Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan mengurangi peran anak sebagai salah satu sumber penghasilan keluarga
Bagi anak-anak kewajiban melakukan pekerjaan domestic, bekerja di sector public serta sekolah adalah beban ganda yang terlampau berat untuk ditanggung dalam waktu yang bersamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi UU Perlindungan Anak dan Konvensi ILO 138 - Pembatasan jam kerja dan usia anak bekerja - Penyelenggaraan Program Paket A, B, dan C, serta pendirian BLK yang bisa diakses siswa yang putus sekolah - Kerjasama dengan Dinas pertanian, Disnaker, dan SKPD lain untuk program pengembangan BLK dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan <i>life skills</i>. 	Mengurangi beban dan jam kerja anak agar anak memiliki waktu yang cukup untuk belajar
Acara dan tayangan televisi adalah godaan terbesar yang dihadapi anak-anak di pedesaan, sehingga waktu mereka untuk belajar cenderung jauh lebih pendek daripada waktu untuk menonton televisi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan gerakan mematikan televisi dan membudayakan kebiasaan perilaku gemar membaca anak-anak 	Membatasi godaan tayangan Televisi bagi anak-anak
Siswa yang putus sekolah umumnya sebelumnya memperlihatkan indikasi rawan DO (pernah tidak naik kelas, prestasinya kurang, dan sering membolos)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan program sekolah ramah anak (<i>joyfull learning</i>) - Penanganan atau bimbingan khusus terhadap siswa rawan DO - Pelibatan kelompok sekunder di masyarakat dalam penanganan siswa rawan DO 	Memperbaiki prestasi belajar siswa rawan DO
Anak perempuan cenderung lebih potensial putus sekolah karena kebiasaan pernikahan dini dan kultur patriarkhis	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan dan pencegahan kasus pernikahan dini - Sosialisasi kesetaraan gender bagi masyarakat desa - Kampanye penundaan kehamilan dan pemilikan anak-anak yang sudah tertanjer menikah di usia dini 	Mencegah anak perempuan mengalami diskriminasi gender, khususnya di bidang pendidikan
Dalam kenyataan kualitas dan prestasi belajar riil anak-anak di pedesaan, terutama di sekolah pinggiran acapkali memprihatinkan dan hasil <i>katrolan</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah - Pengembangan pendidikan usia dini anak 	Meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah
Anak yang bekerja umumnya menanggung beban jam kerja yang panjang yang membatasi waktu luang mereka untuk bermain layaknya anak-anak	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan jam kerja dan usia anak bekerja 	Pengaturan jam dan usia anak bekerja secara proporsional
Suasana belajar di sekolah, seringkali tidak membuat anak <i>enjoy</i> dalam belajar, sehingga gairah untuk belajar secara sungguh-sungguh menjadi terganggu	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi sekolah dan ruang kelas yang rusak - Pengembangan pendekatan MBS, khususnya <i>joyfull learning</i> 	Membangun suasana belajar di sekolah yang menyenangkan bagi siswa atau peserta didik

Di dalam masyarakat seringkali masih ada krisis kepercayaan dan bahkan pandangan yang kontra-produktif terhadap arti penting sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan program <i>link and match</i> - Review dan perbaikan kurikulum pembelajaran di jenjang SMP dan SMA yang lebih mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pasar kerja 	Menjamin kesempatan kerja bagi lulusan sesuai jenjang pendidikan yang telah ditempuh
Orientasi masyarakat cenderung menganggap pendidikan di Pondok Pesantren lebih penting daripada pendidikan di sekolah formal	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pilot project</i> program pengembangan pendidikan umum di Pondok Pesantren - Pengembangan program <i>life skills</i> bagi santri/santriwati 	Mengembangkan kerjasama dengan Pondok Pesantren untuk program kelangsungan pendidikan anak
Dukungan dan kesadaran orang tua tentang arti penting PAUD umumnya masih kurang berkembang. Kesibukan orang tua yang harus mencari nafkah bagi keluarga seringkali menyebabkan waktu untuk mengurus pendidikan dini anak menjadi terbengkalai	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Play Group dan TK yang sekaligus berfungsi sebagai TPA (Tempat Penitipan Anak) di wilayah pedesaan - Pelatihan dan pengadaan SDM Bunda PAUD yang memenuhi standar kompetensi - Kerjasama dengan swasta melalui program CSR untuk mengembangkan TPA di daerah perkebunan dan daerah terpencil lain - Mengembangkan kelompok usaha bersama di sekitar TPA, Play Group dan TK yang bisa menyerap tenaga kerja perempuan (ibu) - Pengembangan peran PKBM dalam upaya penanganan PAUD 	Meningkatkan animo dan akses masyarakat desa untuk segera melibatkan anak-anak mereka dalam Program PAUD

Siswa yang dikenal bermasalah atau siswa rawan DO ini, bila sejak dini telah dicoba ditangani, maka peluang untuk mencegah mereka putus sekolah akan menjadi lebih besar. Dari pihak sekolah sendiri, seyogianya ada kesadaran bahwa siswa yang rawan DO bukan malah diperlakukan sebagai siswa yang bermasalah dan sering dihukum atau semata menjadi obyek pembinaan BP. Tetapi, justru siswa yang rawan DO ini harus memperoleh perhatian dan bimbingan khusus, termasuk memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok sekunder yang ada di masyarakat untuk ikut memfasilitasi perbaikan prestasi belajar mereka lewat bimbingan dan pembinaan yang sifatnya lebih empatif. Secara lebih rinci, program intervensi apa saja yang seyogianya dikembangkan dalam rangka mengeliminasi angka putus sekolah dan menangani siswa rawan DO di Propinsi Jawa Timur dapat disimak pada tabel VII.1.

Menangani persoalan anak putus sekolah semata hanya dengan mengandalkan program BOS/BOBDA, niscaya tidak akan pernah menyelesaikan masalah, karena akar masalah yang dihadapi keluarga miskin di pedesaan sesungguhnya bukan sekadar faktor ekonomi. Di berbagai wilayah pedesaan, ketika anak-anak putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sesungguhnya lebih disebabkan karena multi-faktor yang saling berkaitan, seperti fungsi anak sebagai salah satu sumber penghasilan yang penting bagi keluarga,

apresiasi orang tua yang kurang terhadap arti penting sekolah, suasana proses belajar-mengajar yang kurang *joyfull learning*, atau karena adanya faktor tradisi di mana orang tua di pedesaan umumnya masih terbiasa menikahkan anak-anak mereka dalam usia dini. Kecenderungan anak tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP ke atas, dan sudah menganggap cukup lulus SD saja, selain dipengaruhi faktor geografis lokasi sekolah yang sulit diakses, terutama bagi anak-anak yang tinggal di daerah pegunungan dan relatif terpencil, juga karena pandangan sebagian orang tua yang lebih mempercayai anaknya meneruskan pendidikan di Pondok Pesantren daripada di sekolah formal atau sekolah umum.

Untuk mencegah dan menangani kasus anak putus sekolah, oleh sebab itu ke depan beberapa program yang direkomendasikan untuk dikembangkan secara terpadu bukan hanya program perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah dan program pemberian beasiswa atau program BOS/BOPDA saja. Pada tingkat yang paling elementer, upaya untuk memaatikan anak-anak dapat mengakses pendidikan secara layak adalah dengan terlebih dahulu membangun konstruksi masyarakat tentang arti penting sekolah atau pendidikan pada umumnya. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap signifikansi pendidikan formal, bukan saja perlu didekonstruksi, tetapi juga perlu direkonstruksi kembali dengan didukung bukti-bukti yang nyata bahwa perbedaan latar belakang jenjang pendidikan anak memang paralel dengan tingkat kesejahteraan dan peluang mereka meraih masa depan yang lebih baik. Di samping itu, yang tak kalah penting adalah pelaksanaan program perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin secara keseluruhan, program pembatasan pernikahan usia dini, dan program penanganan siswa rawan putus sekolah sebelum mereka benar-benar keluar dari sekolah.

Di samping itu, yang terpenting upaya penanganan siswa putus sekolah tidaklah mungkin efektif jika dilakukan secara instant, karena mau tidak mau akar permasalahan siswa putus sekolah sesungguhnya muaranya adalah pada komitmen pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk sejak dini menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan usia dini (PAUD). Studi sebagaimana dilaporkan menemukan bahwa animo dan kesempatan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di jenjang PAUD acapkali terkendala faktor yang sifatnya struktural, sehingga untuk memecahkan persoalan ini ada baiknya jika pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta mau melakukan langkah pro-aktif. Selain membangun TPA, *Play Group* dan TK yang mudah diakses masyarakat setempat, yang tak kalah penting adalah membuka kesadaran masyarakat tentang arti penting pendidikan di usia emas anak (*golden age*).

8. Prasyarat yang Dibutuhkan

Setelah memahami akar permasalahan yang sebenarnya dan dengan belajar dari pengalaman serta kekurangan masa lalu, maka untuk arah ke depan semestinya dapat direncanakan dan disusun kebijakan serta program-program intervensi yang lebih terarah dan efektif bagi anak putus

sekolah, pekerja anak dan anak rawan DO. Beberapa hal yang dipandang strategis dan prioritas untuk dilaksanakan di tahun-tahun mendatang adalah:

8.1. Pengembangan Pendekatan *Community Support System*

Di tengah situasi krisis dan kelangkaan sumber dana yang dimiliki negara, berharap lembaga-lembaga resmi pemerintah mampu menangani dan menyelesaikan persoalan anak di luar sekolah, seperti anak putus sekolah, pekerja anak dan anak rawan DO sendirian adalah hal yang nyaris mustahil, dan bahkan mungkin utopis. Untuk menangani masalah ini di tingkat paling bawah – desa, komunitas atau bahkan keluarga –, tak pelak dibutuhkan dukungan dari lembaga-lembaga di tingkat lokal yang secara nyata memang memiliki potensi untuk melakukan hal ini. Lembaga-lembaga lokal seperti Pondok Pesantren, Forum Pengajian, Muslimat NU, Kelompok Dasa Wisma, Kelompok PKK, Forum Sekolah Minggu di kalangan umat Kristiani, LSM Lokal, dan lain-lain tak mustahil dapat dimanfaatkan dan didorong perkembangannya untuk secara khusus menaruh perhatian lebih pada masalah anak di luar sekolah, siswa rawan DO dan pekerja anak di sekitarnya. Cuma, masalahnya barangkali adalah pengetahuan mereka tentang hak-hak anak, bentuk program pendidikan alternatif yang benar bagi pekerja anak, dan semacamnya masih relatif kurang, sehingga di tahap awal tentu harus didukung dengan upaya pembimbingan, pelatihan dan hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain yang sudah terlebih dahulu berpengalaman menangani kedua masalah prioritas ini.

Sebagai sebuah masalah, kebiasaan orang tua memaksa anaknya bekerja di usia yang masih dini, sikap acuh tak acuh orang tua terhadap arti penting sekolah, dan lain-lain pada dasarnya adalah masalah yang seringkali ditempatkan sebagai persoalan intern keluarga dan masuk dalam wilayah privat yang sulit diintervensi oleh negara. Untuk perpanjangan tangan dan ujung tombak pelaksanaan program intervensi bagi pekerja anak di sektor berbahaya dan anak rawan DO, oleh sebab itu sudah sewajarnya jika dilibatkan lembaga-lembaga di tingkat lokal yang memiliki minat dan potensi untuk menangani masalah tersebut.

8.2. Intervensi Dini Mencegah Siswa Putus Sekolah

Untuk mencegah siswa tinggal kelas dan putus sekolah, sekurang-kurangnya dapat dilakukan dua hal. Pertama, pemasyarakatan lembaga pendidikan pra-sekolah, khususnya TK dan KB (Kelompok Bermain). Secara ilmiah, sudah banyak bukti memperlihatkan bahwa dibandingkan anak yang tidak melalui jenjang Taman kanak-kanak, anak didik yang sebelumnya masuk TK rata-rata memiliki kemampuan beradaptasi dan prestasi belajar yang lebih baik. Di Madagaskar, misalnya ditemukan bukti adanya hubungan yang kuat antara pendidikan pra-sekolah dan menurunnya kesia-siaan sekolah. Sebuah kajian di Mexico bahkan menemukan bukti yang lebih eksplisit, bahwa pendidikan pra-sekolah

menghasilkan peningkatan sebesar 19% prestasi siswa di mata pelajaran matematika di antara anak-anak dari keluarga miskin (UNESCO, 1998).

Kedua, penanganan siswa yang bermasalah, khususnya siswa yang memiliki prestasi belajar relatif buruk di sekolah, dan apalagi siswa yang terbukti pernah tinggal kelas. Banyak bukti memperlihatkan bahwa siswa yang tinggal kelas, lama-kelamaan mereka akan sering membolos, membentuk "jarak" yang makin jauh dengan guru dan sekolah, dan pada akhirnya kemudian putus sekolah alias DO. Untuk mencegah agar siswa tidak DO, karena itu sebelumnya mereka sudah harus sedini mungkin ditangani. Sebagian mungkin bisa berupa perhatian khusus dari pihak guru dan sekolah, tetapi di sisi lain juga bisa memanfaatkan dukungan dari lembaga-lembaga dan forum di tingkat lokal yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan belajar anak-anak rawan DO itu secara lebih personal dan khusus. Sekadar contoh: barangkali yang namanya Forum Pengajian anak yang biasa setiap hari diadakan di Mushola dapat dikembangkan menjadi Forum Pengajian Plus, karena setelah belajar agama, kemudian dapat disusul dengan kegiatan belajar pelajaran umum di bawah pengawasan guru-guru setempat, Rema Karang Taruna, atau Remaja Masjid yang telah lebih dahulu lulus di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

8.3. Otonomi dan Fleksibilitas Sekolah

Salah satu masalah yang dihadapi sekolah-sekolah di pedesaan adalah banyaknya kasus siswa membolos karena terpaksa harus bekerja. Kasus siswa membolos ini, di daerah-daerah tertentu biasanya terjadi bersamaan dengan irama musim dan masa panen komoditi yang dominan di wilayah itu. Pihak sekolah sendiri acapkali tidak dapat bersikap tegas menghadapi kasus siswa membolos ini, karena tidak mustahil terjadi si anak didik itu justru lebih memilih keluar sekolah jika tidak diperkenankan membolos untuk bekerja. Di daerah perkebunan tembakau, misalnya sering terjadi anak didik membolos sekolah tidak hanya sehari-dua hari atau seminggu-dua minggu, melainkan bisa saja sebulan atau dua bulan penuh karena harus membantu orang tuanya memetik tembakau dan mengolahnya hingga sampai layak jual.

Sebagai langkah kompromi – dengan pertimbangan utama prinsip *the best interest of the child* – ada baiknya jika Depdiknas atau Dinnas P&K untuk kasus-kasus tertentu memberikan otoritas kepada Kepala Sekolah agar secara fleksibel dapat mengatur jadwal belajar yang disesuaikan dengan irama musim dan kepadatan kegiatan bekerja anak-anak miskin di pedesaan. Cara ini, dari segi tata tertib dan disiplin bersekolah barangkali tidak terlalu tepat. Namun, bagaimana pun harus diakui bahwa hal ini merupakan langkah yang paling kompromistis untuk menyiasati ketertinggalan siswa-siswa yang sehari-harinya terpaksa menanggung beban ganda: bekerja sembari sekolah, atau sekolah sembari bekerja (*).

BAB 1

Problema Anak di Luar Sekolah di Jawa Timur: Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Keinginan dan janji pemerintah untuk segera membebaskan anak-anak usia sekolah (7-15 tahun) dari ancaman buta huruf dan kemungkinan putus sekolah di tengah jalan tampaknya hingga kini belum juga terwujud. Kendati alokasi dana pembangunan bidang pendidikan terus ditambah, dan secara khusus pemerintah juga telah menggulirkan program BOS/BOPDA untuk membantu membiayai kebutuhan sekolah dan menjamin kelangsungan pendidikan siswa, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Tetapi, karena faktor-faktor yang sifatnya struktural dan kultural, maka angka siswa putus sekolah dan rawan putus sekolah diperkirakan akan tetap tinggi, sehingga jumlah anak yang berada di luar sekolah pun sepertinya tak beringsut membaik.

Di berbagai daerah, tak terkecuali di Provinsi Jawa Timur, anak-anak yang ada di luar sekolah ditengarai terus bermunculan didorong karena alasan yang berbeda-beda. Secara statistik dilaporkan sekitar 1,8 juta anak SD berusia 7-12 tahun, dan 4,8 juta anak usia 13-15 tahun tidak sekolah. Kalau dicoba digambarkan dalam konteks waktu, setiap menit dilaporkan 4 orang anak Indonesia ternyata harus putus sekolah di tengah jalan karena berbagai sebab (<http://edukasi.kompas.com>, 17 Desember 2009). Prediksi UNESCO, di Indonesia, Indeks Pendidikan untuk semua orang (*Education for all, EFA*) di tahun 2015 diperkirakan tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan, dan bahkan bukan tidak mungkin akan mengalami penurunan (<http://edukasi.kompas.com>, 2 Maret 2011).

Sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pertengahan tahun 1997, sebetulnya waktu itu telah diproyeksikan bahwa sekitar 35 juta anak usia 7-15 tahun sudah bisa bersekolah di jenjang SD dan SLTP. Tetapi, akibat krisis yang terjadi waktu itu, yang kemudian melahirkan inflasi yang luar biasa tajam, gelombang PHK, kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan tekanan kemiskinan yang makin meluas pasca kenaikan harga BBM, acap terjadi keluarga-keluarga miskin yang ada terpaksa mengorbankan kelangsungan pendidikan anak-anaknya dan lebih memilih mengeluarkan atau tidak meneruskan sekolah anaknya, baik untuk sementara waktu maupun seterusnya.

Secara garis besar, beberapa hal yang terjadi akibat meluasnya tekanan kemiskinan dan keterbatasan kondisi keuangan pemerintah terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak adalah. Pertama, akses atau



kesempatan anak-anak, terutama dari keluarga miskin untuk memperoleh pelayanan publik di bidang pendidikan jelas akan makin berkurang, dan bahkan tidak mustahil sama sekali pupus karena mereka terpaksa masuk dalam situasi yang teramat sulit dan dilematis antara meneruskan sekolah atautkah membantu orang tua untuk menutupi kebutuhan hidup yang makin mencekik akibat situasi krisis. Tidak jarang terjadi, karena kesibukan dan sikap apatisme yang berlebihan, anak-anak dari keluarga miskin sejak awal sudah diputuskan untuk tidak perlu masuk sekolah, karena bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana dapat bertahan hidup dalam kondisi perekonomian yang makin tidak menguntungkan dirinya.

Kedua, bersamaan dengan terjadinya gelombang anak putus sekolah dan tingginya angka siswa yang tidak meneruskan ke jenjang SLTP, tidak mustahil akan menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin potensial masuk dalam lingkungan sosial yang kurang kondusif, yang berpotensi mendorong dan mempengaruhi anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas yang menyimpang. Di sisi lain, anak-anak yang putus sekolah di tengah jalan, dalam banyak kasus biasanya juga akan lebih berpeluang terpuruk dalam kondisi hubungan kerja yang merugikan, eksploitatif, dan bahkan tidak menutup kemungkinan mereka terpaksa terperangkap pada kegiatan produktif atau sektor-sektor yang sesungguhnya sangat tidak dapat ditoleransi (*most intolerable forms of child labour*).

Ketiga, akibat tekanan kemiskinan dan sikap a-priori terhadap arti penting sekolah bukan tidak mungkin menyebabkan batas toleransi terhadap kasus-kasus eksploitasi dan pelibatan anak dalam kegiatan produktif menjadi makin longgar, sebab situasi dan kondisi yang ada dinilai sebagai faktor pendorong yang tak terelakkan. Di kalangan masyarakat miskin, sudah lazim terjadi, anak-anak dalam usia dini terpaksa bekerja di sektor publik yang eksploitatif, tanpa mempertimbangkan arti penting keselamatan dan perlunya proses tumbuh-kembang anak yang wajar.

Boks 1:

Perbandingan Putus Sekolah di Negara Maju, Sedang Berkembang dan Terbelakang

Putus sekolah di jenjang SD tidak terdapat di negara-negara maju karena negara-negara ini memberlakukan hukum yang mewajibkan pendidikan. Namun demikian, di kawasan-kawasan negara sedang berkembang, putus sekolah di awal-awal sekolah merupakan masalah besar. Dari sekitar 96 juta murid yang masuk sekolah untuk pertama kalinya tahun 1995, seperempat atau sekitar 24 juta cenderung meninggalkan bangku sekolah sebelum mencapai Kelas V. Di negara sedang berkembang, hanya 3 dari 4 murid yang bisa mencapai Kelas V. Keadaan di negara terbelakang lebih parah lagi, dengan hanya sekitar 56% murid yang masih bertahan di sekolah setelah Kelas IV.

Sumber: UNESCO, *Wasted Opportunities: When Schools Fail, Repetition and Drop-Out in Primary Schools. Education for All, Status and Trend 1998.*



Terlepas, seberapa sebetulnya jumlah anak yang ada di luar sekolah saat ini dan terlepas pula dari persoalan akurasi prediksi yang dilontarkan, kecenderungan terjadinya gelombang anak-anak putus sekolah dan anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sudah tentu sangat memprihatinkan. Studi yang dilakukan LPPM Universitas Airlangga (2005) di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur menemukan bahwa di kalangan masyarakat miskin, kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak relatif masih belum berkembang. Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin seorang anak yang setiap hari bergaul dan bermain dengan teman-teman mereka yang tidak lagi bersekolah atau hanya lulusan SD dapat bertahan untuk terus bersekolah melawan arus umum lingkungan sosial mereka? Di kalangan anak-anak seusia 7-15 tahun, secara teoritis pengaruh *peer-group* adalah sangat kuat, sehingga bisa dipahami jika mereka kemudian beramai-ramai memutuskan untuk tidak meneruskan sekolah: putus sekolah hanya sampai di jenjang SD saja atau bahkan berhenti di tengah jalan.

Meski tidak dialami dan dirasakan oleh seluruh anak-anak di daerah yang diteliti LPPM Universitas Airlangga, tetapi ditemukan bahwa anak-anak di daerah yang disurvei acapkali memang berhadapan dengan lingkungan sosial yang sifatnya kontraproduktif. Menurut cerita anak-anak miskin yang diwawancarai, anak-anak yang bertahan tetap bersekolah atau “memaksa” melanjutkan bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi (SLTP), mereka umumnya kurang memperoleh penghargaan, dan bahkan seringkali menjadi agak kurang leluasa bergaul dengan teman-teman mereka yang sudah putus sekolah. Anak-anak yang bersekolah, mereka biasanya kurang memiliki waktu untuk bermain bersama teman-teman mereka, sehingga hubungannya pun tidaklah seakrab teman-teman lain yang sama-sama sudah putus sekolah. Sementara itu, untuk anak-anak yang sudah putus sekolah, waktu dan kesempatan mereka untuk bermain relatif lebih longgar. Kendati sama-sama dibebani pekerjaan dan kewajiban untuk mencari nafkah. Tetapi, di luar jam kerja mereka lebih leluasa untuk bermain sepuas-puasnya atau sekadar duduk-duduk bergerombol dengan sesama temannya. Tidak adanya kewajiban untuk mengerjakan PR dan belajar membuat anak-anak yang putus sekolah ini lebih bebas.

Di samping faktor sosial – lingkungan sosial yang tidak kondusif – kecenderungan anak-anak untuk puas hanya sampai lulus SD juga dipengaruhi faktor ekonomi. Di Pacitan, misalnya, studi yang dilakukan Mustain dkk. (1998) menemukan bahwa seorang anak yang sudah lulus SD dan kemudian berminat untuk melanjutkan ke jenjang SLTP, mereka biasanya akan berpikir dua-tiga kali sebelum benar-benar memutuskan mendaftarkan diri. Dari hasil wawancara yang dilakukan Mustain dkk., terungkap bahwa jarak desa dengan gedung SMP adalah sekitar 7 kilometer, dan itupun harus dilalui dengan berjalan kaki. Memang dari jalan aspal di bawah kaki desa ada kendaraan umum yang lewat dan bisa saja anak itu membayar 100-200 rupiah untuk sampai ke sekolah. Namun,

di tengah kondisi ekonomi yang sulit rasa-rasanya orang tua anak itu akan keberatan bila setiap hari harus menyiapkan uang 500 rupiah untuk sekadar ongkos transport.

Di Provinsi Jawa Timur, sejumlah daerah yang disinyalir merupakan kantong anak rawan dan memiliki angka anak-anak di luar sekolah yang relatif tinggi adalah daerah yang masuk dalam wilayah “tapal kuda”, mulai dari Pulau Madura, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso hingga Situbondo. Berbagai daerah ini, kondisi IPM masyarakatnya rata-rata rendah, dan bahkan terendah bila dibandingkan kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur, sehingga bisa diduga di berbagai kabupaten/kota tersebut jumlah anak-anak yang ada di luar sekolah pun relatif tinggi. Tekanan kemiskinan, kondisi alam yang kurang kondusif, dan ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat untuk menikahkan anak dalam usia dini, semua faktor ini pada akhirnya menyebabkan kemungkinan anak meninggalkan sekolah, putus sekolah di tengah jalan menjadi lebih besar.

Studi yang tengah dilaporkan ini bermaksud memetakan situasi problematik yang dihadapi anak-anak di luar sekolah, mulai dari anak-anak yang belum dan mungkin tidak sekolah, anak rawan putus sekolah, hingga siswa yang putus sekolah di tengah jalan karena mereka dalam usia belia terpaksa bekerja, sehingga mereka harus menanggung beban ganda yang berat di luar kapasitasnya sebagai anak-anak. Studi ini mendesak untuk dilakukan karena permasalahan anak-anak di luar sekolah ini sesungguhnya tidak bisa dianggap telah teratasi hanya melalui Program BOS/BOPDA, selain juga karena persoalan ini bukan tidak mungkin menjadi semacam gunung es yang suatu saat menjadi bom waktu yang mengejutkan jika tidak diantisipasi secara preventif sejak awal.

2. Permasalahan

Secara rinci, beberapa permasalahan yang dikaji dalam studi ini adalah:

1. Bagaimanakah gambaran tentang karakteristik sosial dan latar belakang sosial-ekonomi keluarga anak-anak di luar sekolah di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak-anak di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo rawan putus sekolah, belum atau terpaksa tidak sekolah di usia sekolah, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan siswa tidak melanjutkan sekolah?
3. Sejauhmana peran sekolah, guru dan orang tua serta warga masyarakat di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo dalam upaya pencegahan agar anak-anak tidak berada di luar sekolah dan putus sekolah di tengah jalan?

4. Sejauhmana efektivitas kebijakan dan program Pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam upaya penanganan anak di luar sekolah?

3. Tujuan

Secara rinci, tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk:

1. Mengidentifikasi profil sosial-ekonomi dan memetakan situasi problematik yang tengah dihadapi anak-anak yang ada di luar sekolah dan siswa rawan putus sekolah di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo.
2. Mengidentifikasi masalah prioritas dan merumuskan strategi serta program intervensi yang berbasis permasalahan yang ditemukan di lapangan dalam rangka penanganan permasalahan anak di luar sekolah di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo.
3. Memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo dalam rangka merumuskan sejumlah rekomendasi untuk mengeliminasi kecenderungan terjadinya anak di luar sekolah, siswa putus sekolah dan mengurangi jumlah siswa rawan DO di Jawa Timur.

4. Hasil yang Diharapkan

Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. Teridentifikasinya isu-isu prioritas di balik masalah anak-anak di luar sekolah di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo.
2. Terumuskannya rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Pemerintah Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo dalam rangka mengeliminasi kecenderungan terjadinya anak di luar sekolah, siswa putus sekolah dan mengurangi jumlah siswa rawan DO di Jawa Timur.

5. Metode Penelitian

Studi sebagaimana dilaporkan pada dasarnya merupakan gabungan antara kegiatan pengamatan lapangan, *review* hasil studi dan analisis data sekunder tentang permasalahan anak di luar sekolah, siswa putus sekolah dan siswa rawan putus sekolah di wilayah Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo.

Untuk kegiatan penelitian lapangan, studi ini secara *purposive* telah menetapkan 3 daerah sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan daerah tersebut ditengarai merupakan daerah kantong anak rawan, dan rata-rata memiliki kecenderungan siswa tidak naik kelas dan siswa putus sekolah yang relatif tinggi. Ketiga daerah itu adalah Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso, dan Situbondo.



Dalam penelitian ini, beberapa kelompok anak rawan yang dikaji dan menjadi unit analisis, secara garis besar meliputi: (1) kategori anak usia 3-6 tahun yang tidak atau belum sekolah, (2) kategori siswa yang putus sekolah di jenjang pendidikan Dasar 9 Tahun, dan (3) kategori siswa yang belum putus sekolah, tetapi rawan DO, baik di jenjang SD maupun SMP. Yang dimaksud siswa rawan DO, adalah siswa yang sangat potensial untuk putus sekolah, baik karena alasan pernah tidak naik kelas, memiliki prestasi akademik yang pas-pasan, atau karena tekanan kemiskinan yang dialami keluarganya.

Pertama, untuk mengidentifikasi dan memetakan situasi problematik yang menyebabkan anak usia 3-6 tahun tidak atau belum sekolah, data yang dibutuhkan telah digali melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan, antara lain tokoh masyarakat, guru, Ketua RT/RW, dan keluarga miskin yang ada di masing-masing daerah. Di masing-masing daerah, ditetapkan jumlah informan untuk permasalahan ini sebanyak 15 informan, sehingga secara keseluruhan telah diwawancarai 45 informan.

Kedua, untuk menggali problema siswa yang putus sekolah di jenjang pendidikan dasar 9 tahun, SD maupun SMP dalam studi ini telah dilakukan wawancara berstruktur kepada 150 responden. Wawancara dilakukan langsung kepada anak-anak yang telah putus sekolah, di mana untuk masing-masing daerah diwawancarai 50 anak putus sekolah.

Tabel I.1
Lokasi dan Jumlah Responden Penelitian

Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Jumlah Responden Anak Putus Sekolah	Jumlah Responden Siswa Rawan DO
Kepel	Bugul kidul	Kota Pasuruan	25	25
Ngemplak	Purworejo		25	25
Arak-arak	Wringin	Kabupaten Bonowoso	25	25
Sumber tengah	Binakal		25	25
Sekar putih	Mangaran	Kabupaten Situbondo	25	25
Gelung	Panarukan		25	25
Jumlah			150	150

Ketiga, untuk memahami problema yang dihadapi siswa yang belum putus sekolah, tetapi rawan DO, baik di jenjang SD maupun SMP, dalam studi ini juga telah dilakukan kegiatan survei di masing-masing daerah. Jumlah responden kategori ini juga ditetapkan sebanyak 150 responden. Kriteria responden adalah: (1) siswa SD Kelas V dan VI yang pernah tidak naik kelas, yang nilai akademiknya tergolong lima terendah di kelasnya, dan (2) siswa SMP yang pernah tidak naik kelas, yang nilai akademiknya tergolong lima terendah di kelasnya.

Proses pengumpulan data di lapangan, dipandu oleh perangkat kuesioner dan *interview guide* yang telah dipersiapkan sebelumnya.



Kuesioner dibutuhkan ketika melakukan survey dalam rangka mengidentifikasi profil anak-anak di luar sekolah dan keluarganya. Sedangkan *interview guide* dibutuhkan sebagai panduan ketika melakukan wawancara mendalam kepada sejumlah informan, baik dari kalangan masyarakat, institusi pendidikan maupun aparatur pemerintahan.

Dengan tujuan agar dapat diperoleh data secara rinci dan komprehensif, dalam studi ini selain studi lapangan, juga dilakukan analisis terhadap data sekunder, monografi dan data statistik (BPS) – sejauh hal itu mendukung analisis persoalan terhadap kehidupan anak di luar sekolah.

Dalam penelitian ini, telah dilakukan observasi untuk melihat kondisi sekolah dan situasi kehidupan sehari-hari serta aktivitas -hari anak-anak di luar sekolah. Observasi ini perlu dilakukan untuk mengetahui secara lebih mendalam dan nyata kehidupan anak-anak di luar sekolah di daerah penelitian.

Dalam penelitian ini, seluruh data yang dikumpulkan, telah dianalisis secara kualitatif dengan mengedepankan uraian-uraian *naratif* sehingga hasil penelitian ini bisa menggambarkan fenomena yang diteliti secara lebih lengkap dan komprehensif. Sengaja dalam penelitian ini tidak dilakukan uji statistik, karena tujuan awal penelitian memang lebih pada upaya menggali kedalaman data dan memahami secara empatif kondisi anak di luar sekolah. Kutipan-kutipan wawancara, sepanjang relevan dan memperjelas permasalahan yang dikemukakan telah ditampilkan dalam bab temuan dan analisis data.

Di akhir laporan, selain dikemukakan kembali temuan-temuan pokok hasil kajian, juga ditampilkan sejumlah program intervensi yang benar-benar kontekstual bagi upaya penanganan anak di luar sekolah di Provinsi Jawa Timur. Rekomendasi yang disusun adalah rekomendasi yang sifatnya preventif dan rekomendasi berupa langkah-langkah kuratif yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan hak anak (*).

BAB 2

Anak di Luar Sekolah dan Kelangsungan Pendidikannya: Kerangka Analisis

Persoalan anak di luar sekolah, kelangsungan pendidikan anak dan siswa rawan DO pada dasarnya merupakan salah satu permasalahan sosial yang belum pernah tuntas ditanggulangi hingga kini. Persoalan anak di luar sekolah, siswa putus sekolah dan siswa rawan DO ini menjadi makin kompleks sejak krisis ekonomi melanda sejumlah negara Asia, terutama Indonesia. Lebih dari persoalan ekonomi, faktor penyebab terjadinya anak di luar sekolah, anak putus sekolah dan siswa tidak naik kelas adalah gabungan dari berbagai pengaruh faktor ekonomi, sosial, politik dan kultural.

Lebih dari sekadar keterbatasan penghasilan dan kondisi ekonomi keluarga, faktor penyebab kurangnya animo masyarakat untuk segera menyekolahkan anak-anaknya, atau faktor penyebab anak terpaksa putus sekolah di tengah jalan tak jarang adalah faktor budaya, pengaruh *peer-group* dan faktor lain-lain yang sifatnya struktural.

1. Kelangsungan Pendidikan Anak

Dalam Konvensi Hak Anak – yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia – sebetulnya telah disebutkan dan diakui bahwa anak-anak pada hakekatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka seyogianya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini. Namun demikian, akibat tekanan kemiskinan, kurangnya animo orang tua terhadap arti penting pendidikan, dan sejumlah faktor lain, maka secara sukarela maupun terpaksa anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting.

Menurut Stephen J. Woodhouse – dari UNICEF – isu sentral pekerja anak saat ini bukan terletak pada pekerjaannya, tetapi pada pengaruh negatif akibat terlalu dini bekerja, termasuk kurangnya kesempatan anak-anak itu untuk memperoleh pendidikan (Konvensi Edisi 2 September 1997: 3). Secara empirik, banyak bukti menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi – baik di sektor formal maupun informal – yang terlalu dini cenderung rawan eksploitasi, terkadang berbahaya, dan bahkan tidak mustahil dapat mengganggu perkembangan fisik, psikologis dan sosial anak (Gootea & Kanbur, 1994).

Di berbagai media massa sering dilaporkan bahwa anak-anak acapkali bekerja pada bidang-bidang yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan sosial psikologis mereka, karena tiga faktor utama: eksploitasi yang lahir dari kemiskinan, kurangnya pendidikan yang



relevan, serta tradisi dan pola sosial yang menempatkan anak pada posisi yang rentan (Kompas, 28 Oktober 1997). Di samping itu, dari segi pendidikan, anak-anak yang bekerja cenderung mudah putus sekolah. Bagi anak-anak sekolah dan bekerja adalah beban ganda yang acapkali dinilai terlalu berat, sehingga setelah ditambah tekanan ekonomi dan faktor-faktor lain yang sifatnya struktural, tak pelak mereka terpaksa memilih putus sekolah di tengah jalan.

Suatu survei yang dilaksanakan oleh BPS dengan ILO/IPEC di Kabupaten Bandung dan Kotamadya Bandung menunjukkan bahwa hanya 22,3% dari anak-anak yang secara ekonomi aktif yang dapat bersekolah sekaligus bekerja. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 75% anak-anak yang secara ekonomi aktif sudah tidak bersekolah lagi (BPS & ILO, 1993: 52). Studi yang dilakukan Suyanto dkk. (1997) di Propinsi Jawa Timur – tepatnya di Kabupaten Pacitan, Sampang, Pamekasan dan Trenggalek – menemukan bahwa anak-anak cenderung putus sekolah secara dini karena mereka berfungsi sebagai salah satu penyangga ekonomi keluarga.

2. Bekerja dan Sekolah

Secara umum pengertian pekerja atau buruh anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Pekerja anak bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangganya secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan kerja yang diterapkan pada pekerja anak ada bermacam-macam bentuk. Sebagai buruh, anak-anak menerima imbalan atau upah untuk pekerjaannya. Untuk pekerja anak yang magang mereka ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar. Sedangkan sebagai tenaga kerja keluarga umumnya anak-anak tidak dibayar (Tjandraningsih, 1995).

Di lingkungan masyarakat desa sudah menjadi kebiasaan bahwa anak pada dasarnya memiliki fungsi ekonomi. Di daerah pertanian, misalnya, anak-anak sejak dini sudah dilatih bekerja di sawah membantu orang tua atau bekerja sendiri di sektor lain yang menghasilkan uang. Studi yang dilakukan White (1973: 51) di sebuah desa di Jawa Tengah menemukan umur rata-rata anak-anak mulai bekerja di sektor pertanian adalah 9,7 tahun. Sementara itu, studi yang dilakukan Manning, Effendi dan Tukiran (1990: 31) di sebuah kampung miskin di Yogyakarta menemukan bahwa sekitar 83% penduduk mulai bekerja pada saat berumur 10-15 tahun.

Menurut Johannes Muller (1980), kemiskinan dan ketimpangan struktur institusional adalah variabel utama yang menyebabkan kesempatan masyarakat – khususnya anak-anak – untuk memperoleh pendidikan menjadi terhambat. Sejumlah studi lain juga menyimpulkan bahwa kemiskinan merupakan faktor pendorong yang paling mendasar (White, 1973, Irwanto dkk., 1995, Daliyo dkk., 1996, Suyanto dkk., 1997). Studi yang dilakukan White (1973) misalnya memberikan bukti nyata. Di lingkungan rumah tangga desa di Jawa, anak-anak dari keluarga miskin

terpaksa ikut bekerja dan mencari nafkah –entah sebagai pembantu di rumahnya sendiri atau pekerja dalam usaha lain. Biasanya, jika tenaga kerja wanita –istri– dipandang belum dapat memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi, maka anak-anak yang belum dewasa pun tak segan-segan diikutsertakan dalam menopang kegiatan ekonomi rumah tangga. Di sini, anak-anak tersebut tidak terbatas hanya bekerja membantu orang tua saja, melainkan juga bekerja di sektor publik sebagai buruh upahan (Mulandar (ed.), 1996).

Studi yang dilakukan Kuntoro dkk. (1996) di Provinsi Jawa Timur menemukan faktor utama yang menyebabkan anak-anak terpaksa tidak melanjutkan sekolah adalah karena orang tua mereka kesulitan untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Kesimpulan Kuntoro ini sama dengan hasil studi BPS 1994 “Indikator Kesejahteraan Anak”, di kalangan penduduk berumur 5-29 yang putus sekolah, alasan yang paling dominan adalah tidak mempunyai biaya (48,8%). Jadi, walaupun pemerintah telah berusaha meringankan uang sekolah bahkan menghapus uang SPP untuk sekolah dasar dan berusaha menekan uang sekolah untuk tingkat lanjut, tetapi karena tidak didukung oleh kemampuan ekonomi yang merata di masyarakat, maka di kelompok masyarakat miskin kesempatan belajar anak menjadi terganggu.

Sementara itu, menurut Maria Fransiska Subagyo (1986), kemelaratan diakui merupakan salah satu penyebab timbulnya kasus pelajar putus sekolah. Namun demikian, di luar itu faktor yang harus diperhatikan adalah cara keluarga mendidik anak, hubungan orang tua dengan anak, dan sikap atau aspirasi orang tua terhadap pendidikan. Di samping itu, tingkat pendidikan orang tua si anak itu sendiri juga tidak dapat dilupakan (Conger, 1978; dan Fahni-dal, 1990). Orang tua yang tidak sekolah, biasanya akan mengalami kesulitan membantu anaknya belajar, tidak mampu memecahkan persoalan sekolah yang dihadapi anak, dan cenderung memberikan hukuman pada anaknya untuk berprestasi di luar kemampuan yang ada. Jadi, meskipun di sekolah telah disediakan berbagai kegiatan dan fasilitas pendidikan, tidaklah akan mencapai hasil yang memuaskan tanpa ditunjang oleh peran aktif keluarga –khususnya orang tua si anak itu sendiri (Hadari, 1985). Studi yang dilakukan Irwanto dkk. (1995) menemukan bahwa pendidikan ibu mempunyai peran penting dalam mempertahankan anak di sekolah. Anak dari ibu yang berpendidikan lebih rendah cenderung putus sekolah dibandingkan anak dari ibu yang berpendidikan lebih tinggi.

3. Akar Masalah

Anak di luar sekolah, buruh anak, siswa yang tinggal kelas, dan terlebih anak yang sudah terlanjur putus sekolah adalah bagian dari kelompok anak-anak rawan yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Kegamangan dan kekeliruan kita di masa lalu adalah menganggap masalah anak-anak rawan ini akan dapat terselesaikan dengan sendirinya setelah persoalan kemiskinan dan situasi krisis



ekonomi dapat dieliminasi dan stabilitas politik berhasil diciptakan oleh otoritas negara. Pengalaman di masa lalu – diakui atau tidak – telah mengajarkan kepada kita bahwa masalah anak rawan adalah sebuah isu spesifik yang perlu ditangani secara khusus, berkesinambungan dan membutuhkan kesabaran yang benar-benar ekstra, karena ada banyak faktor dan jenjang masalah yang mesti diurai satu per satu sebelum kita dapat memahami akar masalah yang sebenarnya dari masalah krusial yang satu ini.

Dari hasil FDG, survei dan wawancara mendalam yang dilakukan Bagong Suyanto di Jawa Timur (1999-2002) diketahui bahwa di kalangan keluarga miskin, anak umumnya memiliki nilai guna ekonomis dan fungsi substitusi yang sangat strategis. Selama ada di rumah, anak bukan saja dituntut untuk membantu orang tua menyelesaikan tugas-tugas domestik, melainkan juga disosialisasi untuk selalu menyadari bahwa bekerja dan membantu orang tua mencari nafkah adalah salah satu perwujudan konsep “anak yang berbakti” yang tak bisa ditawar-tawar. Acap terjadi, di mata orang tua, kegiatan belajar dan bersekolah dianggap sebagai hal yang tak terlalu penting dibandingkan misalnya dengan kewajiban untuk membantu orang tua bekerja di ladang, di laut, di tambak atau bekerja di tempat lain – asalkan menghasilkan uang dan menjadi bagian dari proses anak belajar mandiri. Bahkan, tak jarang terjadi pihak orang tua bersikap otoriter dan sepertinya tidak mau peduli terhadap urusan pendidikan anaknya: menyempit begitu saja anaknya di sekolah dan mengajak pulang untuk bekerja – meski mungkin si anak itu di sekolah sedang mengikuti kegiatan UNAS. Tak jarang pula terjadi, belum lulus SD, anak-anak perempuan yang masih sedang senang-senanginya bermain dan berkumpul dengan teman-teman sebayanya di sekolah, dipaksa DO oleh orang tua untuk kemudian dinikahkan. Kawin di bawah umur adalah salah satu kebiasaan yang kontra-produktif bagi kelangsungan pendidikan anak, namun ironisnya hal ini diyakini sebagian besar masyarakat desa sebagai langkah investasi bagi masa depan anak-anaknya, khususnya anak perempuan.

Siapa yang mesti di salahkan jika terjadi anak terpaksa tinggal kelas atau putus sekolah karena tak kuat menanggung beban ganda yang berat: sekolah sembari bekerja? Bila tujuannya hanya sekadar untuk mencari kambing hitam, barangkali dengan cepat kita dapat menuding bahwa situasi krisis ekonomilah yang menyebabkan semua ini terjadi: masa depan anak menjadi makin buram dan bangsa Indonesia terancam kehilangan satu generasi. Namun, perlu disadari bahwa sikap mengalihkan tanggungjawab dan kesalahan semata hanya pada pihak lain sesungguhnya sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah. Untuk menangani persoalan pekerja anak hingga tuntas dan menodongkrak gairah anak dan orang tua untuk menyekolahkan anaknya, tak pelak yang dibutuhkan adalah. Pertama, kesediaan untuk melakukan investigasi dan memahami akar masalah yang sebenarnya di balik kehidupan anak-anak rawan yang ada di sekitar kita. Kedua, merumuskan strategi dan

menyusun program intervensi yang benar-benar efektif dan kontekstual – sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak-anak rawan itu sendiri sebagai subyek yang hendak ditangani.

Dari berbagai hasil studi yang telah dilakukan diketahui bahwa masalah anak di luar sekolah, dan kelangsungan pendidikan anak rawan DO sesungguhnya adalah masalah yang benar-benar sangat rumit, yang tak mungkin dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan yang sifatnya karitatif dan *top-down*. Pendekatan karitatif berupa pemberian bea-siswa, bantuan sembako, dan sejenisnya walau fungsional, tetapi dalam jangka panjang dikhawatirkan dapat menimbulkan ketergantungan baru yang menghilangkan mekanisme *self-help* masyarakat. Sedangkan, pendekatan *top-down* yang sifatnya seragam dan massal, selain tidak kontekstual, sering terjadi tidak mampu merangsang tumbuhnya apresiasi dan respons masyarakat secara memadai, sehingga dikhawatirkan rawan bias dan penyimpangan akibat tidak adanya kontrol di tingkat lokal.

4. Menakar Ulang

Apa pun bentuk, jalur dan jenis pendidikan yang ditawarkan kepada anak-anak agar mereka *enjoy* dan tidak putus sekolah di tengah jalan, kuncinya utamanya adalah pendidikan harus benar-benar menempatkan peserta didik sebagai subyek, mengajarkan hal-hal inovatif yang bisa dijadikan bekal untuk menyiasati tekanan kehidupan yang terkadang tidak ramah, melakukan proses pencerahan, membangun mental subversif, dan menumbuhkan kepekaan.

Pada batas-batas tertentu, harus diakui pendidikan yang selama ini dikembangkan sekolah berlangsung telah mengajarkan hal yang berguna bagi peserta didik. Tetapi, ketika pendidikan di masyarakat pelan-pelan berubah menjadi industri yang berskala massal, bersifat komersial, dan bahkan menjadi komoditi, maka yang terjadi kemudian paling-tidak tiga hal.

Pertama, pendidikan akan mengalami proses pereduksian makna, dan bahkan terdegradasi hanya menjadi kegiatan menghafal dan ketrampilan mengerjakan soal-soal ujian. Kedua, pendidikan akan terjerumus ke dalam proses komersialisasi di mana pendidikan telah berubah menjadi komoditi yang diperjual-belikan atau diperdagangkan dan dikelola seperti layaknya dunia industri yang cenderung hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Ketiga, pendidikan hanya akan melahirkan proses superiorisasi sekolah yang makin kebablasan. Yang dimaksud dengan superiorisasi adalah proses di mana sekolah menjadi makin digdaya, angkuh, berjarak, dan menekan orang tua siswa, baik dengan cara yang halus maupun terang-terangan.

Di abad milenium seperti saat ini, jujur harus diakui bahwa wajah pendidikan yang seharusnya tampil populis dan humanis, ternyata sudah semakin langka, dan bahkan setiap tahun ajaran baru tiba tidak sedikit orang tua peserta didik yang resah, terpaksa harus “mengemis” ke sana ke mari untuk mencari sekolah bagi anak-anaknya, dan mereka pun jauh-

jauh dari harus menabung untuk membayar uang pangkal, uang gedung, dan biaya pendidikan lain yang makin mahal. Tidak beda dengan dunia industri yang serba impersonal dan tak segan saling bersaing berebut pangsa pasar, dalam dunia pendidikan pun kini tidak lagi ada rasa malu ketika sekolah satu dengan yang lain saling berlomba menawarkan kelebihan mereka masing-masing – asalkan konsumen bersedia membayar dengan uang ratusan ribu, jutaan atau bahkan puluhan juta rupiah. Di jenjang Perguruan Tinggi, untuk fakultas-fakultas tertentu yang favorit biaya pendidikan yang mesti ditanggung publik bahkan melonjak hingga ratusan juta.

Sebetulnya, sepanjang ada jaminan bahwa setiap lulusan sekolah (di jenjang tertentu) bakal bisa hidup lebih baik dan memiliki kemampuan untuk menyisati tekanan hidup, barangkali masih ada sedikit pelipur lara atau minimal ada kompensasi atas biaya yang sudah dikeluarkan para orang tua selama anaknya sekolah. Tetapi, apa lacur, ketika pendidikan tumbuh makin mahal dan mengalienasikan masyarakat, di saat yang sama ternyata tidak ada jaminan bahwa setiap lulusan sekolah tertentu, maka taraf kehidupannya akan linier naik sesuai dengan tahun sekolah yang telah dilaluinya. Bahkan, di berbagai daerah jumlah sarjana pengangguran ternyata justru terus bertambah, sehingga jangan kaget jika kemudian timbul semacam krisis kepercayaan pada peran sekolah dan pendidikan pada umumnya.

Siapakah yang harus dipersalahkan? Apa sebenarnya kekeliruan yang terjadi dalam dunia pendidikan kita, sehingga tujuan esensial pendidikan yang seharusnya memampukan manusia dan memanusiakan manusia, ternyata justru melahirkan hasil-hasil yang kontra-produktif. Pada titik ini, mau tidak mau yang harus dilakukan dan dibutuhkan adalah kesediaan kita untuk menakar ulang tujuan dan perkembangan dunia pendidikan kita yang tampaknya mulai salah arah. Bisa dibayangkan, apa yang bakal terjadi jika pendidikan yang semua dimaksudkan untuk memberdayakan dan meningkatkan *plastisitas* (daya kenyal) masyarakat dalam menghadapi tekanan kehidupan, ternyata justru membebani dan menjadi masalah baru bagi warga masyarakat? (*)

BAB 3

Gambaran Umum Penduduk dan Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Salah satu hak asasi manusia dan hak setiap warga negara adalah mendapatkan pendidikan agar bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya melalui proses pembelajaran tanpa adanya pembedaan status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Begitu pentingnya pendidikan bagi masyarakat sehingga pemerintah Jawa Timur selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program di bidang pendidikan seperti BOS/BOPDA, PKH dan program beasiswa agar setiap warga masyarakat bisa mengakses pendidikan.

Kendati demikian, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah khususnya Jawa Timur dalam melaksanakan programnya ini selalu terkendala oleh berbagai faktor baik ekonomi maupun budaya. Seharusnya secara ekonomi masalah pendidikan akan terselesaikan dengan adanya berbagai macam program seperti BOS/BOBDA, PKH dan beasiswa. Namun kenyataan dilapangan program-program di bidang pendidikan tersebut belum mampu sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat terutama golongan ekonomi bawah di daerah-daerah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya anak-anak yang tidak mampu meneruskan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi dan juga adanya anak putus sekolah. Jika demikian maka faktor lingkungan dan budaya masyarakat setempat bisa menjadi asumsi bagi kendala peningkatan taraf pendidikan di masyarakat. Faktor lingkungan dan budaya ini bisa berarti mayoritas pendidikan masyarakat yang masih rendah, kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pendidikan itu sendiri, serta adanya kendala-kendala lain seperti perkawinan di usia dini yang masih banyak berkembang di masyarakat pedesaan seperti Kota Pasuruan, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso.

Faktor lingkungan dan budaya yang berkembang ini antara lain misalnya di Kota Pasuruan yang masih menganggap bahwa pendidikan bukanlah hal yang harus diutamakan terutama bagi anak perempuan karena pada akhirnya nanti tugas dari anak perempuan adalah di dapur, di kasur dan di sumur dan masyarakat lokal sana menyebutnya dengan istilah dapur, kapur, sumur. Sedangkan di Situbondo dan Bondowoso ada tradisi bahwa kalau bisa jika memiliki anak dan kakek atau nenek yang masih hidup sebaiknya anak secepatnya dikawinkan agar kakek atau nenek mereka bisa menyaksikan perkawinan cucu-cucunya dan tradisi ini oleh masyarakat lokal sering disebut capok nenek. Tradisi-tradisi ini



sebenarnya juga banyak dijumpai di daerah lainnya namun dengan sebutan yang berbeda-beda.

Faktor lingkungan dan budaya masyarakat setempat inilah yang membentuk mentalitas masyarakat tentang kesadaran akan pentingnya pendidikan sehingga bisa dibilang faktor ini justru lebih berbahaya dan sulit tertangani daripada hanya sekedar faktor ekonomi. Oleh karena itu, pada bab ini akan diuraikan data-data mengenai gambaran umum wilayah Jawa Timur khususnya Kota Pasuruan, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso guna mendukung penelitian ini.

1. Kondisi Geografis

Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Jawa selain Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Banten, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Jawa Timur terletak pada 111,0 hingga 114,4 Bujur Timur dan 7,12 hingga 8,48 Lintang Selatan. Provinsi Jawa Timur berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan di sebelah utara lebih tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Di sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka yaitu Samudera Indonesia. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum, wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dibagi 2 bagian besar yaitu Jawa Timur daratan dan Pulau Madura. Dimana luas wilayah Jawa Timur daratan hampir mencakup 90 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur, sedangkan luas wilayah Madura hanya 10 persen. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 47.156 km² habis terbagi menjadi 38 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota yaitu Kota Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Surabaya dan Batu. Sedangkan beberapa Kabupaten yang ada di Madura adalah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan yang paling ujung adalah Kabupaten Sumenep yang memiliki banyak kepulauan. Namun tidak seperti Pulau Jawa yang padat, Pulau Madura memiliki kepadatan yang lebih rendah karena banyak penduduknya yang merantau ke Pulau Jawa bahkan hingga luar pulau dan luar negeri.

Kota Pasuruan merupakan salah satu daerah yang terletak disepanjang pantai memiliki luas wilayah 37 km² ini memiliki potensi kelautan sehingga mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan. Demikian juga dengan Kabupaten Situbondo dan Bondowoso yang sebagian wilayahnya juga terletak disepanjang pantai sehingga memiliki potensi di bidang perikanan. Akan tetapi, kedua wilayah ini juga memiliki topografi pegunungan sehingga selain memiliki potensi di bidang perikanan bagi penduduk yang mendiami daerah pantai, juga memiliki potensi pertanian dan perkebunan bagi penduduk yang mendiami wilayah pegunungan. Adapun hasil tanaman di wilayah pegunungan selain hasil pertanian yaitu buah-buahan antara lain durian, rambutan, mangga, dan lain-lain.

Tabel: III.1
 Letak, Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota (1)	Tinggi Rata-Rata (2)	Luas Daerah (3)
Kabupaten		
1. Pacitan	7	1.419
2. Ponorogo	49	1.503
3. Trenggalek	110	1.261
4. Tulungagung	85	1.132
5. Blitar	167	1.629
6. Kediri	60	1.387
7. Malang	556	3.519
8. Lumajang	54	1.791
9. Jember	83	3.293
10. Banyuwangi	25	3.457
11. Bondowoso	255	1.560
12. Situbondo	5	1.639
13. Probolinggo	10	1.697
14. Pasuruan	5	1.473
15. Sidoarjo	3	715
16. Mojokerto	30	969
17. Jombang	44	1.159
18. Nganjuk	56	1.224
19. Madiun	60	1.001
20. Magetan	394	689
21. Ngawi	47	1.298
22. Bojonegoro	19	2.307
23. Tuban	4	1.858
24. Lamongan	6	1.813
25. Gresik	3	1.195
26. Bangkalan	47	1.249
27. Sampang	15	1.229
28. Pamekasan	8	792
29. Sumenep	13	1.999
Kota		
30. Kediri	60	63
31. Blitar	167	33
32. Malang	445	110
33. Probolinggo	10	52
34. Pasuruan	5	37
35. Mojokerto	30	16
36. Madiun	60	34
37. Surabaya	2	355
38. Batu	871	189
Jawa Timur		47.156

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2010

2. Pemerintahan

Untuk membentuk suatu sistem pemerintahan yang terkoordinir dengan baik maka dibentuklah suatu garis koordinasi secara teritorial maupun teknis. Secara teritorial terbagi dalam wilayah kecamatan dan pada level yang lebih rendah terdapat sejumlah desa dan kelurahan. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur tidak banyak berubah karena sifat datanya relatif statis. Misalnya data jumlah kecamatan, Desa serta Kelurahan. Secara administratif wilayah Jawa



Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota dimana masing-masing kabupaten maupun kota memiliki tata pemerintahannya sendiri-sendiri. Kabupaten-kabupaten dan kota-kota tersebut masing-masing terbagi kedalam kecamatan-kecamatan yang kemudian terbagi lagi kedalam beberapa kelurahan atau desa. Secara keseluruhan jumlah kecamatan seluruh Jawa Timur sebanyak 662 kecamatan, 2.400 perkotaan dan 8.506 desa.

Kota Surabaya yang merupakan pusat pemerintahan dari Provinsi Jawa Timur memiliki 31 kecamatan yang terbagi habis ke dalam 163 perkotaan. Kota lainnya yang juga terbagi habis kedalam perkotaan adalah Kota Pasuruan yaitu terbagi menjadi 3 kecamatan dan terbagi habis kedalam 32 perkotaan, Kabupaten Bondowoso terbagi menjadi 23 kecamatan dan terbagi habis kedalam 33 perkotaan, Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 17 kecamatan dan terbagi habis kedalam 33 perkotaan. Namun secara administratif kota-kota tersebut berbeda dengan Kota Surabaya karena kota-kota tersebut terbagi menjadi kawasan perkotaan dan kabupaten.

Wilayah yang paling banyak memiliki kecamatan adalah Kabupaten Malang. Hal ini karena memang selain wilayahnya yang cukup luas, Kabupaten Malang juga memiliki penduduk yang padat setelah Kota Surabaya. Kabupaten Malang memiliki 117 perkotaan dan 273 desa. Kabupaten Malang bersama dengan Kota Malang ini juga merupakan salah satu kota tujuan bagi para pelajar. Bisa dibayangkan bahwa Kabupaten Malang dan Kota Malang merupakan kota tujuan kedua setelah Kota Surabaya bagi para migran baik untuk tujuan ekonomi maupun tujuan pendidikan. Akan tetapi berbeda dengan Kota Surabaya dan Malang, beberapa kota atau kabupaten di Jawa Timur justru masih bisa dikatakan tertinggal dalam hal pendidikan seperti Kota Pasuruan, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso, bahkan buta huruf masih bisa dijumpai di ketiga wilayah ini terutama di kawasan desa-desa. Ketertinggalan ini bisa disebabkan karena faktor jauh dari akses pendidikan maupun dari segi faktor budaya masyarakat setempat.

Selain itu, ketertinggalan ini bisa terlihat dilapangan dengan indikator ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada serta angka partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Hal ini jelas akan terlihat perbandingannya dengan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di kota dimana sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar banyak yang belum memadai. Selain itu yang menarik disini adalah dengan adanya perbedaan secara administratif antara daerah desa dan kota maka masalah anak putus sekolah inipun memiliki karakter yang berbeda-beda disetiap daerah. Jika di daerah desa keterbatasan terhadap informasi membuat anak menjadi putus sekolah selain beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya, namun pada masyarakat perkotaan justru arus informasi seperti televisi biasanya mempengaruhi anak untuk putus sekolah. Hal ini bisa kita jumpai fenomena anak pank yang semakin banyak di daerah perkotaan seperti Surabaya dan Malang yang rata-rata dari mereka adalah anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah atau anak



putus sekolah. Sedangkan fenomena anak jalanan lainnya yang banyak berprofesi sebagai pengamen biasanya adalah anak-anak dari keluarga ekonomi bawah yang rawan putus sekolah, anak putus sekolah maupun anak yang tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Tentu saja fenomena semacam ini menjadi problem tersendiri bagi pemerintah kota.

Tabel: III.2
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2009

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa		Jumlah
		Perkotaan	Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Pacitan	12	19	152	171
2. Ponorogo	21	66	239	305
3. Trenggalek	14	28	129	157
4. Tulungagung	19	91	180	271
5. Blitar	22	53	195	248
6. Kediri	26	105	239	344
7. Malang	33	117	273	390
8. Lumajang	21	27	178	205
9. Jember	31	63	185	248
10. Banyuwangi	24	62	155	217
11. Bondowoso	23	33	186	219
12. Situbondo	17	33	103	136
13. Probolinggo	24	75	255	330
14. Pasuruan	24	106	259	365
15. Sidoarjo	18	268	85	353
16. Mojokerto	18	102	202	304
17. Jombang	21	144	162	306
18. Nganjuk	20	86	198	284
19. Madiun	15	39	167	206
20. Magetan	18	71	164	235
21. Ngawi	19	15	202	217
22. Bojonegoro	27	58	372	430
23. Tuban	20	45	283	328
24. Lamongan	27	51	423	474
25. Gresik	18	139	217	356
26. Bangkalan	18	38	243	281
27. Sampang	14	12	174	186
28. Pamekasan	13	25	164	189
29. Sumenep	27	35	297	332
Kota				
30. Kediri	3	46	-	46
31. Blitar	3	21	-	21
32. Malang	5	54	3	57
33. Probolinggo	5	21	8	29
34. Pasuruan	3	32	2	34
35. Mojokerto	2	18	-	18
36. Madiun	3	27	-	27
37. Surabaya	31	163	-	163
38. Batu	3	12	12	24
Jumlah	662	2.400	6.106	8.506

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2010



3. Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Dalam suatu pemerintahan, penduduk merupakan salah satu dimensi terpenting karena penduduk merupakan objek sekaligus subyek dari pembangunan. Agar pembangunan berjalan dengan baik maka jumlah dan karakteristik penduduk harus diketahui guna ketepatan sasaran program dari suatu pembangunan itu sendiri. Dalam hal pembangunan di bidang pendidikan khususnya, data kependudukan diperlukan untuk pembangunan baik sarana dan prasarana penunjang pendidikan itu sendiri agar selaras dan seimbang dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Misalnya saja pembangunan sekolah di perkotaan akan berbeda dengan di pedesaan dari segi kuantitas. Di wilayah perkotaan jumlah penduduk biasanya lebih banyak dibanding dengan wilayah pedesaan sehingga kebutuhan sarana sekolah akan lebih banyak kuantitasnya daripada di desa.

Secara umum, data proyeksi penduduk Jawa Timur menunjukkan adanya peningkatan dari tahun-ketahun. Misalnya pada tahun 2006 jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 36.390.600 jiwa, pada tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 36.895.571 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk ini juga terjadi pada tahun erikutnya yaitu 2008 menjadi 37.094.836 jiwa hingga pada tahun 2009 menjadi 37.286.246 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh adanya faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Umumnya jumlah penduduk di daerah pedesaan lebih sedikit jika dibanding dengan jumlah penduduk di perkotaan. Misalnya saja jumlah penduduk Kota Pasuruan sebanyak 174.173 jiwa pada tahun 2009, kemudian jumlah penduduk Kabupaten Situbondo sebanyak 624.888 jiwa dan penduduk Kabupaten Bondowoso sebanyak 708.905 jiwa. Jumlah ini tentu saja lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Surabaya yaitu sebanyak 2.631.305 jiwa dan penduduk Kabupaten Malang sebanyak 2.425.311.

Perbedaan ini jelas saja dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama sumber daya ekonomi. Akan tetapi mobilitas yang dilakukan oleh penduduk tidak selalu berdasarkan alasan ekonomi. Sebagai bagian yang integral dari proses pembangunan, mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Acapkali mobilitas penduduk diakibatkan karena adanya usaha untuk mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup disini diartikan secara luas yaitu dalam konteks ekonomi, sosial, politik, maupun budaya.

Tabel: III.3
Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Pacitan	553.321	555.262	557.029	558.644
2. Ponorogo	888.857	892.527	895.921	899.074
3. Trenggalek	673.920	674.620	675.380	675.765
4. Tulungagung	981.257	985.147	988.731	992.048
5. Blitar	1.069.569	1.069.798	1.070.122	1.070.446
6. Kediri	1.451.028	1.451.119	1.451.630	1.451.861
7. Malang	2.388.755	2.401.624	2.413.779	2.425.311
8. Lumajang	1.017.467	1.021.317	1.024.849	1.028.103
9. Jember	2.304.634	2.313.100	2.320.844	2.327.957
10. Banyuwangi	1.522.534	1.527.384	1.531.753	1.535.701
11. Bondowoso	703.303	705.384	707.242	708.905
12. Situbondo	618.816	621.026	623.042	624.888
13. Probolinggo	1.041.370	1.042.323	1.043.671	1.044.237
14. Pasuruan	1.438.610	1.443.716	1.448.370	1.452.629
15. Sidoarjo	1.737.543	1.759.623	1.781.405	1.802.948
16. Mojokerto	987.817	996.774	1.005.486	1.013.988
17. Jombang	1.253.752	1.269.851	1.285.739	1.301.459
18. Nganjuk	994.468	997.458	1.000.132	1.002.530
19. Madiun	642.335	642.398	642.518	642.638
20. Magetan	323.536	624.581	625.424	626.092
21. Ngawi	830.281	832.696	834.847	836.767
22. Bojonegoro	1.247.919	1.255.914	1.263.551	1.270.876
23. Tuban	1.073.071	1.076.027	1.078.641	1.080.956
24. Lamongan	1.188.136	1.188.559	1.189.087	1.189.615
25. Gresik	1.153.292	1.174.063	1.194.821	1.215.603
26. Bangkalan	923.657	940.331	956.996	973.681
27. Sampang	868.370	885.379	902.429	919.548
28. Pamekasan	802.172	818.604	835.101	851.690
29. Sumenep	1.016.418	1.016.471	1.016.907	1.017.147
Kota				
30. Kediri	265.721	268.081	270.374	272.610
31. Blitar	1.29.932	131.121	132.278	133.408
32. Malang	807.543	812.209	816.637	820.857
33. Probolinggo	218.995	222.822	226.643	230.464
34. Pasuruan	173.872	173.940	174.073	174.173
35. Mojokerto	112.959	113.075	113.201	113.327
36. Madiun	175.955	177.148	178.291	179.391
37. Surabaya	2.625.298	2.628.113	2.630.079	2.631.305
38. Batu	184.117	185.986	187.813	189.604
Jumlah	36.390.600	36.895.571	37.094.836	37.286.246

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2010



Meskipun demikian, banyak studi memperlihatkan bahwa bentuk-bentuk keputusan serta motivasi yang diambil oleh individu akan sangat berlainan, antara karena alasan ekonomi dengan karena alasan politik (Peterson, W; Kunz.; 1973 dalam Tjiptoherijanto, 2000). Perpindahan atau migrasi yang didasarkan pada motif ekonomi merupakan migrasi yang direncanakan oleh individu secara sekarela (*voluntary planned migration*). Penduduk yang akan berpindah, atau migran telah memperhitungkan berbagai kerugian dan keuntungan yang akan didapatnya sebelum yang bersangkutan memutuskan untuk berpindah atau menetap ditempat asalnya. Dalam hubungan ini tidak ada unsur paksaan untuk melakukan migrasi. Tetapi semenjak dasawarsa 1970-an banyak dijumpai pula mobilitas penduduk yang bersifat paksaan atau terdesak (*impelled*) (Peterson, W: 1969 dalam Tjiptoherijanto, 2000). Mobilitas penduduk yang bersifat paksaan ini misalnya akibat kerusuhan politik atau bencana alam. Adanya berbagai tekanan dari segi politik, sosial, ataupun budaya menyebabkan individu tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melakukan perhitungan manfaat ataupun kerugian dari aktivitas migrasi tersebut. Namun dalam kenyataannya, secara konseptual maupun metodologi, para ahli sampai saat ini masih mengalami kesulitan dalam membedakan secara lebih tajam antara migran dengan motif ekonomi dan non ekonomi (Kunz. E.F: 1973; King, Rusell: 1966 dalam Tjiptoherijanto, 2000). Selain faktor penyebab migrasi yang telah disebutkan, ada pula faktor lain yang mempengaruhi terjadinya migrasi yaitu pendidikan. Adanya peluang pendidikan yang lebih maju di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya dan Malang telah menjadi faktor penarik bagi para anak-anak maupun pemuda di daerah-daerah untuk migrasi dengan harapan bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik yang tidak bisa terpenuhi oleh daerah asalnya.

Terlepas dari mobiltas penduduk dilakukan atas dasar motivasi ekonomi maupun non ekonomi, adanya migrasi penduduk dari daerah satu ke daerah lain yang lebih maju telah membawa dampak tersendiri bagi daerah yang telah ditinggalkannya antara lain dampak positif yaitu; (a). Berkurangnya jumlah penduduk; (b). berkurangnya jumlah pengangguran. Sedangkan dampak negatifnya yaitu; (a). Berkurangnya tenaga kerja muda dan penggerak pembangunan karena pada umumnya sebagian besar penduduk yang melakukan migrasi adalah penduduk usia kerja; (b). Stabilitas keamanan yang menurun akibat banyaknya penduduk muda yang melakukan migrasi; (c). Wilayah yang ditinggalkan pada umumnya merupakan wilayah agraris dimana setiap hari lahan belum tentu digarap. (d). Adanya trend bahwa para migran yang ke daerah tujuan dengan alasan pendidikannya biasanya enggan kembali ke daerah untuk memajukan daerahnya dan lebih memilih untuk tetap tinggal di kota sehingga daerah yang ditinggalkan kehilangan penduduk yang memiliki intelektualitas.

Migrasi penduduk inipun juga berpengaruh pada kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan perbandingan dari jumlah penduduk di suatu wilayah dengan luas wilayahnya. Acapkali jumlah penduduk yang setiap tahun bertambah entah itu karena faktor kelahiran, kematian maupun migrasi tidak disertai dengan pertambahan luas wilayah sehingga angka kepadatan penduduk terus mengalami kenaikan. Dari hasil registrasi tahun 2008, kepadatan penduduk Jawa Timur pada tahun 2005 hingga 2006 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2005 kepadatan penduduk 798 jiwa/km², pada tahun 2006 meningkat menjadi 807 jiwa/km². Sedangkan pada tahun 2006 ke tahun 2007 mengalami penurunan yaitu menjadi 795 jiwa/km² dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan kembali menjadi 799 jiwa/km².

Menurut catatan statistik, Kota Pasuruan memiliki kepadatan penduduk yaitu 1.263 jiwa/ km² pada tahun 2009 lebih banyak jika dibandingkan kepadatan penduduk pada tahun 2008 yaitu 1.259 jiwa/ km² pada tahun. Jumlah ini merupakan peningkatan dari tahun 2007 yaitu sebanyak 1.255 jiwa/km². Padahal tahun sebelumnya kepadatan penduduk di Kota Pasuruan lebih tinggi yaitu mencapai 1.291 jiwa/km² pada tahun 2006. Kabupaten Situbondo dan Bondowoso memiliki kepadatan yang cukup rendah jika dibandingkan dengan Kota Pasuruan dan beberapa daerah di Jawa Timur lainnya karena keduanya merupakan wilayah yang terletak paling ujung dari Jawa Timur dan seperti daerah pedesaan lainnya penduduknya juga banyak yang migrasi ke luar kota terutama ke Surabaya.

Adapun kepadatan penduduk di Kabupaten Situbondo yaitu 388 jiwa/km² pada tahun 2006. Kepadatan penduduk di Kabupaten Situbondo mengalami penurunan menjadi 379 jiwa/km² pada tahun 2007. Pada tahun 2008 kepadatan penduduk di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan kembali menjadi 380 jiwa/km² dan hingga tahun 2009 menjadi 381 jiwa/km². Demikian juga dengan Kabupaten Bondowoso dimana pada tahun 2007 kondisi kepadatan penduduk mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan.

Berbeda dengan wilayah perkotaan seperti Surabaya dan Malang yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Pada tahun 2005 kepadatan penduduk Kota Surabaya mencapai 8.270 jiwa/km² dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi 8.325 jiwa/km². Pada tahun 2007 kepadatan penduduk di Kota Surabaya mengalami penurunan menjadi 8.053 jiwa/km², akan tetapi pada tahun 2008 mengalami peningkatan lagi menjadi 8.059 jiwa/km², demikian pada tahun 2009 mengalami kenaikan lagi menjadi 8.063 jiwa/km². Kota kedua setelah Kota Surabaya yang memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi dari kota-kota lainnya adalah Kota Malang yaitu pada tahun 2005 kepadatan penduduk mencapai 7.078 jiwa/km² dan kondisi ini terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2006 mencapai 7.126 jiwa/km², pada tahun 2007 mencapai 7.380 jiwa/

km² dan hingga pada tahun 2009 menjadi 7.458 jiwa/km². Kota lainnya yaitu Kota Mojokerto yang pada tahun 2009 memiliki kepadatan penduduk mencapai 6.885 jiwa/km² dan Kota Madiun mencapai 5.398 jiwa/km² pada tahun 2009.

Tabel: III.4
Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun Menurut Kabupaten/Kota 2006-2009

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk			
	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Pacitan	410	414	415	416
2. Ponorogo	646	651	653	655
3. Trenggalek	571	560	560	560
4. Tulungagung	941	942	945	948
5. Blitar	718	673	674	674
6. Kediri	1.100	1.047	1.047	1.074
7. Malang	812	806	810	814
8. Lumajang	573	570	572	574
9. Jember	920	934	937	940
10. Banyuwangi	272	364	265	266
11. Bondowoso	465	452	453	454
12. Situbondo	388	379	380	381
13. Probolinggo	669	652	653	653
14. Pasuruan	1.291	1.255	1.259	1.263
15. Sidoarjo	2.898	2.773	2.808	2.842
16. Mojokerto	1.485	1.440	1.453	1.465
17. Jombang	1.342	1.405	1.422	1.439
18. Nganjuk	870	815	817	819
19. Madiun	661	636	636	636
20. Magetan	903	907	908	909
21. Ngawi	662	643	644	645
22. Bojonegoro	542	544	548	551
23. Tuban	600	585	586	587
24. Lamongan	763	712	712	712
25. Gresik	941	986	1.003	1.020
26. Bangkalan	751	747	760	773
27. Sampang	725	718	732	746
28. Pamekasan	987	1.033	1.054	1.075
29. Sumenep	535	509	509	509
Kota				
30. Kediri	4.029	4.228	4.265	4.300
31. Blitar	3.859	4.026	4.061	4.096
32. Malang	7.126	7.380	7.420	7.458
33. Probolinggo	3.670	3.933	4.000	4.067
34. Pasuruan	5.231	4.929	4.933	4.936
35. Mojokerto	7.197	6.870	6.877	6.885
36. Madiun	5.164	5.331	5.365	5.398
37. Surabaya	8.325	8.053	8.059	8.063
38. Batu	2.041	2.005	2.024	2.043
Jawa Timur	807	795	799	803

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2010

Jika secara keseluruhan kita lihat pada tabel III.4, maka terdapat kecenderungan bahwa rata-rata wilayah perkotaan memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Hal ini tentu saja tidak menutup kemungkinan karena adanya faktor urbanisasi karena bagaimanapun daerah perkotaan selalu menjadi tujuan untuk mencari pekerjaan karena peluang di perkotaan lebih besar jika dibandingkan dengan peluang pekerjaan di pedesaan.

4. Pendidikan di Jawa Timur

Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan, demikian pula dengan Provinsi Jawa Timur yang termasuk dalam bagian wilayah Indonesia. Begitu pentingnya suatu pendidikan sehingga suatu daerah dapat diukur apakah daerah itu mengalami tingkat kemajuan atau kemunduran, karena seperti yang kita ketahui bahwa dengan pendidikan akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelegensi dan skill dan melalui pendidikan pula akan terjadi proses terciptanya generasi penerus bangsa. Apabila output dari proses pendidikan ini gagal maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan. Disisi lain, pendidikan di kalangan masyarakat ekonomi bawah merupakan barang mahal sekaligus sarana mobilitas ke arah vertikal karena pendidikan merupakan tiket untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Hal ini menjadikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia termasuk Jawa Timur menjadi agenda pembangunan yang penting dengan dilandasi oleh barbagai alasan antara lain; (a). Aspek pendidikan merupakan dimensi penting dan memiliki relevansi kuat terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana dipahami bahwa salah satu indikator utama yang menentukan kualitas sumber daya manusia adalah faktor pendidikan (b). Tingkat pendidikan ternyata juga menjadi salah satu dimensi penting yang menentukan indeks pembangunan manusia selain dimensi kesehatan dan kesejahteraan atau daya beli masyarakat. Mengingat strategisnya posisi variabel pendidikan dalam menentukan indeks pembangunan manusia oleh karenanya adalah wajar jika aspek pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan secara layak; (c). melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat diharapkan mampu menjadi daya ungkit bagi kemajuan pembangunan di sektor yang lainnya seperti; kesehatan; politik, ekonomi, psikologis, kultural maupun dan pembangunan fisik; (d). sebagaimana tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyangkut hak anak maka perhatian terhadap anak dalam bidang pendidikan harus diarahkan pada beberapa kondisi antara lain; (i). Mampu mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan psikis bagi pengembangan diri anak; (ii). dapat mengembangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia

dan kebebasan dasar serta prinsip yang tertera dalam piagam PBB; (iii). Mampu mengembangkan penghormatan terhadap orang tua, identitas kebudayaan, bahasa dan nilai-nilai sendiri serta nilai-nilai nasional tempat anak hidup atau terhadap negara di mana ia berasal dan bagi peradaban-peradaban yang berbeda dari yang dimilikinya; (iv). pendidikan yang diberikan pada anak mampu menyiapkan anak untuk hidup secara bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas, dengan semangat saling memahami, perdamaian, toleransi dan kesamaan seks dan persahabatan di antara semua orang, etnis, kelompok bangsa dan agama serta orang-orang dari asal usul asli; serta (v). Mengembangkan penghormatan terhadap lingkungan alam; (vi). upaya peningkatan kualitas pendidikan memberikan implikasi terhadap peningkatan kecerdasan dan memperkuat landasan bagi pembangunan bangsa di masa yang akan datang.

Memperhatikan pentingnya faktor pendidikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia oleh karenanya upaya pembangunan pendidikan patut mendapatkan dukungan baik yang menyangkut soal kondisi sarana dan prasarana sekolah, sistem manajemen sekolah, kondisi sosial ekonomi orang tua, kualitas sumber daya manusia termasuk guru dan kualitas siswa sendiri dan sebagainya. Selanjutnya pada bagian berikut ini akan diuraikan berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan pendidikan di Jawa Timur.

Berdasarkan data statistik, keberadaan sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Jawa Timur sudah cukup memadai. Pada tingkat Sekolah Dasar telah terdapat 19.740 sekolah pada tahun 2009/2010 yang tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Timur. Adapun jumlah murid sekolah dasar di seluruh Jawa Timur bersifat fluktuatif. Artinya dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini jumlahnya mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2009/2010 sebanyak 3.221.471 murid sekolah dasar namun jumlah ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2008/2009 yang sebanyak 3.121.582 murid sekolah dasar. Sedangkan jika kita lihat pada tahun 2006/2007 ada sebanyak 3.329.173 murid sekolah dasar yang mengalami penurunan pada tahun 2007/2008 menjadi 3.151.909 murid sekolah dasar. Jumlah guru pada tahun 2009/2010 sebanyak 217.634 dengan rasio jumlah murid dan guru yaitu 10:1 dan rasio murid dan kelas yaitu 110:1.

Untuk jumlah sekolah di tingkat pendidikan dasar di Kota Pasuruan, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso ini secara kuantitas masih sedikit jika dibanding dengan Kota Malang, Jember dan Surabaya yang merupakan kota-kota pendidikan di Jawa Timur. Hal ini bisa diasumsikan bahwa kebutuhan masyarakat akan pendidikan di jenjang pendidikan dasar masih rendah tidak seperti di kota-kota besar dimana kebutuhan akan pendidikan sangat tinggi karena disamping penduduknya yang banyak juga karena kesadaran masyarakatnya akan pentingnya pendidikan juga tinggi, sehingga pendidikan merupakan kebutuhan yang harus diutamakan oleh masyarakat di daerah perkotaan.

Tabel: III.5
Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar Negeri dan Swasta 2009/2010

Kabupaten/Kota	Sekolah	Murid	Guru	Rasio (3)/(4)	Rasio (3)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
1. Pacitan	417	46.031	4.542	10	110
2. Ponorogo	617	73.346	6.227	12	119
3. Trenggalek	438	54.712	4.255	13	125
4. Tulungagung	668	88.825	7.590	12	133
5. Blitar	730	89.552	7.891	11	123
6. Kediri	657	125.101	7.432	17	190
7. Malang	1.165	206.307	12.121	17	177
8. Lumajang	577	89.221	6.941	13	155
9. Jember	1.010	222.458	12.204	18	220
10. Banyuwangi	828	141.165	8.010	18	170
11. Bondowoso	504	71.502	4.548	16	142
12. Situbondo	439	54.737	6.265	9	125
13. Probolinggo	599	87.376	5.952	15	146
14. Pasuruan	660	128.900	6.718	19	195
15. Sidoarjo	561	158.372	7.915	20	282
16. Mojokerto	508	74.566	5.667	13	147
17. Jombang	562	91.115	5.464	17	162
18. Nganjuk	674	92.364	5.582	17	137
19. Madiun	452	49.886	4.757	10	110
20. Magetan	502	48.838	5.095	10	97
21. Ngawi	580	68.756	5.803	12	119
22. Bojonegoro	816	93.805	8.192	11	115
23. Tuban	596	85.989	6.286	14	144
24. Lamongan	632	67.412	6.922	10	107
25. Gresik	447	75.184	4.954	15	168
26. Bangkalan	669	127.201	6.408	20	190
27. Sampang	581	94.470	5.644	17	163
28. Pamekasan	487	75.177	6.085	12	154
29. Sumenep	651	74.165	7.236	10	114
Kota					
30. Kediri	145	29.249	1.690	17	202
31. Blitar	61	14.319	776	18	235
32. Malang	265	75.964	3.934	19	287
33. Probolinggo	116	22.081	1.304	17	190
34. Pasuruan	62	19.148	1.139	17	309
35. Mojokerto	61	11.527	779	15	189
36. Madiun	70	17.742	1.127	16	253
37. Surabaya	861	257.957	13.212	20	300
38. Batu	72	16.951	967	18	235
Jawa Timur					
2009/2010	19.740	3.221.471	217.634	15	163
2008/2009	19.989	3.121.582	209.075	15	156
2007/2008	19.660	3.151.909	194.099	17	163
2006/2007	20.441	3.329.173	199.562	17	163

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2010



Seperti halnya perkembangan jumlah murid Sekolah Dasar yang fluktuatif dari tahun ke tahun, jumlah murid SLTP juga mengalami perkembangan yang sama. Jika pada tahun 2006/2007 jumlah murid SLTP sebanyak 1.196.238 murid maka pada tahun 2007/2008 mengalami peningkatan menjadi 1.224.482 murid dan pada tahun 2008/2009 meningkat menjadi 1.304.500 akan tetapi pada tahun 2009/2010 mengalami penurunan menjadi 1.242.091 murid. Adanya trend yang sama antara jenjang pendidikan Sekolah Dasar dengan SLTP ini bisa diasumsikan karena adanya kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya yang secara tidak langsung juga berdampak pada kelangsungan pendidikan anak, meskipun biaya SPP gratis namun biaya-biaya diluar SPP masih dirasa memberatkan seiring dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Sebagai daerah sasaran studi maka perlu kiranya menyorot tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan pada tingkat SLTP di Kota Pasuruan, Kabupaten Situbondo dan Bondowoso. Adapun jumlah murid di Kota Pasuruan pada tahun 2009/2010 sebanyak 8.889, jumlah murid di Kabupaten Situbondo sebanyak 19.649 dan jumlah murid di Kabupaten Bondowoso sebanyak 20.389 murid. bila dibandingkan dengan data jumlah murid Sekolah Dasar yang lebih banyak, maka ada suatu kecenderungan bahwa selepas lulus Sekolah Dasar biasanya anak-anak ini tidak melanjutkan sekolah ataupun putus sekolah pada jenjang SLTP.

Kondisi yang sama juga ditunjukkan pada tabel III.7 dimana perkembangan murid SMA juga fluktuatif. Pada tahun 2009/2010 jumlah murid sebanyak 500.197, maka pada tahun 2007/2008 menunjukkan perkembangan yang positif yaitu meningkat menjadi 508.256 murid. Perkembangan yang positif juga terjadi pada tahun 2008/2009 meningkat menjadi 511.053 namun pada tahun 2009/2010 jumlah murid SMA menurun menjadi 458.676. Penurunan inipun juga terjadi pada tahun yang sama dengan penurunan jumlah murid SD dan SLTP sehingga bisa diasumsikan disebabkan oleh faktor yang sama. Sementara itu, jumlah sekolah dan jumlah guru terus bertambah.

Tabel: III.6
Sekolah, Murid, Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Swasta 2009/2010

Kabupaten/Kota	Sekolah	Murid	Guru	Rasio (3)/(4)	Rasio (3)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
1. Pacitan	62	20.385	1.738	12	329
2. Ponorogo	82	31.393	2.136	15	383
3. Trenggalek	76	26.237	2.258	12	345
4. Tulungagung	70	38.386	2.886	13	548
5. Blitar	94	35.019	2.626	13	373
6. Kediri	97	46.470	2.941	16	479
7. Malang	272	76.409	5.934	13	281
8. Lumajang	97	35.269	2.359	15	364
9. Jember	246	69.872	4.605	15	284
10. Banyuwangi	154	52.019	3.101	17	338
11. Bondowoso	83	20.389	1.090	19	246
12. Situbondo	72	19.649	1.638	12	273
13. Probolinggo	136	23.625	2.131	11	174
14. Pasuruan	121	41.393	2.527	16	342
15. Sidoarjo	148	74.207	4.692	16	501
16. Mojokerto	103	37.163	2.734	14	361
17. Jombang	113	40.093	3.352	12	355
18. Nganjuk	70	38.319	2.762	14	547
19. Madiun	44	22.028	2.466	9	501
20. Magetan	54	20.088	1.845	11	372
21. Ngawi	74	32.549	2.097	16	440
22. Bojonegoro	95	38.443	2.478	16	405
23. Tuban	78	30.591	1.918	16	392
24. Lamongan	133	40.347	3.748	11	303
25. Gresik	95	31.283	2.591	12	329
26. Bangkalan	131	32.871	1.803	18	251
27. Sampang	133	22.539	1.978	11	169
28. Pamekasan	102	18.680	2.022	9	183
29. Sumenep	91	19.455	2.103	9	214
Kota					
30. Kediri	30	14.823	974	15	494
31. Blitar	15	9.121	761	12	608
32. Malang	89	35.907	2.628	14	403
33. Probolinggo	20	8.162	539	15	408
34. Pasuruan	20	8.889	789	11	444
35. Mojokerto	17	9.167	628	15	539
36. Madiun	20	10.518	1.027	10	526
37. Surabaya	296	102.380	10.367	10	346
38. Batu	25	7.953	550	14	318
Jawa Timur					
2009/2010	3.658	1.242.091	94.822	13	340
2008/2009	3.580	1.304.500	93.805	14	364
2007/2008	3.340	1.224.482	92.693	13	367
2006/2007	3.218	1.196.238	89.559	13	372

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2010



Tabel: III.7

Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Umum Negeri dan Swasta 2009/2010

Kabupaten/Kota	Sekolah	Murid	Guru	Rasio (3)/(4)	Rasio (3)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
1. Pacitan	29	3.817	345	11	132
2. Ponorogo	27	11.489	961	12	426
3. Trenggalek	17	7.471	575	13	439
4. Tulungagung	20	11.729	919	13	586
5. Blitar	18	6.604	473	14	367
6. Kediri	28	12.176	1.105	11	435
7. Malang	69	17.691	2.447	7	256
8. Lumajang	30	10.137	873	12	338
9. Jember	60	21.523	1.676	13	359
10. Banyuwangi	48	18.451	1.383	13	384
11. Bondowoso	21	5.605	450	12	267
12. Situbondo	15	7.281	587	12	485
13. Probolinggo	39	11.057	965	11	284
14. Pasuruan	33	17.743	1.393	13	538
15. Sidoarjo	57	27.889	2.514	11	489
16. Mojokerto	34	11.568	1.238	9	340
17. Jombang	48	16.130	1.630	10	336
18. Nganjuk	25	10.654	886	12	426
19. Madiun	13	6.337	542	12	487
20. Magetan	13	8.239	664	12	634
21. Ngawi	20	7.285	691	11	364
22. Bojonegoro	43	15.268	1.204	13	355
23. Tuban	34	10.565	845	13	311
24. Lamongan	69	18.814	2.504	8	273
25. Gresik	47	19.864	2.299	9	423
26. Bangkalan	32	11.384	829	14	356
27. Sampang	22	6.228	535	12	283
28. Pamekasan	38	9.914	989	10	261
29. Sumenep	41	13.901	1.242	11	339
Kota					
30. Kediri	20	11.374	875	13	569
31. Blitar	7	3.695	292	13	528
32. Malang	46	15.408	1.849	8	335
33. Probolinggo	10	3.430	309	11	343
34. Pasuruan	8	3.566	291	12	446
35. Mojokerto	16	6.593	587	11	412
36. Madiun	13	5.457	521	10	420
37. Surabaya	150	49.666	5.898	8	331
38. Batu	9	2.673	316	8	297
Jawa Timur					
2009/2010	1.269	458.676	43.702	10	361
2008/2009	1.259	511.053	38.489	13	406
2007/2008	1.315	508.256	37.995	13	387
2006/2007	1.165	500.197	36.984	14	429

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2010



Dari beberapa data yang telah disajikan, jika diamati dengan teliti maka bisa ditarik beberapa kesimpulan yaitu: (a). Perkembangan jumlah murid sangat fluktuatif dari tahun ke tahun terutama pada tahun 2009/2010 perkembangan jumlah murid memiliki trend negatif yaitu mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. (b). Setiap tahun jumlah kelas atau fasilitas pendidikan terus bertambah yang tentu saja diikuti oleh bertambahnya jumlah guru. Tentu saja, pertambahan jumlah kelas dan jumlah guru ini diharapkan membawa dampak yang positif bagi kemajuan bidang pendidikan akan tetapi ironinya pertambahan tersebut tidak dibarengi dengan pertambahan jumlah murid. (c). Jumlah murid, guru dan sekolah semakin berkurang seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan.

Deri perbedaan jumlah antara banyaknya sekolah, murid dan guru pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar hingga SMA maka terlihat bahwa partisipasi penduduk untuk melanjutkan pendidikan dari Sekolah Dasar ke SLTP dan SMA masih kurang. Hal ini terlihat dari jumlah sekolah, murid dan guru yang lebih banyak pada Sekolah Dasar daripada SLTP apalagi SMA. Sudah menjadi fenomena yang biasa di setiap daerah termasuk di Kota Pasuruan, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso bahwa penduduk yang berpendidikan tinggi lebih sedikit jika dibandingkan dengan penduduk yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Fenomena lainnya adalah, daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan maka rata-rata penduduknya masih banyak yang berpendidikan rendah serta minim sarana dan prasarana pendidikan. hal ini jelas terlihat pada tabel dimana daerah-daerah seperti Kota Pasuruan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek jauh memiliki jumlah sekolah, murid dan guru yang lebih sedikit jika dibanding dengan daerah-daerah lainnya. Hal ini bisa disebabkan karena faktor ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat tersebut.

Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh faktor ekonomi jika penduduk tidak memiliki kemampuan untuk membayar uang sekolah pada tingkat sekolah yang lebih tinggi karena biasanya sekolah yang lebih tinggi akan semakin tinggi pula biayanya. Sedangkan faktor sosial jika tingkat pendidikan seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya misalnya individu yang hidup dilingkungan masyarakat yang memiliki pendidikan rendah biasanya akan terpengaruhi oleh lingkungan sekitarnya untuk tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, biasanya teman sebaya (*peer group*) memberikan pengaruh yang cukup kuat. Faktor stabilitas politik yang tidak kondusif juga mempengaruhi kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya sementara faktor budaya biasanya lebih lokalitas dimana pada masyarakat tertentu tidak percaya pada pendidikan formal. Bagi masyarakat komunitas nelayan misalnya, pendidikan dipandang tidak terlalu penting karena yang terpenting bagi mereka adalah bisa mengaji dan melaut untuk mencari nafkah. Mereka akan cenderung beranggapan bahwa pendidikan tidak akan membawa dampak yang lebih baik.

BAB 4

Putus Sekolah, Beban Kerja Buruh Anak dan Mekanisme *Survival* Keluarga

Situasi dan perkembangan sektor riil yang belum sepenuhnya pulih dan dampak proses pendalaman kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur, sesungguhnya bukan hanya melahirkan berbagai tekanan kebutuhan hidup, tetapi juga menyebabkan kelangsungan pendidikan anak-anak menjadi terganggu. Kendati pemerintah telah menggulirkan Program BOS/BOPDA, dan berbagai subsidi lain di bidang pendidikan, namun bagi keluarga miskin karena anak acapkali harus bekerja membantu orang tua dan menjadi salah satu sumber penghasilan keluarga yang penting, maka pada titik tertentu niscaya akan melahirkan sebuah dilema: meneruskan sekolah atau bekerja membantu orang tua mencari nafkah.

Bagi anak-anak, sekolah dan bekerja biasanya menjadi beban ganda yang sulit mereka harus hadapi pada saat yang bersamaan, sehingga ketika keadaan makin memburuk, pilihan yang paling pragmatis dan terpaksa dilakukan adalah putus sekolah di tengah jalan agar dapat membantu orang tua mencari nafkah bagi keluarga. Di berbagai wilayah pedesaan di Pasuruan, Situbondo dan Bondowoso sudah bukan rahasia lagi bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin seringkali terhambat kelangsungan pendidikannya, kesempatan untuk belajar sangat terbatas, dan ujung-ujungnya terpaksa putus sekolah karena didukung kondisi lingkungan sosial yang kontra-produktif.

Bab berikut ini akan memaparkan situasi problematik yang berbagai hal yang menjadi faktor penyebab anak-anak terpaksa putus sekolah di tengah jalan. Di samping itu, dalam bab ini ini diuraikan bagaimana gambaran latar belakang kehidupan sosial ekonomi orang tua dari anak-anak yang terpaksa bekerja, bagaimana gambaran mengenai kelangsungan pendidikan dan beban kerja yang ditanggung buruh anak, dan bagaimana pula mekanisme *survival* yang mereka kembangkan untuk bertahan hidup di bawah tekanan proses pendalaman dan perluasan kemiskinan yang dialami orang tua dan keluarganya.

1. Karakteristik Anak Putus Sekolah

Tinggal kelas dan putus sekolah adalah masalah yang sering dihadapi anak-anak miskin di pedesaan. Keduanya menyangkut perkembangan kemajuan belajar siswa. Seorang siswa tinggal kelas karena tidak naik kelas, tetapi siswa lain karena tidak naik kelas ia kemudian memilih putus



sekolah di tengah jalan. Seorang siswa dikatakan putus sekolah apabila ia tidak dapat menyelesaikan program suatu sekolah secara utuh yang berlaku sebagai suatu sistem. Di Indonesia, ketika telah ditetapkan kebijakan Wajib Belajar 9 tahun, maka siswa yang hanya lulus SD, tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP oleh sebab itu disebut termasuk anak putus sekolah.

Mengulang atau tidak naik kelas, meskipun tidak selalu, namun biasanya dan dapat menjadi awal dari kasus siswa putus sekolah (Marzuki, 1994). Faktor penyebab siswa putus sekolah sudah barang tentu bermacam-macam. Namun demikian, berbagai studi acapkali menemukan bahwa keterlibatan anak-anak di usia sekolah untuk turut membantu orang tua mencari nafkah akan cenderung mempersempit kesempatan anak untuk menikmati pendidikan secara penuh: tidak saja sekadar kegiatan belajar di sekolah tetapi juga kesempatan belajar di rumah – termasuk membaca dan mengerjakan PR (Suyanto, 1999, Darmaningtyas, 1999). Selain itu, aktivitas bekerja ini juga memungkinkan anak terdampar dalam berbagai kegiatan orang dewasa yang dapat merugikan perkembangan mental, moral atau spiritual, serta perkembangan sosial anak (Pardoen dkk., 1996).

Dari segi jenis kelamin, studi ini telah mewawancarai 59,3% anak perempuan, dan 40,7% anak laki-laki. Seluruh responden yang diwawancarai dalam penelitian ini tidak ada satu pun yang berstatus anak pertama. Sebanyak 40% responden mengaku anak kedua, 50% anak ketiga, dan 10% responden adalah anak ketiga. Dari 150 anak yang diwawancarai, saat ini usia mereka berkisar antara 14-18 tahun. Sebanyak 34% responden berusia 14-15 tahun, dan sebanyak 36% berusia 16-17 tahun. Sementara itu, sebanyak 30% responden berusia 18 tahun. Kalau berbicara idealnya, anak dalam usia sekolah, tentu seharusnya mereka harus bersekolah untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tetapi, karena berbagai faktor terkadang tidak selalu anak-anak itu dapat terus melanjutkan sekolah atau bersekolah dengan baik.

Menurut hasil kajian Sukmadinata (1994), faktor utama penyebab anak putus sekolah adalah kesulitan ekonomi atau karena orang tua tidak mampu menyediakan biaya bagi sekolah anak-anaknya. Di samping itu, tidak jarang terjadi orang tua meminta anaknya berhenti sekolah karena mereka membutuhkan tenaga anaknya untuk membantu pekerjaan orang tua. Di daerah perkotaan, anak-anak di bawah usia bekerja di pabrik-pabrik untuk membantu ekonomi orang tua. Sedangkan di daerah pedesaan, selain di sektor pertanian dan perkebunan, biasanya anak-anak bekerja di sektor industri kecil, sektor informal dan sektor perdagangan tradisional. Jam kerja yang panjang, faktor kelelahan fisik, dan sejenisnya – ditambah lagi pengaruh lingkungan teman seusia yang rata-rata memang kurang perhatian kepada kegiatan belajar – adalah faktor gabungan yang menyebabkan anak-anak yang terpaksa bekerja acapkali prestasi belajarnya di sekolah relatif rendah, dan bahkan DO sebelum waktunya.

Tabel IV.1
Karakteristik Anak Putus Sekolah (N=150, Dalam %)

Jenis kelamin	Laki-laki	40.7%
	Perempuan	59.3%
Umur	14-15	34.0%
	16-17	36.0%
	18	30.0%
Dalam keluarga responden, merupakan anak yang ke	Anak ke-2	40.0%
	Anak ke-3	50.0%
	Anak ke-4	10.0%
Responden putus sekolah pada saat	Belum lulus SD	20.0%
	Sudah lulus SD	45.3%
	Belum lulus SMP	24.7%
	Sudah lulus SMP	10.0%
Usia responden saat putus sekolah	9 tahun	9.3%
	10 tahun	8.7%
	11 tahun	15.3%
	12 tahun	34.0%
	13 tahun	10.7%
	14 tahun	14.0%
	15 tahun	8.0%

Secara garis besar, proses yang terjadi ketika anak sampai memutuskan putus sekolah adalah: pertama, berawal dari tidak tertib mengikuti pelajaran di sekolah, terkesan memahami belajar hanya sekadar kewajiban masuk di kelas dan mendengarkan guru berbicara tanpa dibarengi dengan kesungguhan untuk mencerna pelajaran secara baik. Kedua, akibat prestasi belajar yang rendah, pengaruh keluarga atau karena pengaruh teman sebaya, kebanyakan anak yang putus sekolah selalu ketinggalan pelajaran dibandingkan teman-teman sekelasnya. Ketiga, kegiatan belajar di rumah tidak tertib dan tidak disiplin, terutama karena tidak didukung oleh upaya pengawasan dari pihak orang tua. Keempat, perhatian terhadap pelajaran kurang dan mulai didominasi oleh kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, Kelima, kegiatan bermain dengan teman sebayanya meningkat pesat. Keenam, mereka yang putus sekolah ini kebanyakan berasal dari keluarga ekonomi lemah, dan berasal dari keluarga yang tidak teratur (Marzuki, 1994).

Usia pertama kali anak terpaksa putus sekolah relatif berbeda-beda. Pada keluarga yang paling miskin, ada kecenderungan usia putus sekolah anak makin dini, karena mereka sejak kecil sudah harus membantu orang tuanya bekerja. Studi ini menemukan bahwa usia anak putus sekolah, yang paling dini adalah 9 tahun (9,3%). Dari 150 anak yang diteliti, 8,7% mengaku putus sekolah pada saat berusia 10 tahun, sebanyak 15,3% putus sekolah pada saat berusia 11 tahun, dan 34% pada saat mereka berusia 12 tahun. Ini berarti, cukup banyak responden yang putus sekolah pada saat mereka belum lulus SD.

Sebagian besar anak-anak yang diteliti mengaku putus sekolah selepas mereka lulus SD (45,3%). Namun, tidak sedikit responden mengaku (20%) terpaksa putus sekolah walaupun mereka belum lulus SD. Hanya 10%

responden yang mengaku putus sekolah setelah lulus SMP, dan sebanyak 24,7% responden mengaku putus sekolah ketika belum lulus SMP.

Bagi anak-anak dari keluarga miskin, putus sekolah di tengah jalan dan kemudian memilih segera bekerja atau sekadar membantu orang tua mencari nafkah seringkali menjadi pilihan yang terpaksa diambil karena di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan atau bahkan kekurangan, mempertahankan anak untuk tetap sekolah acapkali menjadi beban yang terlampau berat. Di samping itu, di mata anak-anak miskin, bersekolah dan tetap melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang setinggi-tinggi, seringkali pula dinilai tidak memberi pengaruh yang signifikan dan mustahil dicapai ketika orang tua mereka untuk memenuhi kebutuhan makan saja terpaksa sudah harus membanting tulang dan sering kekurangan.

2. Latar Belakang dan Keterbatasan Orang Tua

Kelangsungan pendidikan anak, sedikit-banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi keluarga dan orang tuanya. Meski pun tidak selalu anak-anak dari keluarga miskin cenderung keluar atau terpaksa putus sekolah karena harus bekerja membantu orang tua mencari nafkah. Tetapi, akibat tekanan kemiskinan dan latar belakang sosial orang tua yang kebanyakan kurang atau bahkan tidak berpendidikan, di daerah pedesaan kerap terjadi anak-anak mereka relatif ketinggalan dibandingkan dengan teman-temannya yang lain dan tak jarang pula mereka kemudian putus sekolah di tengah jalan karena orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyekolahkan anak.

Berbeda dengan anak-anak dari keluarga yang secara ekonomi mapan dan terpelajar, di mana sejak kecil mereka sudah didukung oleh fasilitas belajar yang memadai –mulai dari buku bacaan, meja belajar, hingga tambahan les di luar jam sekolah–, anak-anak dari keluarga miskin di pedesaan umumnya hanya memiliki fasilitas belajar yang pas-pasan: buku tulis yang seadanya, tas yang sederhana, dan yang memprihatinkan adalah orang tua si anak biasanya bersikap acuh tak acuh pada urusan sekolah anaknya, sehingga si anak sendiri kemudian tidak pernah merasakan bahwa sekolah itu memang penting bagi masa depannya.

Tabel IV.2
Pendidikan dan Pekerjaan Orang Tua (N=150, Dalam %)

Pendidikan ayah responden	Tidak sekolah	30.7%
	SD	36.0%
	SMP	25.3%
	SMA	8.0%
Pendidikan ibu responden	Tidak sekolah	38.0%
	SD	42.0%
	SMP	14.0%
	SMA	6.0%
Pekerjaan ayah responden	Petani	19.3%
	Nelayan	21.3%
	Pedagang	10.0%
	Wiraswasta	10.0%
	Buruh	14.0%
	Sektor informal	16.0%
	Serabutan	9.3%
Pekerjaan ibu responden	Tidak bekerja	33.3%
	Petani	18.7%
	Nelayan	14.7%
	Pedagang	9.3%
	Buruh	14.7%
	Serabutan	9.3%

Dengan latar belakang tingkat pendidikan yang relatif rendah atau bahkan sama sekali tidak pernah sekolah, memang sulit berharap orang tua responden mau dan mampu bersikap responsif dan apresiatif terhadap kegiatan belajar anak-anaknya. Dari data pada tabel IV.2 dapat kita lihat bahwa sebagian besar orang tua responden – baik ayah maupun ibu responden – umumnya hanya berpendidikan SD, itu pun tidak selalu semuanya tamat. Bahkan, tak sedikit orang tua responden ternyata sama sekali tidak pernah mengenal bangku sekolah. Sebanyak 30,7% ayah responden mengaku tidak pernah mengenal bangku sekolah, sementara itu sebanyak 38% ibu responden juga mengaku tidak pernah sekolah.

Sebagian kecil orang tua responden sebetulnya ada yang sempat menempuh pendidikan hingga tamat SLTP atau SLTA. Tetapi, secara kuantitatif orang tua semacam ini masih jarang di pedesaan. Bagi orang tua yang lahir sekitar tahun 1950-60an, bersekolah tampaknya masih bukan merupakan hal yang populer. Jadi, bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi jika sebagian besar orang tua responden tidak bersekolah atau hanya berpendidikan rendah, mungkinkah dapat diharapkan mereka apresiatif terhadap arti penting sekolah untuk anak-anaknya? Dari 150 keluarga yang diteliti, hanya 8% ayah responden yang mengaku berpendidikan setingkat SMA, sementara untuk ibu responden hanya 6% yang berpendidikan setingkat SMA.

Tabel IV.3
Kondisi Ekonomi Keluarga Anak Putus Sekolah (N=150, Dalam %)

Jumlah tanggungan orang tua	2-3 orang	28.0%
	4-5 orang	48.7%
	6-7 orang	23.3%
Jumlah anak orang tua responden di bawah 15 tahun	Tidak memiliki	40.0%
	1 anak	20.0%
	2 anak	30.0%
	3 anak	10.0%
Rata-rata penghasilan orang tua per bulan	Rp.400.000-Rp.500.000	42.7%
	Rp.500.001-Rp.600.000	21.3%
	Rp.600.001-Rp.700.000	20.7%
	Rp.700.001-Rp.800.000	10.0%
	Rp.800.001-Rp.900.000	5.3%
Dalam setahun terakhir, apakah total pendapatan yang diperoleh keluarga orang tua responden cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari	Sangat kurang	20.0%
	Kurang	44.7%
	Pas-pasan	16.7%
	Cukup	12.0%
	Lebih dari cukup	6.7%
Kondisi ekonomi keluarga orang tua responden saat ini dibandingkan dengan tahun lalu	Jauh lebih buruk	14.7%
	Lebih buruk	20.0%
	Relatif sama	48.0%
	Lebih baik	11.3%
	Jauh lebih baik	6.0%
Cara keluarga orang tua responden memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama 3 bulan terakhir ini	Dari penghasilan rutin	56.7%
	Dari tabungan	10.0%
	Utang	26.0%
	Bantuan kerabat/orang lain	7.3%

Dari segi ekonomi, sebagian besar keluarga, khususnya orang tua responden umumnya adalah pekerja di sektor informal, dan petani atau nelayan kecil yang termasuk keluarga yang pas-pasan. Ayah responden, sebagian besar bekerja sebagai petani (19,3%), nelayan (21,3%), buruh (14%) atau pekerja di sektor informal (16%). Sedangkan ibu responden, cukup banyak yang hanya berstatus ibu rumah tangga alias tidak bekerja (33,3%). Dari 150 keluarga yang diteliti, 18,7% ibu responden mengaku bekerja sebagai petani, 14,7% bekerja sebagai nelayan, dan 14,7% ibu responden mengaku bekerja sebagai buruh di sektor industri kecil. Tidak sedikit ayah dan ibu responden bekerja serabutan (9,3%), mencoba mengais rejeki semampu dan seadanya untuk menambal kebutuhan hidup sehari-hari.

Di tengah gencar-gencarnya pemerintah melakukan kampanye tentang Program Wajib Belajar 9 Tahun, secara kuantitatif Angka Partisipasi Pendidikan anak usia sekolah di berbagai pedesaan di Jawa Timur sebetulnya meningkat cukup pesat. Tetapi, kalau pihak orang tua ternyata sama sekali tidak memberikan dukungan kepada anak-anaknya agar giat dan rajin belajar, maka proses pendidikan yang dilangsungkan pun kemudian sekadar menjadi formalitas saja. Seperti dikatakan Muller (1980), bahwa rendahnya pendidikan dan wawasan orang tua, dalam banyak hal akan mempengaruhi cara orang tua tersebut memperlakukan anak-anaknya. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang orang tuanya tidak berpendidikan dan ditambah lagi dengan dukungan faktor

lingkungan sosial yang kontra-produktif bagi pengembangan pendidikan, maka hampir bisa dipastikan bahwa anak-anak itu akan ikut apatis terhadap arti penting sekolah. Jejasan situasi krisis, misalnya, dengan cepat akan menjadi pembenar bagi keluarga-keluarga yang tak berpendidikan di desa untuk segera mengeluarkan anaknya dari sekolah atau minimal tidak memperkenankan anaknya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, karena tidak dianggap sebagai prioritas yang penting.

Dalam studi yang dilaporkan ini, telah terungkap bahwa hampir tidak ada anak-anak yang rawan DO dan pekerja anak berasal dari keluarga yang cukup, apalagi mapan. Dari 150 responden yang menjawab pertanyaan tentang tingkat kecukupan pendapatan, hanya 6,7% yang mengaku berasal dari keluarga yang lebih dari cukup – dalam arti pendapatan yang mereka peroleh lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hampir semua responden menyatakan bahwa penghasilan yang mereka peroleh umumnya masih kurang (44,7%) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang makin lama makin melambung, dan bahkan sebanyak 20% responden secara terbuka mengakui bahwa kehidupan keluarganya saat ini sangat kekurangan. Sebanyak 16,7% responden menyatakan pas-pasan.

Kalau mau berbicara idealnya, ketika kondisi dan situasi keuangan keluarga tidak tengah bermasalah, animo masyarakat desa untuk menyekolahkan anaknya boleh dikata masih relatif memadai. Tetapi, lain soal ketika kehidupan sehari-hari keluarga mulai rapuh dan bahkan acapkali kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bisa dibayangkan, apa yang kemudian terjadi jika sebagian besar responden (20%) mengaku dibandingkan tahun lalu kehidupan ekonomi keluarga mereka mengalami penurunan atau bahkan jauh lebih buruk (14,7%). Seperti hasil kajian yang dilakukan Darmaningtyas (1999), bahwa akibat dari situasi krisis yang berkepanjangan, tak pelak jumlah orang-orang yang tidak mampu membiayai pendidikan anaknya akan semakin besar. Banyak orang tua menarik anaknya dari bangku sekolah karena tekanan ekonomi yang semakin berat. Jangankan membayar biaya dan memenuhi berbagai kebutuhan sekolah anak, sedangkan untuk makan yang layak saja bagi keluarga miskin barangkali sudah makin sulit. Di berbagai daerah di Propinsi Jawa Timur, dari hasil investigasi ke lapangan diketahui bahwa daya tahan keluarga miskin dalam menghadapi kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari sering tersendat-sendat. Ibarat orang yang berdiri di kedalaman air sebatas dagu, maka kondisi yang dialami keluarga miskin di desa saat ini benar-benar sudah tenggelam. Barangkali hanya keajaiban dan nasib saja yang memungkinkan mereka-mereka ini dapat keluar dari situasi krisis dengan selamat.

Secara kuantitatif, diperkirakan bahwa kondisi perekonomian yang cednerung belum stabil, langsung maupun tidak langsung telah menurunkan pendapatan rumah tangga rata-rata 30-70% – atau bahkan kehilangan pendapatan sama sekali – di satu pihak, dan di pihak lain memicu kenaikan harga antara 100-400%, termasuk di antaranya harga



alat dan perlengkapan sekolah, antara lain: buku tulis, pensil, ballpoint, penggaris, kertas, sepatu, pakaian seragam, tas, dan lain-lain. Dalam hal ini, apa yang kemudian dapat dilakukan anak-anak dari keluarga miskin, jika untuk memenuhi kebutuhan hidup saja orang tuanya acapkali sudah kesulitan. Jangankan mengerjakan PR dan belajar di rumah, bagi anak-anak miskin yang terpaksa bekerja untuk membantu kehidupan ekonomi orang tuanya, barangkali dapat masuk sekolah secara rutin saja sudah merupakan kesempatan langka, sehingga jangan kaget jika sebagian anak-anak miskin terpaksa putus sekolah di tengah jalan.

Studi ini menemukan bahwa tak jarang anak didik terpaksa harus membolos beberapa hari, bahkan mungkin mingguan atau sekitar sebulan karena mereka harus ikut bekerja membantu kesibukan orang tua, baik itu di sektor perkebunan tembakau, perdagangan tradisional, sektor industri kecil atau yang lain. Pada titik tertentu, ketika tekanan kemiskinan sudah sampai puncaknya, maka jangan heran jika kelangsungan pendidikan anak kemudian dikorbankan: mereka keluar di tengah jalan alias DO. Dari hasil kajian di lapangan diketahui bahwa kelangsungan pendidikan anak-anak miskin seringkali terhambat, bukan karena mereka tidak memiliki uang untuk membayar SPP, tetapi lebih disebabkan karena waktu anak terpaksa tersita untuk membantu orang tua bekerja, dan orang tua mereka juga keberatan ketika masih harus mengeluarkan dana lain untuk memenuhi kebutuhan transportasi, uang jajan anak, dan lain-lain.

Tabel IV.4
Hal-Hal yang Dirasa Masih Memberatkan Orang Tua Ketika
Harus Membiayai Anak Sekolah (N=150, Dalam %)

Biaya sekolah yang dirasa memberatkan	Sangat memberatkan	Memberatkan	Cukup memberatkan	Tidak memberatkan
1. Uang saku/jajan anak di sekolah	13.3%	20.0%	50.7%	16.0%
2. Transportasi ke sekolah	14.0%	16.0%	39.3%	30.7%
3. Uang seragam	19.3%	20.0%	32.7%	28.0%
4. Uang untuk membeli peralatan sekolah	14.0%	20.0%	56.0%	10.0%
5. Uang praktikum	16.0%	18.7%	32.7%	32.7%
6. Biaya ekstra kurikuler	17.3%	20.0%	34.7%	28.0%

Studi ini menemukan, beberapa hal yang dinilai orang tua tua responden terasa berat atau bahkan sangat memberatkan ketika harus membiayai anak sekolah adalah uang saku anak, uang transport anak ke sekolah, uang seragam, uang pratikum dan biaya ekstra kurikuler. Rata-rata hampir separuh orang tua responden mengeluhkan kewajiban dan pengeluaran ekstra ini ketika anak mereka tidak putus sekolah. Bagi anak-anak yang tempat tinggalnya tidak jauh dari sekolah, mungkin benar mereka akan dapat menghemat ongkos transport karena mereka bisa hanya berjalan kaki atau naik sepeda ketika berangkat sekolah. Tetapi, karena kebutuhan anak bersekolah cukup banyak, dan dengan bersekolah anak akan kehilangan kesempatan mencari nafkah, maka pada akhirnya yang

dipilih adalah sebagian anak terpaksa putus sekolah, dan kemudian berusaha membantu orang tua bekerja.

Sepanjang orang tua responden masih memiliki sumber pendapatan yang bisa diandalkan untuk hidup, sebenarnya mereka mengaku tidak memiliki keinginan sama sekali untuk meminta anaknya putus sekolah di tengah jalan – minimal sampai lulus SMP. Namun, karena sebagian orang tua responden mengaku tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bersifat temporer saja, maka mereka pun kemudian hanya bisa pasrah. Pendidikan anak terpaksa dikorbankan, karena tidak dinilai sebagai prioritas kebutuhan yang sangat penting.

Menurut anak-anak yang diwawancarai secara mendalam, beberapa akibat yang mesti ditanggung keluarga responden jika ia memaksa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi adalah. Pertama, yang jelas orang tua responden harus bekerja lebih keras untuk memperoleh tambahan penghasilan guna membiayai kebutuhan sekolah anak-anaknya. Bagi keluarga miskin, jika anak sepenuhnya harus bersekolah, maka untuk mencari sumber penghasilan alternatif, tak pelak orang tua responden harus bekerja lebih giat dari biasanya: mungkin sebagian dengan cara menambah lama jam kerja, tetapi bisa juga dengan cara mencari pekerjaan sampingan yang fungsional.

Kedua, jika responden berkeinginan untuk tetap melanjutkan sekolah, maka itu berarti mereka harus menanggung beban ganda yang berat, yakni beban sekolah dan bekerja yang bagi anak-anak sebetulnya agak mustahil dapat dilakukan bersama-sama tanpa mengorbankan satu satu pilihan. Di kalangan keluarga miskin, sudah lazim terjadi ketika beban ganda itu makin berat, maka biasanya anak-anak akan cenderung mengorbankan kepentingan sekolah, dan memilih untuk tetap melanjutkan kerja dengan curahan waktu yang lebih intens demi kelangsungan kehidupan keluarga dan orang tuanya.

Ketiga, meski tidak banyak terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi jika responden memaksakan diri melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka salah satu konsekuensinya adalah kesempatan adik-adiknya untuk bersekolah menjadi hilang. Dalam penelitian ini, beberapa responden menyatakan bahwa jika ia meneruskan sekolah hingga jenjang SMA apalagi hingga kuliah, maka jelas akan ada saudaranya yang terpaksa berkorban putus sekolah di tengah jalan karena semua biaya akan tersedot untuk membiayai kebutuhan pendidikan mereka.

Meski menurut kampanye program pemerintah, biaya pendidikan anak hingga jenjang SMP dinyatakan bebas, tetapi menurut orang tua responden dalam praktik masih ada pos-pos pengeluaran lain yang seringkali memberatkan. Dari 150 keluarga yang diteliti, biaya lain yang harus mereka keluarkan untuk urusan sekolah anaknya, antara lain adalah biaya daftar ulang (60%), biaya uang seragam sekolah (43,3%) dan yang seragam olahraga anak (39%). Di luar itu, terkadang orang tua responden juga masih dibebani dengan kewajiban untuk membayar uang buku penunjang, uang pratikum, biaya les tambahan dan biaya ekstra kurikuler.

BAB 5

Pola dan Kendala dalam Aktivitas Belajar, Pengalaman Menempuh Pendidikan dan Kebutuhan Anak Rawan Putus Sekolah

Dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 telah dinyatakan dengan tegas bahwa pendidikan sesungguhnya merupakan upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut proses pendidikan merupakan proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup secara mandiri sekaligus sebagai anggota masyarakat yang berada dalam lingkungan alam sekitarnya. Dengan demikian pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektualitas semata, melainkan ada penekanan pada proses pembinaan kepribadian anak didik secara menyeluruh sehingga anak menjadi lebih dewasa. Secara ringkas akhir dari suatu proses pendidikan sesungguhnya diarahkan pada upaya manusia dengan penuh tanggung jawab membimbing anak didik menjadi lebih dewasa (*maturity*).

Memperhatikan definisi pendidikan sebagaimana terurai di atas terlihat jelas bahwa proses pendidikan sebenarnya mengandung makna antara lain; (a), bahwa fokus utama proses pendidikan tidak hanya diarahkan pada pengembangan intelektualitas semata, melainkan juga pengembangan kepribadian dan akhlak yang lebih mengacu pada kondisi psikologis dan mental serta sisi kerokhaniahan dari anak didik; (b). Pengembangan sikap dan perilaku kedewasaan merupakan aspek penting yang perlu digarisbawahi dalam proses pendidikan pada siswa; (c). bahwa peran anak didik dalam lingkungan di mana mereka eksis sangat diharapkan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya; (d). proses pendidikan merupakan hak bagi seluruh individu dan oleh karenanya akses terhadap bidang pendidikan harus diberikan pada seluruh warga negara; (e). proses pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental baik menyangkut daya pikir, daya intelektualitas maupun daya emosional atau perasaan yang diarahkan pada tabiat manusia dan kepada sesamanya.

Diakui bahwa dalam proses pendidikan sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, sarana dan prasarana

serta fasilitas pendidikan, media yang digunakan termasuk manajemen pendidikan dari soal perencanaan, pelaksanaan proses pendidikan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Sampai sejauh ini diakui telah banyak lembaga pendidikan yang berupaya mengemban misi pendidikan bagi warga masyarakat untuk menciptakan kemandirian, tanggung jawab dan kedewasaan masyarakat baik melalui institusi pemerintah maupun swasta. Tetapi upaya yang dilakukan oleh berbagai institusi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat ternyata masih diwarnai oleh kondisi yang masih belum menggembirakan. Kasus anak yang tinggal kelas atau tidak naik kelas sehingga terancam putus sekolah atau drop out adalah salah satu kasus yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat. Anak-anak usia sekolah yang ada baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan yang masih kerap membolos sekolah dengan berbagai alasan baik karena membantu orang tua bekerja di berbagai sector pekerjaan baik pertanian, perkebunan, perikanan atau nelayan, perdagangan, sector industri kecil dan berbagai sector pekerjaan juga masih kerap dijumpai. Potret buram kehidupan dan masa depan anak-anak usia sekolah yang ada di berbagai wilayah ternyata masih mewarnai kehidupan masyarakat terutama pada keluarga-keluarga miskin.

Secara teoritik sesungguhnya ada berbagai situasi baik yang bersifat internal maupun eksternal teridentifikasi sebagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam menempuh pendidikan. Sebagaimana diungkapkan oleh *E.L. Thorndike* (dikutip dari Sagala; 2005; 57) bahwa keberhasilan studi atau pendidikan yang ditempuh seseorang ditentukan oleh berbagai kondisi atau syarat antara lain; (a). Kemampuan berpikir yang kritis, logis, sistematis dan obyektif (*scholastic aptitude test*); (b). memiliki minat yang tinggi terhadap mata pelajaran yang diberikan di sekolah (*interest inventory*); (c). Mengembangkan bakat dan minat khusus sesuai dengan potensi yang melekat pada diri individu (*differential aptitude test*); (d). menguasai bahan dasar yang diperlukan untuk meneruskan pelajaran di sekolah yang menjadi lanjutannya (*achievement test*); (e). Menguasai bahasa (salah satunya bahasa Inggris); (f); stabilitas psikis artinya tidak mengalami masalah penyesuaian diri dan seksual; (g). Kesehatan jasmani terjaga; (h). Lingkungan baik sosial maupun fisik yang mendukung dan menimbulkan ketenangan; (i). Kehidupan ekonomi keluarga yang memadai; dan (j). Menguasai teknik belajar yang diterapkan di sekolah dan di luar sekolah. Artinya bahwa kesuksesan anak-anak dalam menempuh pendidikan dan aktivitas belajarnya sebenarnya sangat tergantung oleh berbagai kondisi baik faktor yang bersifat internal maupun eksternal yang meliputi aspek psikologis, sosial, ekonomi, kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan jasmani/ fisik dan sebagainya.

Kondisi krisis ekonomi makro yang melanda negeri ini dalam kurun beberapa tahun belakangan ternyata telah memberikan dampak terhadap kenaikan berbagai harga kebutuhan bahan pokok. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan keluarga-keluarga miskin menghadapi tekanan ekonomi

yang luar biasa dahsyatnya tetapi juga menyebabkan kian meluasnya fenomena kemiskinan yang pada gilirannya menyebabkan kelangsungan pendidikan anak menjadi terganggu. Meski pemerintah telah menggulirkan berbagai program beasiswa, pemberian subsidi biaya minimal dan subsidi lain di bidang pendidikan tetapi imbas krisis ekonomi akibat kenaikan berbagai bahan kebutuhan pokok dan sulitnya untuk memperoleh pekerjaan secara ekonomi telah memukul kehidupan keluarga miskin baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Tidak jarang keluarga miskin dihadapkan pada situasi dilematis apakah anak harus konsentrasi secara penuh menempuh pendidikan di sekolah dan belajar di rumah atau bekerja membantu orang tua untuk mencari nafkah.

Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas juga seringkali dijumpai anak-anak di usia sekolah yang harus menanggung beban ganda yang sulit bahkan harus mereka hadapi secara bersamaan. Dalam kondisi yang paling buruk maka anak-anak pada usia sekolah ini biasanya dihadapkan pada pilihan pragmatis yakni putus sekolah atau mengorbankan prestasi belajar mereka di sekolah. Di berbagai wilayah baik di perkotaan maupun di pedesaan juga kerap ditemukan fenomena anak-anak yang nilai ulangan dan rapor atau prestasi belajarnya tidak bagus bahkan tidak naik kelas, karena kesempatan untuk belajar sangat terbatas. Di samping itu kebiasaan belajar yang kurang baik juga sering ditemukan karena aspirasi orang tua mereka yang rendah terhadap arti penting pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Bagi keluarga miskin anak-anak usia sekolah yang terpaksa bekerja pada usia dini mudah ditemukan dan kondisi seperti ini tidak hanya mengganggu proses tumbuh kembang dan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tetapi yang lebih serius mereka acapkali juga menjadi korban eksploitasi dan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak anak yang mendasar. Jam kerja yang panjang, kesempatan belajar yang hilang dan masa depan yang tidak jelas merupakan fenomena umum yang kerap dihadapi anak-anak dari keluarga miskin baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.

Selanjutnya pada bagian berikut ini hendak dipaparkan situasi problematik yang dihadapi oleh anak-anak usia sekolah yang menyebabkan mereka kerap kali membolos sekolah, kesulitan belajar baik di sekolah maupun di rumah, pernah tidak naik kelas sehingga menjadi anak yang rawan putus sekolah (drop out). Secara lebih rinci pada bagian berikut ini hendak mendeskripsikan karakteristik atau profil anak-anak yang pernah tidak naik kelas sehingga rawan putus sekolah (drop out) dan latar belakang kehidupan sosial ekonomi orang tua anak-anak yang rawan putus sekolah dan pernah tidak naik kelas. Selain itu pada bagian ini juga hendak dipaparkan perihal pola dan aktivitas belajar serta kendala yang dihadapi anak-anak yang rawan putus sekolah, prestasi anak selama di sekolah, peran orang tua dalam mendukung kegiatan belajar, serta berbagai jenis kebutuhannya yang diharapkan oleh anak-anak rawan putus sekolah agar kelangsungan pendidikan mereka terjaga dan prestasi



belajarnya meningkat. Penelitian di lakukan di 3 wilayah di propinsi Jawa Timur yakni di kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Di 3 wilayah kabupaten/ kota tersebut diwawancarai sebanyak 150 anak yang pernah tidak naik kelas dan rawan DO yang tersebar di berbagai kecamatan dan desa yang ada di wilayah kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kota Pasuruan.

1. Profil Anak Rawan Putus Sekolah dan Orang Tuanya

Di kalangan keluarga miskin baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan anak-anak usia sekolah yang kerap membolos sekolah, nilai rapor tidak bagus dan pernah tidak naik kelas sehingga terkategori sebagai siswa yang rawan putus sekolah merupakan kondisi khas yang tidak jarang dijumpai. Kondisi siswa yang kerap membolos, nilai ulangan dan rapor yang buruk, pernah tidak naik kelas merupakan perkembangan kemajuan belajar siswa yang dapat mengantarkan anak rawan DO atau putus sekolah. Seorang siswa yang tidak naik kelas jika tidak memperoleh perhatian dan pendekatan yang positif dari guru dan sekolah bukan tidak mungkin mereka akan memilih untuk putus sekolah di tengah jalan sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan program suatu sekolah secara utuh yang berlaku sebagai suatu sistem.

Kendati tidak selalu benar tetapi bagi siswa yang mengulang kelas atau tidak naik kelas bukan tidak mungkin akan menjadi kondisi awal bagi seorang anak untuk menghentikan aktivitas sekolah dan belajarnya serta menjadi anak yang putus sekolah. Meski faktor penyebab siswa tinggal kelas dan rawan DO cukup beragam, tetapi banyak studi memperlihatkan bahwa keterlibatan anak usia sekolah dalam dunia kerja untuk membantu orang tua mencari nafkah merupakan salah satu factor serius yang menyebabkan anak-anak konsentrasinya terganggu dalam menempuh pendidikan. Karena sibuk bekerja membantu orang tua mencari nafkah anak-anak tidak memiliki waktu yang cukup untuk sekolah dan belajar di rumah sehingga mempersempit kesempatan anak untuk menikmati pendidikan secara optimal. Anak-anak kerap kali merasa terganggu memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan tidak saja ketika mereka belajar di sekolah melainkan juga belajar di rumah termasuk membaca dan mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru (Darmaningtyas; 1999). Selain itu aktivitas bekerja yang dilakukan anak-anak usia sekolah juga memungkinkan anak terdampar dalam berbagai kegiatan orang dewasa yang dapat merugikan perkembangan mental, moral, spiritual serta perkembangan sosial anak (Pardoen dkk: 1996).

Jika memperhatikan anak-anak usia sekolah yang rawan putus sekolah dan pernah tidak naik kelas ternyata usianya relative beragam. Pada keluarga miskin memang diakui ada kecenderungan usia anak tidak naik kelas terjadi sejak dini karena membantu orang tua bekerja. Dari hasil penelusuran lapangan yang dilakukan di beberapa wilayah di propinsi Jawa Timur ditemukan bahwa anak yang rawan DO dan pernah

tidak naik kelas sebagian besar berusia 13-14 tahun (40%). Sementara itu sebanyak 31,3% mereka berusia antara 11-12 tahun. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan sebanyak 28,7% anak yang rawan DO dan pernah tidak naik kelas berusia 15-16 tahun.

Memperhatikan variasi sebaran usia anak-anak yang rawan DO dan pernah tidak naik kelas yang ditemui di berbagai wilayah penelitian ternyata mayoritas dialami oleh siswa dengan pendidikan setingkat SD terutama di kelas 5 dan kelas 6 serta SMP pada jenjang kelas 1 (sebanyak 20%) dan kelas 2 (sejumlah 40%). Sebagaimana dipahami bahwa anak-anak usia SD biasanya berkisar antara 11-12 tahun, sementara itu mereka yang berusia SMP biasanya usianya berkisar antara 13-15 tahun. Berdasarkan data ini nampak bahwa sejak dini ternyata anak-anak yang menjadi responden dalam penelitian ini telah memiliki pengalaman sekolah yang kurang menyenangkan karena pernah tidak naik kelas dan rawan putus sekolah atau DO.

Diakui bahwa secara ideal memang anak-anak pada usia sekolah seharusnya lebih memfokuskan perhatian pada aktivitas belajar baik di sekolah maupun di rumah untuk meraih masa depan yang jauh lebih baik. Tetapi fakta yang ada menemukan cukup banyaknya anak-anak usia sekolah yang harus membagi waktunya dengan aktivitas di luar sekolah bahkan tidak sedikit yang harus terlibat dalam dunia kerja untuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Berkembangnya anggapan di kalangan orang tua bahwa anak sejak dini harus diperkenalkan dengan dunia kerja dan harus diajari tanggung jawab baik terhadap diri maupun keluarga memicu merebaknya fenomena anak yang harus menanggung beban ganda (*double burden*) yakni anak yang secara bersamaan harus serius belajar dan bekerja membantu orang tua mencari nafkah.

Dari data yang berhasil dihimpun dalam kegiatan lapangan juga menemukan sebanyak 70% anak yang pernah tidak naik kelas dan rawan DO berjenis kelamin laki-laki dan sejumlah 30% perempuan. Fakta ini mengindikasikan bahwa anak-anak laki-laki ada kecenderungan lebih banyak yang tidak pernah naik kelas dan terancam putus sekolah dibandingkan dengan anak perempuan. Terlepas dari persoalan psikologis bahwa pada umumnya anak-anak perempuan memiliki karakter yang lebih telaten dan rajin, dibandingkan dengan anak laki-laki, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa konsentrasi anak laki-laki untuk belajar biasanya juga terganggu oleh peran yang dibebankan orang tua yakni harus bekerja membantu orang tua mereka. Terutama di daerah pedesaan anak laki-laki biasanya memiliki peran yang lebih menonjol dalam keluarga karena adanya pandangan bahwa anak laki-laki kelak akan menjadi tulang punggung keluarga, pengganti kepala keluarga dan harus dapat melindungi keluarga oleh karenanya sejak dini harus belajar bertanggung jawab terhadap keluarga termasuk bekerja sejak usia anak-anak.

Apabila diamati secara kronologis proses anak yang rawan DO biasanya diawali dengan tumbuhnya sifat kemalasan anak untuk bersekolah, tidak tertib mengikuti pelajaran di sekolah dan enggan

mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kalapun anak masuk sekolah biasanya hanya sekedar masuk sekolah dan mendengar guru mengajar di kelas tanpa diikuti keseriusan selama menerima pelajaran di kelas. Ketika anak tidak serius belajar dan malas belajar maka hampir dapat dipastikan prestasi belajarnya pun juga menjadi rendah.

Anak-anak yang rawan putus sekolah atau *drop out (DO)* juga ditandai oleh kondisi seringnya anak tidak masuk sekolah dengan berbagai alasan. Pengaruh keluarga dan pengaruh teman sebaya sangat menentukan kehadiran dan kemajuan serta prestasi anak di kelas. Anak-anak yang rawan DO atau putus sekolah biasanya terjadi pada anak-anak yang prestasi belajarnya rendah dan pernah tidak naik kelas. Rendahnya prestasi belajar anak sesungguhnya juga dipengaruhi oleh tidak tertib dan disiplinnya anak belajar di rumah. Selain itu juga bisa disebabkan oleh kurangnya bahkan tidak adanya dukungan dari orang tua, saudara serta lingkungan teman sebaya. Bagaimanapun juga dalam proses pendidikan pengawasan orang tua sangat dibutuhkan dan pengaruh positif dari teman sebaya yakni dengan menciptakan suasana belajar yang kondusif juga sangat diperlukan.

Anak-anak yang rawan DO karena pernah tidak naik kelas, prestasi belajar yang rendah dan sering membolos biasanya juga terjadi pada anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi lemah dan berasal dari keluarga yang tidak teratur. Akibat kondisi ekonomi yang lemah acapkali anak-anak dilibatkan dalam dunia kerja untuk membantu ekonomi keluarga sehingga arti pendidikan bagi keluarga seperti ini tidak lagi dimaknai sebagai upaya untuk meraih masa depan yang lebih baik tetapi pendidikan secara ekonomi justru dianggap membebani keluarga sebab memerlukan biaya yang sangat tinggi.

Secara obyektif memang diakui bahwa tidak selalu anak-anak dari keluarga miskin cenderung tinggal kelas dan rawan DO. Tetapi akibat tekanan kemiskinan dan latar belakang sosial orang tua yang umumnya kurang atau bahkan tidak berpendidikan maka kerap terjadi anak-anak mereka relatif ketinggalan dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Kondisi seperti ini tidak jarang pula menyebabkan tumbuhnya fenomena putus sekolah karena kedua orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyekolahkan anak dan aspirasi yang positif tentang makna pendidikan bagi masa depan anak-anaknya.

Kondisi tersebut tentu berbeda dengan anak-anak yang berasal dari keluarga yang secara ekonomi mapan dan terpelajar. Mereka biasanya sejak kecil sudah didukung oleh fasilitas belajar yang memadai mulai dari buku bacaan, meja belajar, hingga les tambahan diluar jam sekolah. Sementara itu anak-anak yang berasal dari keluarga miskin terutama di daerah pedesaan umumnya hanya memiliki fasilitas belajar yang pas-pasan. Buku tulis seadanya, tas yang sederhana dan yang memprihatinkan orang tua biasanya bersikap acuh tak acuh terhadap urusan sekolah anaknya, sehingga anak sendiri kemudian tidak pernah merasakan bahwa sekolah memang merupakan kebutuhan dan bagian yang sangat penting

bagi kehidupan dan masa depannya. Dengan latar belakang pendidikan yang relative rendah atau bahkan sama sekali tidak pernah sekolah, memang sulit berharap orang tua bersedia dan mampu bersikap responsif dan apresiatif terhadap pendidikan dan kegiatan belajar anak-anaknya.

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh dari penelusuran di lapangan ditemukan sebagian besar orang tua responden baik ayah atau ibu mereka ternyata berpendidikan sekolah dasar (SD) bahkan tidak tamat SD dan tidak sekolah. Secara persentatif terdapat sebanyak 32% responden yang menyatakan bahwa ayah mereka tidak tamat SD. Sementara itu sebanyak 22% responden mengaku ayahnya tamat SD dan sebanyak 15,3% responden mengatakan ayahnya tidak pernah sekolah. Data yang hampir sama juga terlihat pada kondisi ibu responden. Dari sejumlah 150 responden yang diwawancarai sebanyak 28% responden mengaku ibunya tidak pernah sekolah, sebanyak 21,3% responden mengatakan ibunya berpendidikan tidak tamat SD dan sebanyak 19,3% mengaku ibunya tamat SD. Selanjutnya berdasarkan data yang ada terlihat pula hanya sebagian kecil responden yang menyatakan bahwa ayah dan ibu mereka pernah menempuh pendidikan pada jenjang SMP dan SMA yakni kurang dari 20%. Dengan demikian memperhatikan data tersebut secara umum terlihat bahwa mayoritas orang tua responden yang berpendidikan relative rendah yakni hanya berpendidikan SD bahkan tidak sekolah. Sementara itu orang tua responden yang berpendidikan SMP dan SMA secara kuantitatif jumlahnya relatif sedikit yakni kurang dari 20%.

Suatu kekhawatiran besar sesungguhnya pantas muncul ketika memperhatikan data bahwa mayoritas responden ternyata dibesarkan dalam lingkungan keluarga dengan latar belakang pendidikan orang tua yang terbatas. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya menumbuhkan sikap positif terhadap pendidikan dan mengharapakan mereka dapat apresiatif terhadap arti penting pendidikan jika pendidikan orang tua umumnya rendah. Kondisi ini kian diperparah oleh situasi tekanan ekonomi akibat kemiskinan yang dihadapi oleh keluarga responden. Karena kondisi ekonomi yang terbatas tidak sedikit anak-anak yang kemudian bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Padahal ditinjau dari aspek usia umumnya ayah dan ibu responden mayoritas masih berada pada usia produktif. Dari 150 responden anak yang ditemui sebanyak 59,3% mengaku ayah mereka usianya masih 50 tahun kebawah. Sementara itu sebanyak 67,3% responden menyatakan bahwa ibu mereka berusia 46 tahun kebawah. Artinya dari aspek usia sebenarnya ayah dan ibu responden masih memiliki kemampuan untuk terus berupaya secara maksimal agar mereka dapat memperoleh penghasilan yang mencukupi, tanpa harus melibatkan anak-anaknya bekerja. Namun sebagaimana dipahami bahwa dalam konteks sosio kultural terutama di daerah pedesaan dan keluarga miskin kecenderungan untuk melatih anak bekerja sejak dini merupakan hal yang sudah sangat lazim dilakukan. Pada saat anak sudah mulai bisa diajak berdiskusi dan memahami perintah serta secara fisik dinilai sudah agak besar maka pada saat itu biasanya orang

tua secara perlahan akan mulai melatih anak-anaknya untuk membantu aktivitas orang tua termasuk kegiatan produktif.

Tahapan awal biasanya anak-anak diperkenalkan dengan jenis pekerjaan domestik kerumah tanggaaan seperti membersihkan rumah, mencuci piring dan gelas, memasak, mencuci baju dan sebagainya, tetapi setelah dinilai secara fisik telah cukup kuat maka anak-anak kerap kali dilibatkan dalam aktivitas ekonomi produktif yang menghasilkan uang. Fakta yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagian besar responden selama ini telah bekerja pada usia yang sangat dini yakni suaia 12-13 tahun (61,3%). Bahkan sebanyak 22,7% responden mengaku telah bekerja sejak mereka berusia 10 - 11 tahun. Sementara itu sebanyak 16,05% responden mengatakan bahwa usia mereka pertama kali bekerja adalah 14-15 tahun.

Menurut pengakuan responden dalam keseharian mereka menghabiskan waktu untuk bekerja cukup bervariasi mulai hanya 2 jam sehari sampai dengan 4 jam sehari. Meski demikian dari data yang ada ada ternyata anak-anak umumnya bekerja 2 atau 3 jam dalam sehari. Sebanyak 42,7% responden mengaku bekerja selama 2 jam dalam sehari dan sebanyak 37,3% mengaku bekerja selama 3 jam sehari. Meski demikian sebanyak 20% responden mengaku bahwa selama ini mereka bekerja 4 jam dalam sehari.

Dengan bekerja selama 2 sampai dengan 4 jam sehari mereka memperoleh penghasilan dalam jumlah relative beragam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan sebanyak 43,3% responden mengaku dalam setiap bulan memperoleh penghasilan sekitar 70 ribu rupiah sampai dengan 100 ribu rupiah. Sementara itu sebanyak 19,4% responden mengaku memperoleh penghasilan diatas 100 ribu rupiah sampai dengan 130 ribu rupiah setiap bulannya. Ada sebanyak 20% responden mengatakan bahwa selama ini mereka memperoleh penghasilan berkisar antara diatas 130 ribu sampai dengan 160 ribu rupiah setiap bulannya dan sebanyak 15,3% responden mengatakan bahwa mereka memperoleh income diatas 160 ribu rupiah sampai dengan 190 ribu rupiah. Bagi anak-anak dari kalangan keluarga miskin jumlah penghasilan sebanyak itu tentu cukup bermakna, terlebih dalam situasi krisis ekonomi yang terkadang membuat sebagian orang tua responden kesulitan memperoleh penghaslan secara optimal. sponden Penghasilan yang mereka dapatkan tidak saja dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan responden sendiri tetapi kadang mereka juga memberikan sebagian penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Menurut pengakuan responden selama ini jenis pekerjaan yang mereka tekuni juga relative beragam, tidak hanya sekedar membantu orang tua tetapi juga bekerja ikut orang lain. Menurut catatan yang ada sebanyak 53,3% responden mengaku saat ini bekerja ikut orang lain. Sementara itu sebanyak 28% responden mengatakan bahwa mereka selama ini bekerja membantu orang tua dan sejumlah 18,7% responden

mengaku bekerja sendiri. Jenis pekerjaan yang ditekuni juga sangat bervariasi antara lain; bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, perikanan atau nelayan, industri kecil, sektor informal, wiraswasta dan pedagang. Meski jenis pekerjaan yang ditekuni anak-anak yang tergolong rawan DO cukup beragam tetapi secara persentatif sebanyak 26,7% responden mengaku selama ini bekerja di sektor informal. Sementara itu sebanyak 14,7% bekerja di sektor peranian, 14,7% di sektor industri kecil, 20% sebagai pedagang dan sebanyak 16,7% responden bekerja di sektor perikanan yakni membantu dalam aktivitas kehidupan nelayan.

Tabel V.1
Identitas Responden dan Latar Belakang Belakng Sosial Orang Tua
(Dinyatakan dalam persen dengan N=150)

Jenis kelamin responden	Laki-laki	70.0%
	Perempuan	30.0%
Umur	11-12 tahun	31.3%
	13-14 tahun	40.0%
	15-16 tahun	28.7%
Pendidikan saat ini	SD:	
	Kelas 5	20.0%
	Kelas 6	10.0%
	SLTP:	
	Kelas 1	20.0%
	Kelas 2	40.0%
Kelas 3	10.0%	
Pendidikan ayah	Tidak sekolah	15.3%
	SD tidak tamat	32.0%
	Tamat SD	22.0%
	SLTP tidak tamat	14.0%
	Tamat SLTP	9.3%
	SLTA	7.3%
Pendidikan ibu	Tidak sekolah	28.0%
	SD tidak tamat	21.3%
	Tamat SD	19.3%
	SLTP tidak tamat	14.0%
	Tamat SLTP	12.7%
	SLTA	4.7%
Usia ayah	36-40	24.7%
	41-45	13.3%
	46-50	21.3%
	51-55	24.0%
	56-60	8.7%
	>60	8.0%
Usia ibu	32-36	21.3%
	37-41	18.0%
	42-46	28.0%
	47-51	32.0%
	>51	0.7%

Meski bagi responden aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan dinilai cukup berat apalagi harus dibarengi dengan kegiatan belajar tetapi menurut pengakuan responden sampai saat ini mereka masih menjalaninya. Bagi responden meski bekerja dinilai cukup berat tetapi karena sifatnya yang temporer mereka sampai saat ini masih

melakukannya karena bisa menghasilkan uang. Sebagaimana diakui oleh sebagian besar anak-anak yang ditemui dalam penelitian ini bahwa status pekerjaan yang ditekuni selama ini bersifat kadang-kadang saja yakni mereka bekerja membantu jika ada tetangga atau orang lain yang meminta bantuan (50%). Sementara itu sebanyak 30% mengaku secara rutin bekerja tiap hari dan sebanyak 20% responden mengatakan pekerjaan yang ditekuni bersifat serabutan atau tidak tentu.

Sebagaimana pengalaman yang pernah dijalani oleh anak-anak yang menjadi responden dalam penelitian ini bahwa mereka biasanya membantu bekerja dengan mengerjakan beberapa pekerjaan yang tergolong ringan dan mudah. Di kalangan keluarga buruh tani atau petani dengan lahan sempit biasanya anak-anak sejak kecil sudah akrab dengan lahan persawahan dan perladangan. Membantu orang tua menjemur padi, menanam padi, membawa peralatan pertanian sampai dengan memanen adalah kebiasaan yang kerap dijalani anak-anak di daerah pedesaan. Sementara itu anak-anak yang berasal dari keluarga nelayan biasanya mulai diperkenalkan dengan jenis pekerjaan komunitas pantai seperti membantu membawa ikan, membersihkan jaring, menjemur ikan dan sejenisnya. Dengan demikian sejak awal ketika anak-anak dilibatkan dalam aktivitas ekonomi produktif biasanya mereka memulainya dengan jenis pekerjaan yang mudah dan ringan kemudian secara perlahan semakin berat sampai pada akhirnya apa yang dikerjakan anak-anak tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang dewasa.

Anak-anak biasanya dilibatkan dalam aktivitas ekonomi produktif jika mereka secara fisik dinilai telah siap dan cukup kuat untuk mengerjakannya. Selain itu daya tahan anak-anak juga diamati dan jika menurut orang tua dianggap si anak memiliki daya tahan yang memadai maka anak-anak akan diberikan beban kerja yang lebih berat. Orang tua tidak jarang berpendapat bahwa anak-anak sejak usia dini harus dilatih agar tidak malas bekerja secara mandiri. Tidak sedikit orang tua yang berpendapat anak-anak juga perlu diperkenalkan pada dunia kerja agar kelak setelah dewasa terbiasa dengan kerja keras, tidak malas, tidak manja dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Dalam berbagai penelitian memang telah terbukti bahwa keterlibatan anak-anak dalam dunia kerja memang telah cukup lama dilakukan. Bahkan pada usia belum genap 10 tahun yakni pada usia 8 tahun atau 9 tahun anak-anak seringkali telah dilibatkan dalam dunia kerja untuk membantu mencari nafkah orang tuanya. Anak-anak yang masih bersui sekolah tidak sedikit yang terlibat dalam aktivitas di berbagai sektor seperti; pertanian, perikanan, industri kecil, bahkan ada juga yang telah bekerja di sector industri sebagai buruh pabrik. Bagi orang tua mengajak anak untuk bekerja baik di pertanian maupun perkebunan ataupun sektor yang lain dinilai lebih baik daripada anak-anak mereka pergi bermain yang tidak ada tujuan yang jelas dan tanpa pengawasan orang tua.

BAB 6

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Problematika dan Kendala Pengembangannya

Program pendidikan bagi anak-anak yang masih berusia dini (PAUD) merupakan upaya untuk melakukan pembinaan yang ditujukan terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Program pendidikan anak pada usia dini lazimnya dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui berbagai jalur baik jalur formal, nonformal, maupun informal.

Sebagaimana dipahami bahwa pendidikan anak pada usia dini merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar sekaligus merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik yakni koordinasi motorik dan kecerdasan yang meliputi; daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), kondisi sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) serta bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Perkembangan yang dimaksud adalah perubahan psikologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi psikis dan fisik pada diri anak, yang di tunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam peredaran waktu tertentu menuju kedewasaan dari lingkungan yang banyak berpengaruh dalam kehidupan anak menuju dewasa (Frida Fidayanti : 2011).

Dalam proses perkembangan yang meliputi perkembangan sikap, perilaku atau ketrampilan seyogyanya dimiliki oleh anak sesuai dengan usia atau fase perkembangannya. Perkembangan yang lazim dialami oleh seorang anak berkaitan dengan perubahan, persekolahan, pengalaman dan hal lainnya sebagai prasyarat untuk pemenuhan dan kebahagiaan hidupnya. Pada usia 0 sampai 6 tahun anak-anak sebenarnya menghadapi sejumlah proses perkembangan dan tahapan aktivitas yang meliputi; (a). aktivitas belajar berjalan; (b). belajar memakan makanan padat; (c). belajar berbicara; (d). belajar buang air kecil dan buang air besar; (e). belajar mengenal perbedaan jenis kelamin; (f). mencapai kestabilan jasmaniah fisiologis dan (g) belajar untuk membentuk konsep-konsep (pengertian) sederhana kenyataan sosial dan alam serta (h). belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara serta orang lain.



Merespon tahapan perkembangan anak seperti ini oleh karenanya pendidikan anak usia dini merupakan kebutuhan dasar yang diharapkan dapat memfasilitasi dan mendukung perkembangan anak-anak baik secara fisik, psikis maupun perkembangan sosial secara optimal. Diakui bahwa kendala dan hambatan yang dialami baik anak maupun orang tua dalam menghadapi fase perkembangan selama ini relative cukup kompleks dan tidak mudah untuk mengatasinya. Tetapi dengan keyakinan bahwa setiap anak pasti memiliki sisi positif dan mereka bisa berubah ke arah yang jauh lebih baik maka segala upaya untuk mengembangkan sikap dan perilakunya harus ditangani secara serius. Dalam kenyataan tidak jarang ditemukan bagaimana sulitnya anak ketika harus memasuki lingkungan baru yakni lembaga pendidikan (PAUD) ia kemudian harus beradaptasi terhadap institusi ini. Sikap dan perilaku resisten kerap kali ditemui seperti; seorang anak ketika memasuki ruang belajar dengan menangis dan meronta terus ingin didampingi oleh orang tuanya. Sementara itu anak yang lain tidak bisa berkomunikasi atau bermain dengan teman sebayanya, pendiam, tidak bisa membaca, berhitung dan berbagai jenis kasus yang lainnya. Namun demikian setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan anak-anak ini mulai terbiasa dalam kegiatan dan permainan yang diberikan oleh pengajar atau pendamping sehingga tidak jarang anak-anak semakin *enjoy* beraktivitas dan bermain pada lembaga pendidikan anak usia dini.

Memperhatikan kenyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa melalui PAUD anak belajar bersosialisasi, menghadapi masalah, belajar mandiri, percaya diri, berinteraksi dengan sesama teman dan sebagainya sebagai modal utama bagi anak untuk memasuki dunia yang lebih kompleks dan luas. Oleh sebab itu dalam upaya pembentukan karakter dan kepribadian anak PAUD memegang peranan yang sangat penting dan strategis.

Jika disimak secara historis sesungguhnya isu tentang pendidikan anak usia dini telah cukup lama didengungkan. Menurut catatan sejak tahun 2002 program *Education For All (EFA)* telah diratifikasi oleh sebanyak 62 negara. Dalam pertemuan yang diselenggarakan di kota Dakar, Afrika hadir sejumlah Menteri Pendidikan untuk kepentingan membahas persoalan pendidikan di dunia. Salah satu agenda pembicaraan pada waktu itu membahas permasalahan cukup menarik yakni pendidikan untuk semua. Program ini sebenarnya dirancang untuk memberikan hak untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan atau faktor apapun. Artinya seluruh masyarakat dunia khususnya yang berusia sekolah diberikan hak dan kesempatan untuk memiliki akses terhadap sector pendidikan. Negara Indonesia pada saat itu menyepakati dan turut menandatangani deklarasi tersebut. Oleh sebab itu adalah suatu kewajiban jika pemerintah mengimplementasikan program pendidikan untuk semua ke seluruh negeri ini tidak terkecuali dengan propinsi Jawa Timur.

1. Arti Penting dan Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Sebagaimana diungkapkan pada bagian terdahulu bahwa program pendidikan untuk semua telah diratifikasi hampir 10 tahun oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Secara garis besar dalam program *education for all* atau pendidikan untuk semua terdapat 6 kegiatan atau program yang diharapkan dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Program yang dimaksud antara lain; (1). pengentasan buta huruf; (2). Pendidikan anak usia dini (PAUD); (3) program wajib belajar selama 9 tahun; (4). Pendidikan yang berorientasi pada Life skill yakni pendidikan yang berfungsi mempersiapkan pendidikan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak dan memberikan kegiatan sesuai dengan kompetensinya; (5). Peningkatan mutu atau kualitas pendidikan menyangkut soal kualitas guru dan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah serta memfungsikannya secara optimal dan (6). Kesetaraan jender. Semangat dan pelaksanaan sejumlah program tersebut sebenarnya telah lama dimulai, tetapi baru tahun 2006 keluar Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 yang isinya tentang percepatan penuntasan buta aksara dan percepatan wajib belajar 9 tahun. Sebenarnya Instruksi Presiden tersebut hanya berisi 2 hal yakni penuntasan buta aksara dan percepatan wajib belajar 9 tahun. Meski demikian bukan berarti program yang lainnya tidak dilaksanakan. Melalui Inpres tersebut memberikan makna bahwa dalam waktu yang relative singkat diharapkan penuntasan buta aksara segera terealisasi dan program wajib belajar 9 tahun juga terlaksana. Disamping itu program-program yang lainnya juga tetap dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan misi dari program besar pendidikan untuk semua.

Sebagaimana tercantum dalam program pendidikan untuk semua salah satu sasaran yang menjadi fokus perhatian penting adalah pendidikan anak usia dini (PAUD). Program ini merupakan program pendidikan untuk anak usia balita atau usia 0-6 tahun yang dibagi menjadi 2 bentuk yakni; (a). pendidikan non formal untuk anak-anak usia 2 sampai dengan 4 tahun dan pendidikan formal bagi anak-anak yang telah berusia 4-6 tahun. Secara teoritik program pendidikan bagi anak usia dini merupakan program yang sangat penting mengingat pada usia dini tersebut anak lebih mudah untuk menangkap apa yang mereka amati atau mereka lihat maupun mereka dengar. Masa-masa tersebut tergolong sebagai masa usia emas (*golden age*) yang biasanya terjadi ketika anak berusia antara 0-5 tahun. Oleh sebab itu jika pendidikan anak usia dini diperhatikan niscaya persiapan anak untuk memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi akan jauh lebih baik.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) sendiri dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 2 bentuk yakni yang bersifat non formal dan formal. Pendidikan yang bersifat Non Formal diberikan pada anak usia 2-4 tahun dan dalam implementasinya program pendidikan anak usia dini diharapkan dapat memanfaatkan lembaga lokal yang selama ini dapat berfungsi dan berperan baik di lingkungan masyarakat seperti; Posyandu. Kegiatan Posyandu dinilai lembaga dalam masyarakat yang paling ideal

dapat mendukung kegiatan PAUD sebab kegiatan posyandu dikenal telah melembaga dengan baik di lingkungan masyarakat. Dengan demikian kegiatan Posyandu yang biasanya dimotori oleh para ibu PKK dan kader posyandu tersebut ke depan diharapkan tidak hanya mengurus soal kesehatan dan gizi masyarakat atau anak usia balita tetapi juga dapat diselingi dengan kegiatan PAUD. Materi pendidikan yang ditawarkan pada program PAUD dapat juga dirancang melalui permainan-permainan sehingga menarik perhatian anak-anak balita. Intinya anak-anak balita diharapkan belajar melalui kegiatan bermain atau bermain sambil belajar. Melalui permainan anak-anak diharapkan dapat lebih mudah memahami dan mengerti serta mengingat segala hal yang dialami ketika mengikuti program PAUD.

Selain posyandu lembaga lokal yang kemungkinan dapat dimanfaatkan adalah tempat penitipan anak atau TPA dan play group atau kelompok bermain. Sementara itu untuk pendidikan anak usia dini yakni antara 4-6 tahun materi PAUD diberikan melalui pendidikan formal taman kanak-kanak (TK). Bentuk pembelajaran yang diberikan juga lebih ke arah bermain untuk belajar. Artinya anak-anak tidak diberikan pelajaran dalam bentuk yang baku seperti layaknya usia dewasa tetapi materi pembelajaran dimasukkan dalam koridor bermain atau saat mereka bermain.

Mengapa pendidikan anak usia dini begitu penting untuk diperhatikan? Sebagaimana dijelaskan per teori bahwa usia prasekolah (0-6 tahun) merupakan masa penting untuk perkembangan intelektual seseorang. Kondisi yang optimal pada saat anak berusia dini sangat menentukan tingkat keberhasilan pendidikannya di usia yang lebih lanjut. Perkembangan yang baik ditentukan oleh beberapa aspek diantaranya adalah adanya dukungan kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial yang cukup pada saat pertumbuhan dan perkembangan di usia dini ini. Harus diakui bahwa dukungan pelayanan kesehatan dan gizi bagi anak (usia dibawah 5 tahun) kerap kali di berikan dalam bentuk fasilitas tetapi yang paling sering di temukan adalah posyandu. Stimulasi dan pendidikan usia dini diberikan melalui berbagai pusat pendidikan pra sekolah seperti kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Namun umumnya pelayanan ini sering tidak seragam, terkotak-kotak dan tidak terintegrasi, sehingga sulit untuk memberikan kualitas kesehatan dan pendidikan yang optimal. Terlebih lagi cakupan pelayanan pendidikan usia dini pada anak di Indonesia masih sangat kurang. Diperkirakan hanya sekitar 27 persen anak usia dibawah 0-6 tahun yang mendapatkan sejenis pelayanan pendidikan anak usia dini ini.

Memperhatikan berbagai problematika yang menyangkut soal pendidikan tersebut maka sejak awal tahun 2006 pemerintah dengan dukungan dari UNICEF memiliki komitmen bersama dalam upaya mengembangkan program kesehatan dan pendidikan yang komprehensif. Program dimaksud adalah program meliputi kesehatan dan pendidikan bagi anak usia dini di daerah pedesaan dengan memanfaatkan keberadaan pusat-pusat pelayanan anak usia dini yang sudah ada. Oleh karena itu

agar program yang dijalankan dapat terlaksana dan mencapai sasaran maka sangat diperlukan informasi mengenai kebutuhan dan kesiapan masyarakat untuk menerima program ini. Berkaitan dengan persoalan tersebut maka penelitian tentang pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat berkaitan dengan pendidikan anak dan kesehatan anak usia dini sangat penting dilakukan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan program kesehatan dan pendidikan anak usia dini yang komprehensif dan sesuai dengan persepsi dan kebutuhan masyarakat.

2. PAUD Sebagai Wadah Pembangunan Sumber Daya Manusia Sejak Usia Dini

Pendidikan sebenarnya dapat dimaknai sebagai usaha sadar untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan terjadi perkembangan optimal dari potensi yang dibawa lahir peserta didik sejak dini (Sujiono: 2009). Karena merupakan suatu usaha sadar, maka untuk menyediakan suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia dini, pemerintah dan masyarakat wajib berpartisipasi dan bertanggung jawab agar perkembangan anak-anak di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Mengingat di propinsi Jawa Timur jumlah anak usia dini relative cukup banyak maka pendidikan yang dikhususkan untuk anak-anak berusia dini perlu diperhatikan. Dalam perkembangannya tanggung jawab dalam menumbuh-kembangkan PAUD yang berkualitas telah dilaksanakan bukan saja oleh pemerintah (formal) tetapi telah merambah sampai kepada kesadaran yang murni dari masyarakat (non formal). Artinya tanggung jawab dalam membina perkembangan pendidikan bagi anak usia dini telah mengalami perkembangan yang pesat, atau dapat dikatakan telah mengalami perubahan paradigma dari pendidikan yang menjadi tanggung jawab orang tua telah meluas menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain PAUD telah menjadi tanggung jawab bersama, orang tua, masyarakat dan pemerintah sebagai suatu dasar yang kokoh dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak.

Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian terdahulu bahwa pemerintah dan masyarakat juga turut berperan atas perkembangan PAUD, dan sebagai bukti kongkrit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya dalam pasal 28 ayat 1 telah dinyatakan secara tegas bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Dalam Bab I pasal 1 ayat 14 USPN (dalam Sujiono, 2009); juga ditegaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.



BAB 7

Kesimpulan dan Rekomendasi

Anak-anak dari keluarga miskin, siswa yang tinggal kelas, dan terlebih anak yang sudah terlanjur putus sekolah sesungguhnya adalah bagian dari kelompok anak-anak yang bernasib malang dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Kekeliruan kita di masa lalu adalah menganggap masalah anak-anak malang ini akan dapat terselesaikan dengan sendirinya setelah persoalan kemiskinan dapat diatasi dan stabilitas politik berhasil diciptakan. Pengalaman di masa lalu – diakui atau tidak – telah mengajarkan kepada kita bahwa masalah anak rawan adalah sebuah isu spesifik yang perlu ditangani secara khusus, berkesinambungan dan membutuhkan kesabaran yang benar-benar ekstra, karena ada banyak faktor dan jenjang masalah yang mesti diurai satu per satu sebelum kita dapat memahami akar masalah yang sebenarnya dari masalah krusial yang satu ini.

Di bab-bab terdahulu telah banyak diuraikan bahwa faktor penyebab siswa rawan DO dan anak putus sekolah dan memilih bekerja mencari nafkah bagi orang tuanya, ternyata bukan sekadar karena tekanan kemiskinan atau hanya kesalahan pada anak didik itu sendiri – seperti malas belajar, tidak cerdas, dan lain sebagainya – melainkan lebih karena faktor-faktor yang sifatnya struktural dan kultural (non-ekonomi), termasuk pula karena kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan yang sifatnya a-historis, yang cenderung menyeragamkan program-program intervensi, sehingga anak-anak justru merasa teralienasi dengan kegiatan belajar-mengajar daripada memahami sekolah sebagai eksalator untuk memperbaiki masa depan. Di mata anak, belajar dan bersekolah akhirnya bukan dipahami sebagai hak yang semestinya mereka perjuangkan, tetapi justru acapkali dirasakan sebagai beban yang mengganggu atau sekurang-kurangnya dipandang kurang relevan sebagai modal sosial untuk memasuki masa depan mereka setelah dewasa kelak.

Dari hasil survei dan wawancara mendalam di lapangan diketahui bahwa di kalangan keluarga miskin, anak umumnya memiliki nilai guna ekonomis dan fungsi substitutif yang sangat strategis untuk memperkuat penyangga ekonomi keluarga. Selama ada di rumah, anak bukan saja disosialisasi dan dituntut untuk membantu orang tua menyelesaikan tugas-tugas domestik, melainkan juga disosialisasi untuk selalu menyadari bahwa bekerja dan membantu orang tua mencari nafkah adalah salah satu perwujudan konsep “anak yang berbakti” yang tak bisa ditawar-tawar, sekaligus bekal persiapan untuk menyongsong kehidupan berumah tangga.



Acap terjadi, di mata orang tua, kegiatan belajar dan bersekolah dianggap sebagai hal yang tak terlalu penting dibandingkan, misalnya dengan kewajiban untuk membantu orang tua bekerja di ladang, di laut, di tambak atau bekerja di tempat lain – asalkan menghasilkan uang dan menjadi bagian dari proses anak belajar mandiri. Bahkan, tak jarang terjadi pihak orang tua bersikap otoriter dan sepertinya tidak mau peduli terhadap urusan pendidikan anaknya: menyempit begitu saja anaknya di sekolah dan mengajak pulang untuk bekerja – meski mungkin si anak itu di sekolah sedang mengikuti kegiatan ulangan di sekolah. Tak jarang pula terjadi, belum lulus SD, anak-anak perempuan yang masih sedang senang-senanginya bermain dan berkumpul dengan teman-teman sebayanya di sekolah, dipaksa DO oleh orang tua untuk kemudian dinikahkan. Perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini adalah salah satu kebiasaan yang kontra-produktif bagi kelangsungan pendidikan anak, namun ironisnya hal ini diyakini sebagian besar masyarakat desa sebagai langkah investasi bagi masa depan anak-anaknya, khususnya anak perempuan.

Studi ini menemukan, selain mengencang ikat pinggang –hidup lebih irit dan makan seadanya–, mekanisme *survival* yang biasa dikembangkan masyarakat miskin di pedesaan agar tidak luluh dijejaskan tekanan krisis adalah mendayagunakan tenaga kerja anak secara lebih intensif. Bahkan, tak mustahil anak-anak dipaksa masuk pada sektor-sektor yang sebetulnya termasuk berbahaya dan sama sekali tidak layak dilakukan anak-anak. Di sini, masalahnya bukan sekadar pada beban jam kerja yang panjang, bahaya si anak terluka secara fisik, namun yang tak kalah penting adalah situasi krisis ternyata makin menyudutkan anak-anak yang terpaksa bekerja untuk masuk pada situasi dan posisi yang sangat rentan (*vulnerable*) untuk diperlakukan salah. Di samping itu, dengan makin besarnya tekanan dan dorongan agar anak-anak di usai yang masih dini untuk bekerja, maka hampir dapat dipastikan mereka akan makin jauh dari sekolah, dan ujung-ujungnya anak-anak itu terpaksa putus sekolah di tengah jalan.

Siapa yang mesti di salahkan jika terjadi anak terpaksa tinggal kelas atau putus sekolah karena tak kuat menanggung beban ganda yang berat: sekolah sembari bekerja? Bila tujuannya hanya sekadar untuk mencari kambing hitam, barangkali dengan cepat kita dapat menuding bahwa situasi ekonomi dan tekanan kemiskinanlah yang menyebabkan semua ini terjadi: masa depan anak menjadi makin buram dan bangsa Indonesia terancam kehilangan satu generasi. Namun, perlu disadari bahwa sikap mengalihkan tanggungjawab dan kesalahan semata hanya pada pihak lain sesungguhnya sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah. Untuk menangani persoalan kelangsungan pendidikan dan pekerja anak hingga tuntas dan mendongkrak gairah anak dan orang tua untuk menyekolahkan anaknya, tak pelak yang dibutuhkan adalah. Pertama, yang sebenarnya di balik kehidupan anak-anak rawan yang ada di sekitar kita. Kedua, merumuskan strategi dan menyusun program intervensi yang

benar-benar efektif dan kontekstual – sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak-anak rawan itu sendiri sebagai subyek yang hendak ditangani.

1. Kesimpulan: Sejumlah Isu Prioritas

Dari hasil studi yang telah dilakukan – pada batas-batas tertentu – telah dapat diketahui bahwa masalah anak di luar sekolah, anak putus sekolah dan persoalan siswa rawan DO sesungguhnya adalah masalah yang benar-benar sangat rumit, yang tak mungkin dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan yang sifatnya karitatif dan *top-down*. Pendekatan karitatif berupa pemberian bea-siswa, bantuan sembako, dan sejenisnya walau fungsional, tetapi dalam jangka panjang dikhawatirkan dapat menimbulkan ketergantungan baru yang menghilangkan mekanisme *self-help* masyarakat. Sedangkan, pendekatan *top-down* yang sifatnya seragam dan massal, selain tidak kontekstual, sering terjadi tidak mampu merangsang tumbuhnya apresiasi dan respons masyarakat secara memadai, sehingga dikhawatirkan rawan bias dan penyimpangan akibat tidak adanya kontrol di tingkat lokal. Untuk dapat menyusun kebijakan dan program intervensi yang kontekstual, karena itu sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu masalah-masalah apa sebenarnya yang menjadi akar persoalan dari makin merebaknya jumlah pekerja anak dan peningkatan angka DO di daerah pedesaan.

1. Tekanan kebutuhan hidup dan proses pendalaman kemiskinan, secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan keluarga miskin memilih untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jangka pendek dan pragmatis – khususnya makan dan uang – daripada melakukan investasi jangka panjang menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, yang dinilai tidak fungsional. Dalam situasi normal saja, banyak di antara keluarga miskin yang kehidupan sehari-harinya pas-pasan dan terpaksa melibatkan anak untuk ikut mencari tambahan pendapatan. Ketika tekanan kemiskinan dirasa makin berat, maka bisa dipahami jika keluarga-keluarga miskin tersebut kemudian *collapse* dan berusaha bertahan hidup dengan cara apapun, termasuk membiarkan anak-anaknya bekerja dalam sektor-sektor yang mungkin tergolong berbahaya.
2. Penyebab anak putus sekolah atau tinggal kelas adalah karena anak-anak dari keluarga miskin itu umumnya terpaksa bekerja untuk membantu orang tua, baik dalam kegiatan domestik rumah tangga maupun untuk pekerjaan di sektor publik yang menghasilkan pendapatan. Kewajiban untuk menjaga adiknya, kewajiban melakukan berbagai pekerjaan domestik di rumah, kewajiban untuk bekerja di laut, di ladang, mengembalakan ternak, dan lain-lain adalah beban hidup yang terpaksa ditanggung oleh anak-anak dari keluarga miskin, sehingga waktu luang anak itu menjadi sangat terbatas – yang

- dapat dimanfaatkan untuk belajar. Di kalangan keluarga miskin, sering terjadi anak diperlakukan sebagai tenaga substitusi ibu, sehingga mereka sejak dini biasanya sudah dilatih untuk dapat mengerjakan banyak hal, mulai dari urusan rumah tangga sampai ke urusan mencari penghasilan yang semestinya menjadi tanggungjawab penuh para orang tua. Dengan kata lain, bahwa baik sebagai pekerja keluarga maupun sebagai pekerja di sektor publik di luar keluarga, anak-anak ini umumnya tidak memiliki waktu yang cukup untuk dapat tumbuh-kembang secara wajar, karena sebagian besar waktu mereka tersita untuk terlibat dalam kegiatan produktif dan kegiatan kerumahtanggaan yang panjang.
3. Waktu yang dihabiskan anak untuk menonton televisi umumnya jauh lebih banyak daripada waktu untuk belajar. Di tengah minimnya sarana hiburan dan waktu yang cukup untuk beristirahat serta bermain, bagi anak-anak kehadiran berbagai acara hiburan yang ditayangkan televisi ibaratnya adalah air segar di masa paceklik yang kering dan panas. Di pedesaan, boleh dikata jam yang dimanfaatkan anak untuk menonton televisi hanya bisa dikalahkan dengan lama waktu yang digunakan anak-anak untuk tidur. Sementara itu, yang ironis, jam yang seharusnya dimanfaatkan anak untuk belajar ternyata hampir-hampir tidak ada. Suasana rumah yang tidak kondusif, minimnya buku-buku yang dimiliki, dan tidak adanya orang yang bisa dijadikan tempat bertanya, serta tidak adanya kontrol dari orang tua adalah faktor gabungan yang menyebabkan anak lebih terdorong (dan lebih senang) memanfaatkan waktu luang untuk bermain daripada belajar. Di pihak orang tua sendiri, mereka semestinya dapat membatasi dan bahkan melarang jika anak-anaknya menghabiskan waktu yang berlebihan untuk menonton televisi. Namun, karena mempertimbangkan bahwa menonton televisi adalah semacam bonus atau selingan bagi anak-anak setelah mereka lelah bekerja membantu orang tua, dan orang tua sendiri pada dasarnya juga sama-sama haus hiburan, maka kebutuhan anak dan sikap orang tua ini akhirnya menjadi saling membenarkan.
 4. Kecenderungan anak tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah sebagian besar disebabkan oleh pandangan orang tua dan anak tentang *value added* atau arti penting pendidikan, khususnya untuk jenjang SMP. Sebagian besar masyarakat umumnya berpandangan bahwa sekolah tidak menjamin masa depan mereka, karena dalam kenyataan tidak ada bukti yang signifikan memperlihatkan bahwa masa depan (kesejahteraan) anak yang putus sekolah dengan anak yang lulus hingga SMA berbeda. Bahkan, tidak jarang terjadi anak-anak yang putus sekolah ternyata dalam kehidupan nyata memiliki taraf kehidupan yang lebih sejahtera daripada anak yang lulus SMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, 1997. *Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Budiono, 1998. *Dampak Krisis Ekonomi dan Moneter Terhadap Pendidikan*. Jakarta: Pusat penelitian Sains dan Teknologi Lembaga Penelitian UI.
- Darmaningtyas, 1999. *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis: Evaluasi Pendidikan di Masa krisis*. Yogyakarta: Kerjasama LPIST dan Pustaka Pelajar.
- Effendi, Tadjuddin Noer, 1992. "Buruh Anak-Anak, Phenomena di Kota dan Pedesaan", dalam: *Buruh Anak di Sektor Informal-Tradisional dan Formal*. Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
- Hariadi, Sri Sanituti & Bagong Suyanto (eds.), 2001. *Anak-anak yang Dilanggar Haknya: Potret Sosial Anak Rawan di Indonesia yang membutuhkan Perlindungan Khusus*. Kerjasama Pusat Kajian Anak FISIP Unair, LPA Jatim, dan UNICEF.
- Imawan, Wynandin, 1999. *Krisis Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Terakhir Pekerja Anak*. Makalah untuk Lokakarya Penyusunan Kebijakan Penanganan Pekerja Anak di Indonesia. Diselenggarakan Bappenas, ILO IPEC dan Depnaker pada tanggal 22-24 Juli 1999 di Bogor.
- Irwanto dkk., 1995. *Pekerja Anak di Tga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan*. Jakarta: Unicef dan Pusat Penelitian Unika Atma Jaya.
- Irwanto, 1996. "Kajian Literatur dan Penelitian Mengenai Pekerja Anak Sejak Pengembangan Rencana Kerja IPEC 1993", dalam: *Konfer-ensi Nasional II Masalah Pekerja Anak di Indonesia*. Kerjasama Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Departemen Tenaga Kerja RI, dan ILO/IPEC.
- Irwanto, Muhammad Farid & Jeffry Anwar, 1999. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*. Jakarta: Kerjasama PKPM Unika Atmajaya Jakarta, Departemen Sosia, dan UNICEF.
- Johan, Maiyasyak dkk. (eds.), 1998. *Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Indonesia*. Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia Medan.
- JURNAL ANALISIS SOSIAL Edisi 5/Mei 1997. *Pekerja Anak dan Anak Jalanan Versus Konvensi Hak Anak*. Kerjasama Akatiga dan UNICEF.
- Kuntoro dkk., 1996. *Beberapa Faktor yang mempengaruhi Putus Sekolah Siswa Wanita di Sekolah Dasar dan Lanjutan Tingkat Pertama di Beberapa Desa di Jawa Timur*. Kerjasama BKKBN, UNFPA, dan Pusat Penelitian Kependudukan dan Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.



- Manning, Chris, Tadjuddin Noer Effendi & Tukiran, 1990. *Struktur Pekerjaan, Sektor Informal, dan Kemiskinan di Kota, Sebuah Studi Kasus di Diraprajan*. Yogyakarta: Pusat Kajian Kependudukan.
- Mulandar, Surya (ed.), 1996. *Dehumanisasi Anak Marginal, Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*. Bandung: AKATIGA Gugus Analisis.
- Muller, Johannes, "Pendidikan Sebagai Jalan Pembebasan Manusia dari Cengkeraman Kemelaratan", dalam: *Prisma* No. 7, Juli 1980.
- Mustain dkk., 1999. *Studi Kualitatif Tentang Pekerja Anak di Jawa Timur*. Kerjasama Pusat Studi Ketenagakerjaan Unair, Bappeda Tingkat I Jatim dan UNICEF.
- Raharjo, Yulfita dkk. (ed.), 1998. *Dampak Krisis Moneter dan Bencana El Nino Terhadap Masyarakat, Keluarga, Ibu dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bekerjasama dengan UNICEF.
- Robinson, Philip, 1986. *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Surbakti, S, dkk. (eds.), *Prosiding Lokakarya Pesiapan Survei Anak Rawan: Studi Rintisan di Kotamadya Bandung*. Jakarta: Kerjasama BPS dan UNICEF.
- Suyanto, Bagong dkk., 1997. *Profil Pendidikan dan Penyusunan program Penanganan Anak Putus Sekolah di Desa IDT Propinsi Jawa Timur*. Kerjasama FISIP Universitas Airlangga dengan bappeda Propinsi Dati I Jawa Timur.
- Suyanto, Bagong, 1999. *Analisis Situasi Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan Dasar di Jawa Timur*. Kerjasama FISIP Unair, Bappeda Tingkat I Jatim dan UNICEF.
- Suyanto, Bagong & Sri Sanituti Hariadi (eds.), 2000. *Pekerja Anak: Masalah dan Upaya Penanganannya*. Surabaya: Kerjasama LPA Jatim dan UNICEF.
- Suyanto, Bagong dkk. (eds.), 2000. *Tindak kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya*. Surabaya: Kerjasama LPA Jatim dan UNICEF.
- Sularto, St., 2000. *Seandainya Aku Bukan Anakmu*. Jakarta: KOMPAS Bekerjasama dengan World Vision Indonesia.
- Tjandraningsih, Indrasari, 1995. *Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak*. Bandung: AKATIGA.
- White, Ben & Indrasari Tjandraningsih, 1998. *Child Workers in Indonesia*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- _____, 1994. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II: Kurikulum Untuk Abad ke-21*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- _____, 1998. *Pekerja Anak dan Penanggulangannya*. Jakarta: SAMIN DAN IPEC.
- _____, 2000. *Mewujudkan Hak-Hak Anak Indonesia*. Jakarta: Kerjasama UNICEF dan LSM.
- _____, 2000. *Challenges for a New Generation. The Situation of Children and Women in Indonesia 2000*. UNICEF dan Pemerintah RI.

Anak-anak dari keluarga miskin, siswa yang tinggal kelas, dan terlebih anak yang sudah terlanjur putus sekolah sesungguhnya adalah bagian dari kelompok anak-anak yang bernasib malang dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Kekeliruan kita di masa lalu adalah menganggap masalah anak-anak malang ini akan dapat terselesaikan dengan sendirinya setelah persoalan kemiskinan dapat diatasi dan stabilitas politik berhasil diciptakan. Pengalaman di masa lalu—diakui atau tidak— telah mengajarkan kepada kita bahwa masalah anak rawan adalah sebuah isu spesifik yang perlu ditangani secara khusus, berkesinambungan dan membutuhkan kesabaran yang benar-benar ekstra, karena ada banyak faktor dan jenjang masalah yang mesti diurai satu per satu sebelum kita dapat memahami akar masalah yang sebenarnya dari masalah krusial yang satu ini.

ISBN 602862535-3



9 786028 625357